



UNIVERSITAS INDONESIA

**FAKTOR-FAKTOR ORGANISASI PADA PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN INKLUSI DI SDN 02 DAN SDN 06 LEBAK BULUS
SERTA SDN 24 KRAMAT JATI**

TESIS

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

**ASWIN WIHDIYANTO
0806440974**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ILMU ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
JAKARTA
JUNI 2010**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Aswin Wihdiyanto
NPM : 0806440974
Program Studi : Ilmu Administrasi, Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Pendidikan.
Judul Tesis : Faktor-faktor Organisasi Pada Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di SDN 02 dan SDN 06 Lebak Bulus serta SDN 24 Kramat Jati.

Telah berhasil dipertahankan di depan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Administrasi, Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si (.....)
Penguji : Prof. Dr. Chandra Wijaya, MM, M.Si. (.....)
Penguji : Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.Sc. (.....)
Penguji : Lina Miftahul Jannah, M.Si. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 23 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat Nya, saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulis Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Administrasi, Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Saya sangat menyadari, tanpa bantuan dari berbagai pihak, bukanlah hal mudah bagi saya untuk menyelesaikan kuliah dan Tesis. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksun, MSi, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tesis ini.
- (2) Kepada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional yang memberikan kesempatan kepada saya mendapatkan beasiswa mengikuti Program Magister.
- (3) Dr. drg. Ekodjatmiko Soekarso, MKom, selaku mantan Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Ir. Winarno Soetrisno selaku kasubdit program, MM, Ir. Teguh Widodo, MM selaku kasubdit kelembagaan, dan seluruh pejabat serta rekan di lingkungan Direktorat Pembinaan SLB yang telah mendukung saya dalam mengikuti pendidikan ini.
- (4) Pihak SDN 02 Lebak Bulus dan SDN 06 Lebak Bulus serta SDN 24 Kramat Jati yang banyak membantu saya dalam memperoleh informasi dan data yang diperlukan.
- (5) Kepada istri, Maya Indrasti Notoprayitno, SH, MSi, yang telah memberi dukungan teknis dan dukungan moril yang tidak terhingga sejak saya mengikuti masa perkuliahan hingga penyusunan tesis ini
- (6) Kepada orang tua dan keluarga atas dukungan moril, materiil, serta doa yang diberikan.
- (7) Kepada para sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan moril dan doanya.

Akhir kata saya berharap, Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Juni 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aswin Wihdiyanto
NPM : 0806440974
Program Studi : Program Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Pendidikan
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

demi perkembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia, **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Faktor-faktor Organisasi Pada Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di SDN 02 dan SDN 06 Lebak Bulus serta SDN 24 Kramat Jati.

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Indonesia, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 23 Juni 2010

Yang menyatakan

(Aswin Wihdiyanto)

ABSTRAK

Nama : Aswin Wihdiyanto
Program Studi : Kebijakan dan Administrasi Pendidikan
Judul : Faktor-faktor Organisasi Pada Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di SDN 02 dan SDN 06 Lebak Bulus serta SDN 24 Kramat Jati.

Fokus dari penelitian ini adalah sekolah inklusif di SDN 02 dan SDN 06 Lebak Bulus serta SDN 24 Kramat Jati. Sekolah inklusif adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan tidak hanya untuk anak normal tapi juga untuk anak cacat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor organisasi seperti apa yang dimiliki oleh sekolah reguler tersebut sehingga sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif. Metodologi yang digunakan untuk menganalisis adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan positivis, dan data dikumpulkan melalui proses wawancara dengan beberapa informan terkait di sekolah. Hasil penelitian diperoleh bahwa guna siap memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus, sekolah reguler perlu melakukan perubahan atau penyesuaian pada beberapa faktor-faktor organisasi yang ada.

Kata kunci:
Organisasi, Sekolah Inklusif, Kebijakan Pendidikan

ABSTRACT

*Name : Aswin Wihdiyanto
Study Program : Education Policy and Administration
Title : Organizational Factors in Implementation of Inclusive Education at SDN 02 and SDN 06 Lebak Bulus and SDN 24 Kramat Jati.*

The focus of this research is an inclusive school as SDN 02 and SDN 06 Lebak Bulus and SDN 24 Kramat Jati. Inclusive schools are schools that provide education for children is not only normal but also for children with disabilities. This study aimed to determine factors such as what the organization is owned by regular schools so that schools can organize an inclusive education. The methodology that used to analyze is qualitative research with positivistic approach, and data collected through an interview process with several related informants in the school. Results showed that in order to provide educational services to children with special needs, mainstream schools need to make changes or adjustments in some of the factors existing organization.

*Keywords:
Organization, Inclusive School, Education Policy*

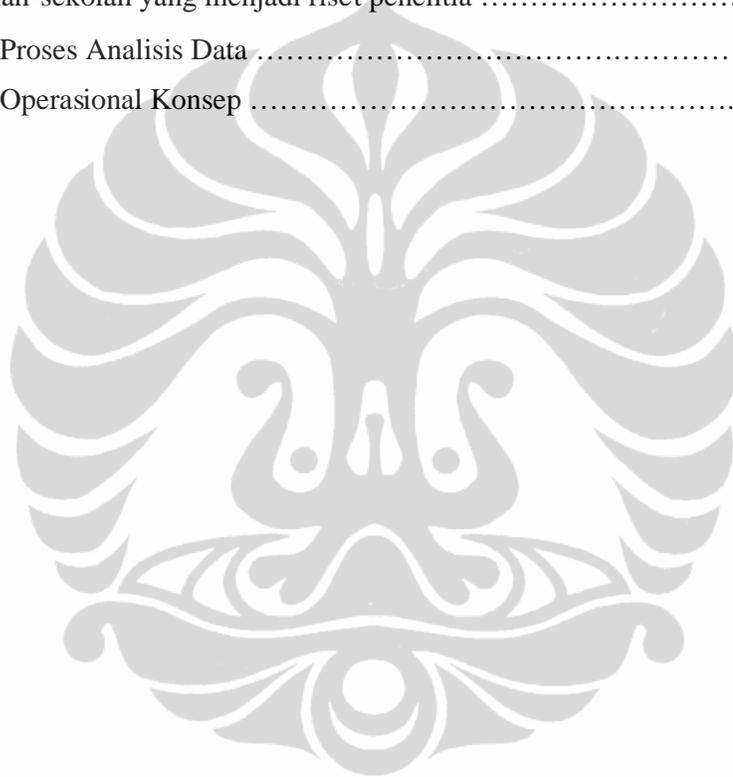
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Signifikansi Penelitian	8
1.5 Sistematika Laporan	8
2 KERANGKA TEORITIK	10
2.1 Definisi Konsep	10
2.1.1 Karakteristik Organisasi	11
2.1.2 Sumber Daya Manusia Dan Sumber Daya Non Manusia	13
2.1.3 Pengorganisasian Sumber Daya	14
2.1.4 Perkembangan Organisasi	15
2.1.4.1 Organisasi Sebagai Sistem Terbuka (An Open System)	16
2.1.4.2 Desain Organisasi Dengan Pendekatan Modern	17
2.1.5 Struktur Organisasi	18
2.1.6 Teknologi Organisasi	19
2.1.6.1 Ketahanan Jangka Panjang	19
2.1.6.2 Teknologi Insentif	20
2.1.7 Perubahan Organisasi	21
2.1.7.1 Perubahan Yang Direncanakan	22
2.1.7.2 Tipe Perubahan Keorganisasian	22
2.1.8 Penyesuaian Pada Proses Belajar Mengajar Di Sekolah Inklusif	23
2.2 Penelitian Terdahulu	27
2.3 Keterkaitan Konsep	28
2.4 Operasional Konsep	31
3 METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian	36
3.2 Metode Pengumpulan Data	36
3.3 Informan	37

3.4	Proses Analisis Data	39
3.5	Lokasi Dan Waktu Penelitian	40
3.6	Keterbatasan Penelitian	41
4	PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI PROPINSI DKI JAKARTA.....	42
4.1	Kebijakan Pengembangan Pendidikan Inklusif Di Propinsi DKI Jakarta	42
4.2	Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Di Tingkat Sekolah Dasar Di Propinsi DKI Jakarta.....	48
4.2.1	SDN 02 Lebak Bulus Jakarta Selatan	47
4.2.1.1	Bidang Kesiswaan	49
4.2.1.2	Bidang Pendidikan Dan Pengajaran	51
4.2.1.3	Bidang Kerja Sama	54
4.2.2	SDN 06 Lebak Bulus Jakarta Selatan	55
4.2.2.1	Bidang Kesiswaan	56
4.2.2.2	Bidang Pendidikan Dan Pengajaran	58
4.2.2.3	Bidang Kerja Sama	61
4.2.3	SDN 24 Kramat Jati Jakarta Timur.....	62
4.2.3.1	Bidang Kesiswaan	65
4.2.3.2	Bidang Pendidikan Dan Pengajaran	66
4.2.3.3	Bidang Kerja Sama	71
5	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR ORGANISASI PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SDN 02 DAN SDN 06 LEBAK BULUS SERTA SDN 24 KRAMAT JATI ..	73
5.1	Tujuan Bersama Dalam Pelaksanaan Sekolah Inklusi Yang Ramah Untuk Semua	72
5.2	Sumber Daya Manusia Pada Penyelenggaraan Sekolah Inklusif.....	76
5.3	Penyesuaian Proses Pembelajaran Di Sekolah Inklusif	82
5.4	Struktur Organisasi Dan Pengorganisasian Sumber Daya Manusia Dan Sumber Daya Non Manusia Di Sekolah Inklusif	88
6	KESIMPULAN DAN SARAN	99
6.1	Kesimpulan	99
6.2	Saran.....	99
	DAFTAR REFERENSI	102

DAFTAR GAMBAR/TABEL/BAGAN

Gambar 5.1	Gambar Kerjasama Sekolah Inklusif	78
Gambar 5.2	Gambar Peranan GPK dalam Pembelajaran bagi ABK	86
Tabel 2.1	Tabel Opeasional Konsep	32
Tabel 4.1	Tabel Kondisi/Jumlah Siswa ABK (Siswa Cacat/Siswa Berkebutuhan Khusus) Tahun 2009/2010.....	46
Tabel 5.1	Tabel Intisari Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah-sekolah yang menjadi riset penelitia	95
Bagan 3.1	Bagan Proses Analisis Data	39
Bagan 2.1	Bagan Operasional Konsep	30



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Dalam kaitannya dengan hasil capaian pembangunan di bidang pendidikan, pemerintah menetapkan beberapa indikator capaian kinerja yang disebut indikator kunci kinerja (IKK). Indikator ini dipandang sebagai salah satu acuan tingkat keberhasilan pencapaian program. Salah satu contoh IKK ini adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Sampai dengan tahun 2008, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk satuan pendidikan SD/MI/Paket A diperkirakan mencapai 95,14%, sedangkan APK untuk satuan pendidikan SMP/MTs/Paket B diperkirakan sebesar 96,18%, sedangkan APK untuk satuan pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C diperkirakan sebesar 64,28%. (Data diperoleh dari Paparan Direktur Pembinaan SLB 2008 – 2009). Terkait dengan program wajib belajar pendidikan dasar (wajardikdas) sembilan tahun maka, bila melihat dari APK yang telah dicapai, khususnya untuk satuan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, maka dapat diproyeksikan bahwa sampai dengan tahun 2009 penuntasan wajib belajar sembilan tahun dapat tercapai.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan penuntasan wajib belajar sembilan tahun tersebut, masih jauh dari sesungguhnya perluasan kesempatan maupun peningkatan mutu pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Masih banyak pihak-pihak atau kelompok-kelompok minoritas yang

belum dapat menikmati pendidikan baik formal maupun non formal secara baik dan layak.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 dipandang dapat menjadi payung pelaksanaan pendidikan yang dapat mengakomodir seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai kondisi yang beragam. Pasal 32 UU Sisdiknas Tahun 2003, ayat (1) menyebutkan bahwa Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Ayat (2) menerangkan bahwa Pendidikan Layanan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Perlu disadari bersama bahwa tidak semua anak memiliki kondisi yang sama, sebagian dari mereka dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus, misalnya anak cacat, baik kecacatan sejak lahir atau kecacatan yang dialami selama perjalanan hidupnya. Demikian halnya anak-anak yang kurang beruntung karena dilahirkan dari keluarga tidak mampu, anak-anak yang berada di daerah miskin dan atau terpencil, anak-anak korban bencana alam, bencana sosial, dan lain sebagainya, mereka juga dapat dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus. Untuk mengembangkan potensi dan bakat yang mereka miliki tentu harus melalui proses tersendiri yang dapat mengantisipasi segala keterbatasan yang ada pada diri mereka.

Mengacu kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (Dit. PSLB), sejak tahun 2006 Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dikelompokkan menjadi anak yang memerlukan pendidikan khusus (PK) dan anak yang memerlukan pendidikan layanan khusus (PLK). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 5 ayat (2), menyatakan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus adalah warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial. Perhatian dari penelitian terkait kesempatan atau kemudahan akses pendidikan bagi anak-anak cacat. Anak cacat termasuk dalam anak berkebutuhan khusus, akan tetapi tidak semua Anak berkebutuhan khusus adalah anak cacat.

Berdasarkan data Susenas tahun 2003, penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 1,48 juta atau sekitar 0,7% dari jumlah penduduk Indonesia. Adapun jumlah penyandang disabilitas yang masih berada pada rentang usia sekolah (5 s.d 18 th) diperkirakan berjumlah 21,42% dari seluruh penyandang disabilitas yang ada. Data yang dikeluarkan oleh Pusat Statistik Pendidikan (PSP), Balitbang, Depdiknas, sampai dengan tahun 2006/2007, prosentasi penduduk penyandang disabilitas (penyandang cacat) yang berada dalam rentang usia sekolah (7 – 18 tahun) diperkirakan sebesar 3% dari seluruh penduduk usia sekolah (7 – 18 tahun) atau sekitar 1.553.000 jiwa, dan dari jumlah tersebut jumlah yang bersekolah diperkirakan sebesar sekitar 63.397 jiwa atau sebesar 4,08%¹. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa masih ada sekitar 95,92% penduduk cacat usia 7 - 18 yang belum bersekolah.

Data tersebut di atas dapat memberikan gambaran bahwa prosentase anak cacat yang bersekolah (mengeyam pendidikan formal) masih relatif kecil. Hal ini tidak terlepas dari masih rendahnya kesadaran beberapa orang tua untuk menyekolahkan anaknya yang cacat.

Model pendidikan khusus bagi anak cacat yang paling lama ada dan masih diterapkan hingga saat ini adalah model segregasi, di mana anak cacat dididik secara terpisah dari teman sebayanya yang normal. Contoh yang umum ditemukan adalah Sekolah Luar Biasa (SLB). SLB memang sejak awal dirancang untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak cacat sesuai dengan jenis dan kebutuhannya sehingga mereka memiliki kurikulum, metode dan sarana pembelajaran, sistem evaluasi, guru khusus maupun manajemen pengelolaan yang terpisah dari sekolah reguler pada umumnya. Dari segi pengelolaan model segregasi memang menguntungkan, karena mudah bagi guru dan administrator. Namun demikian dari sudut pandang peserta didik, model segregasi dirasa dapat merugikan.

¹ Istilah penyandang cacat tertuang dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, dimana Undang-Undang tersebut sampai dengan saat ini masih berlaku. Namun demikian akhir-akhir ini banyak timbul perdebatan untuk menggantikan istilah “penyandang cacat” dengan “penyandang disabilitas”. Pada tanggal 29 Maret pada acara pertemuan Penyusunan Bahan Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Cacat, disepakati oleh peserta yang terkait untuk mengganti istilah “penyandang cacat” dengan “penyandang disabilitas” karena istilah penyandang cacat tersebut secara tentatif dipandang mempunyai arti yang bernuansa negative.

Disebutkan oleh Reynold dan Birch, antara lain bahwa model segregatif tidak menjamin kesempatan anak cacat mengembangkan potensi secara optimal, karena kurikulum dirancang berbeda dengan kurikulum sekolah biasa. Kecuali itu, secara filosofi model segregasi tidak logis, karena menyiapkan peserta didik untuk kelak berintegrasi dengan masyarakat normal, tapi mereka dipisahkan dengan masyarakat normal. Relevan dengan kondisi yang ada sekarang ini adalah banyak lulusan SLB, yang masih sering datang dan menghabiskan waktunya di sekolah karena mereka merasa lebih nyaman dan aman bila berada di lingkungan komunitasnya dari pada harus berada di lingkungan masyarakat umum (Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Inklusi, Direktorat Pembinaan SLB, 2005).

Belajar dari beberapa kelemahan pada model pembelajaran segregatif, pada pertengahan abad ke dua puluh mulai dikembangkan model pengarusutamaan (*mainstreaming*). Model pengarusutamaan dikenal sebagai model yang paling tidak terbatas, artinya seorang anak cacat harus ditempatkan pada lingkungan yang paling tidak terbatas menurut potensi, bakat, kemampuan dan jenis dan atau tingkat kecacatannya. Dalam model ini dirancang berbagai alternatif layanan pendidikan, mulai dari yang sangat bebas (kelas biasa penuh) sampai dengan yang paling terbatas (sekolah khusus sepanjang hari). Melalui konsep yang ditawarkan oleh model *mainstreaming* ini memungkinkan anak cacat untuk dapat bersekolah bersama-sama dengan anak-anak normal lainnya di sekolah reguler. Hal ini merupakan perkembangan yang sangat signifikan di dunia pendidikan formal mengingat sekolah reguler mulai didorong dan diarahkan untuk menjadi sekolah yang ramah bagi semua menuju sekolah yang inklusif.

Sapon-Shevin menyatakan bahwa pendidikan/sekolah inklusif sebagai sistem pendidikan yang mensyaratkan agar semua anak cacat dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler, bersama-sama teman seusianya. Oleh karena itu, ditekankan adanya restrukturisasi sekolah, sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, artinya sekolah tersebut harus kaya dalam sumber belajar dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu siswa, guru, orang tua dan juga masyarakat sekitarnya (Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Inklusi, Direktorat Pembinaan SLB, 2005).

Di Amerika diperkirakan hanya 0.5% anak cacat yang bersekolah di sekolah khusus, lainnya berada di sekolah reguler. Hal tersebut dikemukakan oleh Ashman dan Elkins. Di Inggris, pada tahun 1980 – 1990-an, peserta didik di sekolah khusus diproyeksikan menurun dari sembilan juta menjadi sekitar dua juta orang, karena kembali ke sekolah reguler (Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Inklusi, Direktorat Pembinaan SLB, 2005).

Pendidikan inklusi merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak cacat. Selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Berdasarkan data yang ada pada Direktorat PSLB, sampai dengan tahun 2006/2007 terdapat 15.181 siswa sekolah inklusif yang terdiri dari berbagai jenis kebutuhan khusus (jenis kecacatan). Masih berdasarkan data tersebut jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif (sekolah inklusif) di seluruh Indonesia adalah sebanyak 814 sekolah dari berbagai satuan pendidikan (SD, SMP dan SMA). Dibandingkan dengan jumlah seluruh SD, SMP maupun SMA yang ada di Indonesia persentase sekolah inklusif ini masih relatif rendah.

Dari seluruh siswa inklusif yang terdata, sebagian besar adalah anak-anak yang dikategorikan lambat belajar, yaitu sekitar 75,23%, dan sebesar 14,62% nya merupakan anak-anak tuna grahita (termasuk grahita ringan). Sisanya sebesar 10,15% merupakan anak-anak dengan berbagai jenis kecacatan lainnya.

Di Propinsi DKI Jakarta, sekolah inklusif telah diterapkan sejak tahun 2007 lalu melalui payung hukum Peraturan Gubernur (Pergub). Berdasarkan pergub inilah beberapa sekolah ditunjuk untuk membuka program pendidikan inklusi. Penunjukan setiap sekolah ini didasarkan pada adanya kesiapan sekolah untuk menerima ABK. Persiapan dimaksud terutama menyangkut sarana dan sumber daya manusianya. Hasilnya sebanyak 41 sekolah mulai dari tingkat TK sampai SMU menjadi sekolah inklusif.

Bagi pemerintah daerah Propinsi DKI Jakarta, penerapan sekolah inklusif, tidak menjadi masalah mengingat sebelumnya telah dikembangkan model sekolah terpadu. Secara umum sekolah inklusif yang ada lebih menerima siswa cacat dari jenis tunanetra, tunarungu, tunadaksa dan tunawicara yang masih mempunyai IQ normal dan di atas rata-rata. Sementara bagi anak cacat seperti, tunagrahita, autisme

dan berkesulitan belajar akan sangat tergantung kepada kesiapan sekolahnya. Dapat dipastikan bahwa pada saat seorang siswa didaftarkan, akan ada penilaian (*assesment*) untuk mengetahui kategori kekhususan dan kebutuhan anak.

Terkait dengan masalah biaya, diperkirakan biaya sekolah bagi anak cacat relatif lebih mahal, mengingat mereka memerlukan penanganan khusus. Kendala utama program inklusif yang sudah dijalankan ini di Propinsi DKI Jakarta umumnya masih terfokus pada masalah penanganan anak. Tidak semua guru bisa melayani anak-anak cacat. Solusinya adalah semua unsur sekolah melalui kepala sekolah terus melakukan koordinasi secara intensif agar diperoleh gambaran ideal tentang cara penanganan anak berkebutuhan khusus, termasuk dalam hal ini adalah kemungkinan melakukan kemitraan dengan pihak-pihak terkait yang berkompeten. Selain itu, pemerintah sendiri telah menunjuk beberapa guru pembimbing khusus, sekolah luar biasa (SLB) untuk ikut membantu menangani anak-anak semacam itu.

Sekolah reguler awalnya memang dirancang untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak normal, dimana sarana dan prasarana yang disediakan, kurikulum, metode pembelajaran maupun manajemen pengelolaannya memang diperuntukan untuk anak-anak dengan kondisi normal. Untuk itu diperlukan beberapa penyesuaian, modifikasi pada beberapa aspek yang ada di sekolah reguler sehingga menjadi siap dan mampu untuk menangani anak cacat di sekolah mereka tersebut.

Sekolah yang dijadikan objek penelitian adalah SDN 02 Lebak Bulus dan SDN 06 Lebak Bulus, keduanya berada di kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, serta SDN 24 Kramat Jati yang berada di kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Pemilihan sekolah-sekolah tersebut salah satunya adalah dengan mempertimbangkan jenis kecacatan dari siswa berkebutuhan khusus yang ditangani. Untuk SDN 02 Lebak Bulus, menampung siswa berkebutuhan khusus dengan jenis tunanetra, SDN 06 Lebak Bulus dan SDN 24 Kramat Jati menampung siswa berkebutuhan khusus autisme dan tunagrahita. Di samping itu masih terdapat pertimbangan lainnya dalam pemilihan ketiga sekolah tersebut, SDN 02 Lebak Bulus merupakan salah satu sekolah yang menjadi rintisan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Propinsi DKI Jakarta, dimana sekolah ini sudah mulai merintis penyelenggaraannya sejak tahun 1999. Sebaliknya, SDN 06 Lebak Bulus

merupakan sekolah yang relatif masih baru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi dan dipandang akan menjadi hal yang cukup menarik untuk mengkaji kesiapan organisasi sekolah tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Pertimbangan lain untuk SDN 24 Kramat Jati adalah, sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang diarahkan menjadi sekolah model penyelenggaraan pendidikan inklusi dan merupakan salah satu sekolah yang pernah mendapat pendampingan dari Helen Keler Internasional.

1.2. Pokok Masalah

Penelitian ini mengangkat pokok masalah:

Bagaimana kondisi faktor-faktor organisasi di SDN 02 Lebak Bulus, SDN 06 Lebak Bulus dan SDN 24 Kramat Jati, dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusi?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

Menganalisis kondisi faktor-faktor organisasi di SDN 02 Lebak Bulus, SDN 06 Lebak Bulus, SDN 24 Kramat Jati, dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusif.

1.4. Signifikansi Penelitian

Dengan tersentuhnya nuansa kebersamaan dalam dunia pendidikan serta dikembangkannya sekolah inklusif sebagai sekolah yang ramah bagi semua, diharapkan dapat menjadi faktor yang mendorong peningkatan kesadaran dan minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya yang cacat. Di samping itu dengan bermunculannya sekolah inklusif di berbagai tempat tentu akan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak cacat tersebut. Tidaklah terlalu berlebihan bila kehadiran sekolah inklusif diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah anak cacat di suatu wilayah atau bahkan nasional.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi faktor-faktor organisasi di SDN 02 Lebak Bulus, SDN 06 Lebak Bulus, dan SDN 24 Kramat Jati dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusif. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat teori maupun manfaat praktis

yang dapat dilaksanakan atau ditiru oleh sekolah reguler lainnya yang memiliki kepedulian, kesungguhan dan ketulusan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak cacat.

1.5. Sistematika Laporan

Tesis dengan judul Faktor-faktor Organisasi pada Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di SDN 02 dan SDN 06 Lebak Bulus serta SDN 24 Kramat Jati, terdiri dari enam Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, pokok masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika laporan.

Bab 2 merupakan bab berkenaan dengan kerangka teoritik yang menguraikan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari teori-teori yang digunakan maupun pendapat para ahli dalam bidang organisasi, pembelajaran dan pendidikan inklusif. Dari teori-teori dan pendapat yang ada tersebut selanjutnya dibuat model operasional konsep untuk melihat kondisi faktor-faktor organisasi di SDN 02 dan SDN 06 Lebak Bulus serta SDN 24 Kramat Jati, terutama dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.

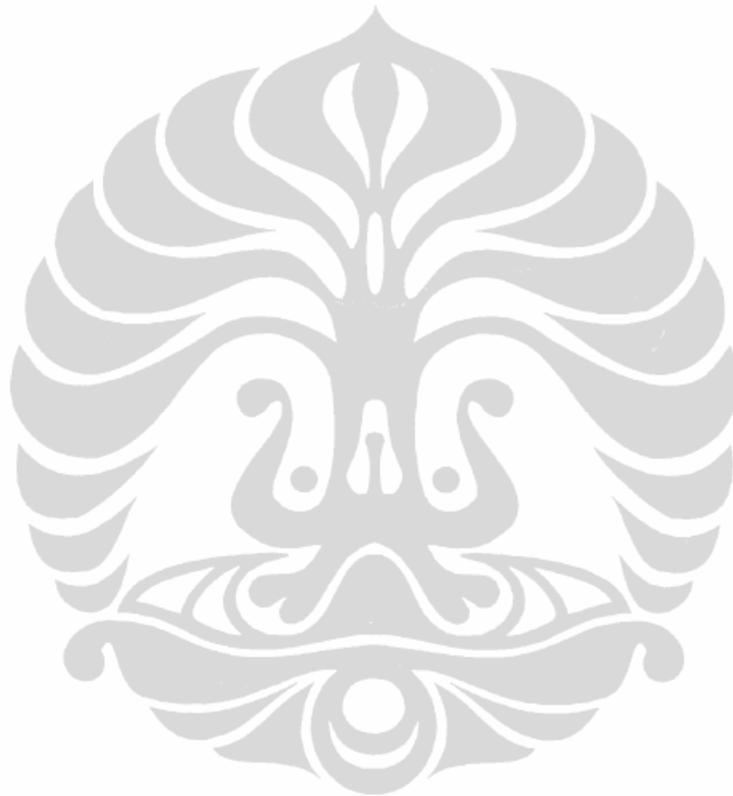
Bab 3 merupakan bab tentang metode penelitian yang berisi mengenai pendekatan dan penelitian, metode pengumpulan data, informan dalam penjangkaran data, proses analisis data, lokasi dan waktu penelitian serta keterbatasan penelitian.

Bab 4 merupakan bab yang berisi tentang gambaran pelaksanaan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar di Propinsi DKI Jakarta, khususnya di SDN 02 dan SDN 06 Lebak Bulus serta SDN 24 Kramat Jati.

Bab 5 merupakan bab yang berisi tentang analisi faktor-faktor organisasi pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 02 dan SDN 06 Lebak Bulus, serta SDN 24 Kramat Jati. Kondisi faktor organisasi yang diteliti terkait tentang tujuan bersama, sumber daya manusia, struktur organisasi, serta pengorganisasian sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Di samping itu pada bab ini juga

diteliti tentang penyesuaian proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolah inklusif tersebut.

Bab 6 merupakan bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil penelitian untuk menjawab pokok permasalahan yang dituangkan dalam tesis ini. Saran berisi tentang masukan perbaikan bagaimana sebaiknya kondisi faktor-faktor organisasi pada penyelenggaraan pendidikan inklusi.



BAB 2

KERANGKA TEORITIK

2.1. Definisi Konsep

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor organisasi yang ada di SDN 02 Lebak Bulus, SDN 06 Lebak Bulus dan SDN 24 Kramat Jati terutama terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut penelitian ini menggunakan teori tentang karakteristik organisasi dari Edgar H. Schein, teori elemen-elemen organisasi oleh Reece dan teori tentang unsur-unsur organisasi yang dikemukakan E. Kast dan James E. Rosenzwing. Di samping itu, untuk memperkuat teori-teori sebagaimana telah disebutkan di atas, penelitian ini juga menambahkan beberapa teori yang cukup relevan yaitu tentang Sumber Daya Manusia oleh J. Winardi maupun H. Abdurahman, teori tentang Ppengorganisasian yang dikemukakan baik oleh Chaster I. Barnard, George R. Terry dan juga Henry Fayol.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah reguler tidak terlepas dari bagaimana suatu sekolah sebagai suatu organisasi melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Berkenaan dengan hal tersebut dalam penelitian ini penulis memasukkan juga beberapa teori tentang Lingkungan Organisasi dan teori Organisasi sebagai Sistem Terbuka yang dikemukakan oleh Prof Martani dan Lubis, teori tentang *A Viable Organizations* yang dikemukakan oleh Hick, teori tentang Struktur Organisasi dan teori berkenaan dengan Teknologi Intensif sebagaimana diungkapkan oleh James Thompsons, teori-teori terkait Perubahan Organisasi yang dikemukakan oleh Garnerd, Stephen Robbins, David A. Nadler dan Michael L. Thusman serta teori tentang Ketahanan Jangka Panjang yang dikemukakan J. Winardi.

Pendidikan inklusi tidak terlepas dari proses belajar mengajar, untuk itu dalam penelitian ini juga dimuat beberapa teori yang terkait dengan penyesuaian proses belajar mengajar sebagaimana disampaikan oleh S. Nasution, Nanan Isman

Salman, Oemar Hamalik, Jerrold E. Kemp, Hardi S. Hood dan Koestrini Hardi, Takdirotul Musfiroh serta Mulyono Abdulrahman.

2.1.1. Karakteristik Organisasi

Manusia dilahirkan, dididik dan melewati masa hidup melalui organisasi. Peradaban modern pada hakekatnya sangat bergantung pada organisasi-organisasi sebagai bentuk pengelompokan sosial yang paling rasional dan efisien. Dengan cara mengkoordinasikan sejumlah besar tindakan manusia, organisasi mampu menciptakan suatu alat sosial yang ampuh dan dapat diandalkan.

Organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari aneka macam elemen atau subsistem, di antara mana subsistem manusia mungkin merupakan subsistem terpenting, dan di mana terlihat bahwa masing-masing subsistem saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan organisasi yang bersangkutan (J. Winardi, 2003, h. 15).

Sementara itu, suatu organisasi memiliki karakteristik seperti yang dikemukakan oleh Edgar H. Schein. Ia mengemukakan karakteristik dari suatu organisasi dengan berpendapat bahwa semua organisasi memiliki empat macam ciri sebagai berikut; (J. Winardi, 2003, h. 27)

- a. Koordinasi upaya;
- b. Tujuan umum bersama;
- c. Pembagian kerja;
- d. Hirarki otoritas

Dengan bekerja sama dan mengkoordinasikan upaya baik secara mental maupun fisik, setiap individu akan memperoleh sesuatu hal yang terbaik. Koordinasi upaya dari setiap individu tidak akan terwujud, bila tidak ada tujuan bersama diantara mereka. Untuk itu, ciri atau karakteristik organisasi yang kedua adalah bahwa para individu yang telah bersatu, juga harus memiliki keinginan untuk mencapai persetujuan untuk mencapai sesuatu yang merupakan kepentingan bersama (walaupun pada awalnya para individu tersebut memiliki tujuan berbeda), dan memberikan rangsangan kepada anggota suatu organisasi untuk bertindak.

Guna kelancaran dalam organisasi, maka suatu organisasi harus memiliki ciri berupa adanya pembagian kerja. Pembagian kerja dilakukan dengan membagi tugas-tugas kompleks dari para individu menjadi pekerjaan-pekerjaan yang khusus, oleh sebab itu, suatu organisasi dapat memanfaatkan sumber-sumber daya manusianya secara efisien. Pembagian kerja ini akan memungkinkan para anggota organisasi-organisasi menjadi lebih terampil dan mampu karena terspesialisasi secara berulang ulang. Suatu organisasi juga memerlukan hirarki otoritas yang jelas, karena tanpa adanya hirarki otoritas yang jelas, koordinasi upaya akan mengalami kesulitan atau bahkan tidak mungkin dilaksanakan. *Organizational survival related to management's ability to receive, transmit and act on information. The communication process links the organizational to its environment as well as to its part. Information flow to and from the organizational and within the organization. Information integrated activity within the organization. The problem arose because the information that flowed from the organization was different from the information that flow within the organization* (Gibson, Ivoncevich & Donnelly, p. 11).

Karakteristik dari suatu organisasi juga dikemukakan oleh Reece bahwa terdapat beberapa elemen dalam suatu organisasi, yakni terdiri dari: (J. Winardi, 2003, h. 26).

- a) Manusia;
- b) Tujuan tertentu;
- c) Pembagian tugas-tugas;
- d) Sebuah sistem untuk mengkoordinasikan tugas-tugas
- e) Sebuah batas yang dipatok, yang menunjukkan pihak yang berada di luarnya.

Namun demikian perlu menjadi perhatian, adalah sulit untuk mencapai sasaran yang tidak diketahui. Tujuan yang dapat diukur harus ditetapkan untuk setiap bawahan utama. Tanpa usaha bersama untuk mencapai tujuan itu, tanpa pengertian yang jelas dalam batas kemampuan bawahan, penentuan tujuan hanya akan menjadi latihan di atas kertas, yang tidak anda yakini dan tidak diyakini pula oleh orang-orang anda (J. Cribbin, 1990, h. 140).

Pendapat lain yang relevan mengatakan bahwa dalam suatu organisasi harus memuat sekurang-kurangnya empat unsur yaitu: (Fathoni, 2006, h. 25)

- a) *Goals Oriented*, yaitu mengarahkan pada pencapaian tujuan
- b) *Physicological syste*, yaitu orang-orang yang berhubungan dalam kelompok kerja.
- c) *Structure activities*, yaitu orang yang bekerja sama dalam satu hubungan yang berpola.
- d) *Technological system*, yaitu orang yang menggunakan pengetahuan dan teknologi

Guna memperkuat karakteristik dari suatu organisasi, maka dapat dilihat pula pendapat dari Chester I. Barnard yang menyatakan bahwa apabila orang-orang berkumpul menjadi satu, dan kemudian mereka secara formal mencapai persetujuan untuk mengkombinasi upaya mereka untuk mencapai tujuan bersama, maka hasilnya berupa sebuah organisasi. Dari pernyataan Barnard tersebut dapat diartikan bahwa terdapat upaya/aktivitas yang dikoordinasikan secara sadar, dan hal ini akan mengingatkan kepada kita bahwa di dalamnya tersirat tingkat tertentu perencanaan formal dan pembagian kerja (J. Winardi, 2003, h. 26). Penyelenggaraan pendidikan inklusi memerlukan perencanaan yang baik dan mencakup berbagai aspek. Perencanaan merupakan unsur kunci dari pelaksanaan. Perencanaan harus memasukkan pertimbangan terhadap halangan-halangan untuk pelaksanaan, langkah-langkah tindakan untuk melaksanakan sebuah ide dan konsekuensi dari masing-masing tahapan untuk mencapai hal ini, pemikiran kreatif adalah sangat penting (Evans, 1994, p. 25).

2.1.2. Sumber Daya Manusia Dan Sumber Daya Non Manusia

Elemen inti suatu organisasi adalah orang-orang (manusia) yang berinteraksi dan interaksi tersebut merupakan kondisi yang diperlukan untuk menetapkan eksistensi organisasi yang ada (J. Winardi, 2003, h. 18). Sementara itu, sumber daya manusia merupakan kekayaan yang paling penting, yang dimiliki oleh suatu

organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci bagi keberhasilan organisasi tersebut (Fathoni, 2003, h. 9).

Pentingnya manusia dalam suatu organisasi juga dikuatkan dengan pendapat yang disampaikan oleh Luthans yang menyatakan bahwa walaupun kegiatan rekognisi, strategi, dan implementasi globalisasi, teknologi informasi dan kualitas total penting bagi setiap organisasi yang menghadapi perubahan, tapi elemen kunci bagi untuk meraih keunggulan kempetitif adalah manusia (J. Winardi, 2003, h. 197).

Individu-individu (manusia) yang saling berinterkasi merupakan bagian dari elemen-elemen kerja sumber daya manusia. Elemen-elemen kerja sumber daya manusia merupakan elemen-elemen kemampuan individu (manusia) atau orang-orang yang mencakup kemampuan untuk bertindak, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan kemampuan untuk memanfaatkan konsep-konsep seperti: menciptakan, perencanaan, pengorganisasian, memotivasi, berkomunikasi dan pengawasan (J. Winardi, 2003, h. 18). Terkait dengan fungsi manajemen, Fayol mengungkapkan bahwa melaksanakan manajemen berarti membuat ramalan (*to forecast*) dan menyusun rencana, melakukan perorganisasian, melaksanakan komando, mengkoordinasikan dan mengawasi (J Winardi, 2003).

2.1.3. Pengorganisasian Sumber Daya

Sumber daya manusia seyogyanya harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan SDM untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi (Handoko, 1994, h. 4). Henry Fayol mengemukakan, pengorganisasian sumber-sumber daya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Hal ini lebih lanjut dikemukakan oleh Henry Fayol dalam bukunya yang berjudul *General and Industrial Management*, yaitu bahwa mengorganisasi sumber-sumber daya dilakukan dengan mengemukakan sejumlah petunjuk untuk mengorganisasi sumber-sumber daya: (J. Winardi, 2003, h. 23).

- a) Persiapkanlah rencana operasi dan laksanakan hal tersebut secara cermat.

- b) Laksanakan pengorganisasian faset-faset manusia dan material demikian rupa, sehingga mereka konsisten dengan sasaran-sasaran, sumber-sumber daya dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh perusahaan (organisasi).
- c) Tetapkanlah sebuah otoritas tunggal yang kompeten dan yang dapat melaksanakan pembinaan secara enerjetik (struktur manajemen formal).
- d) Koordinasikan semua aktivitas serta upaya.
- e) Rumuskan keputusan-keputusan yang jelas, yang bersifat khas dan tepat.
- f) Upayakan adanya pemilihan efisien demikian rupa, hingga masing-masing departemen dipimpin oleh seorang manajer kompeten yang enerjik, dan semua karyawan ditempatkan pada posisi di mana mereka memberikan servis maksimal.
- g) Rumuskan tugas-tugas dan kewajiban.
- h) Rangsanglah inisiatif dan tanggungjawab
- i) Sajikan imbalan yang cocok dan layak untuk servis yang diberikan.
- j) Terapkan sanksi-sanksi terhadap kesalahan-kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan.
- k) Pertahankan disiplin
- l) Upayakan agar kepentingan individual adalah konsistensi dengan kepentingan umum organisasi yang bersangkutan.
- m) Peliharalah kesatuan perintah
- n) Tingkatkan koordinasi material dan manusia
- o) Tetapkan dan laksanakan pengawasan-pengawasan
- p) Hindarilah peraturan-peraturan kaku dan kegiatan administrasi yang berlebihan.

2.1.4. Perkembangan Organisasi

Suatu organisasi dengan karakteristik sebagaimana tersebut di atas dapat mengalami perkembangan karena adanya pengaruh dari lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi bisa diartikan sebagai seluruh elemen yang ada di luar batas-batas organisasi, yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi sebagian ataupun suatu organisasi secara keseluruhan (Lubis dan Huseini, 1987, h. 19).

Sesuai dengan prinsip keterbukaan dan ketergantungan organisasi terhadap lingkungannya muncul pendapat yang menyatakan bahwa komposisi elemen-elemen lingkungan yang berpengaruh terhadap organisasi akan berlainan, sesuai dengan perbedaan organisasi dan kondisi lingkungannya. Berkenaan dengan hal tersebut, hal yang terpenting adalah, bagaimana kita mengidentifikasi elemen-elemen lingkungan yang dapat digunakan pada semua organisasi yang berada pada lingkungan yang berbeda.

Pengaruh lingkungan terhadap organisasi dapat dianalisis melalui dua dimensinya yaitu melalui kompleksitas dan stabilitasnya.¹ Kedua dimensi ini menentukan besarnya tingkat ketidakpastian lingkungan yang harus dihadapi oleh suatu organisasi. Ketidakpastian lingkungan menunjukkan keadaan dimana pimpinan organisasi tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai keadaan lingkungannya, sehingga menyebabkan timbulnya kesulitan dalam memperkirakan perubahan-perubahan lingkungan yang akan terjadi. Ketidakpastian ini menyebabkan tindakan-tindakan yang akan diambil oleh organisasi mempunyai resiko kegagalan yang tinggi (Lubis dan Huseini, 1987, h. 26) . *There can be many reason for poor motivation but one very important is mismatch between your own goals and those of the organization of when you are member (Fink, Jenks, Willits 6). Organizations are not static system but keep on developing, based on the needs of the system and the opportunities that exist in the environment (Sekaran, 1995, h. 221).*

2.1.4.1. Organisasi Sebagai Sistem Terbuka (*An Open System*)

Sebuah sistem merupakan suatu keseluruhan yang terdiri dari aneka macam komponen (subsistem) yang saling berinteraksi satu sama lainnya dalam rangka upaya mengusahakan pencapaian sasaran-sasaran sistem yang bersangkutan (J. Winardi, 2003, h. 44). Dengan pendekatan modern tersebut organisasi dipandang sebagai suatu sistem terbuka (*an open system*) yang berarti organisasi merupakan

¹ **Kompleksitas lingkungan** menunjukkan heterogenitas atau banyaknya elemen-elemen eksternal yang berpengaruh terhadap berfungsinya suatu organisasi. **Stabilitas** lingkungan adalah kecepatan perubahan yang terjadi pada elemen-elemen lingkungan.

bagian dari lingkungannya. Dalam rangka keterbukaan organisasi terhadap lingkungannya tampak bahwa organisasi merupakan suatu sistem, yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan yang memerlukan input dari lingkungan, melakukan proses transformasi untuk menghasilkan output yang dikeluarkan pada lingkungan organisasi (Lubis dan Huseini, 1987, h. 6).

Belakangan ini banyak dibahas sebuah model organisasi sebagai sistem terbuka (*an open system*), di mana komponen-komponen sistem berinteraksi pula secara erat dengan lingkungan yang mengelilingi sistem yang bersangkutan. Keberhasilan sistem terbuka tergantung pada kecermatan kerja sama secara harmonis dan terpadu dengan lingkungannya, hingga pada akhirnya dicapai kondisi “simbiosis mutualisma”. Dalam sistem terbuka kelangsungan hidup dan kejayaan dari suatu organisasi tergantung pada adaptasi yang efektif terhadap lingkungannya yang berarti mengidentifikasi sebuah strategi untuk memasarkan keluaran (produk dan jasa), memperoleh sumber-sumber daya yang dibutuhkan dan menangani ancaman-ancaman eksternal (Yukl, 1998, h. 7).

2.1.4.2. Desain Organisasi Dengan Pendekatan Modern

Dikarenakan berada dalam lingkungan organisasi itulah maka organisasi dapat dipengaruhi ataupun mempengaruhi lingkungannya. Sebagai sebuah sistem, suatu organisasi memasukkan bahan-bahan dasar dari lingkungan (yang mengelilinginya), kemudian bahan tersebut diproses, hingga terkonversi menjadi produk-produk maupun jasa-jasa. Selanjutnya produk atau jasa yang telah dihasilkan itu diserahkan kembali kepada lingkungannya.

Konsep tersebut di atas sejalan dengan konsep pendekatan modern. Pendekatan modern sering disebut sebagai pendekatan “ketergantungan” karena menyatakan bahwa suatu organisasi dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya dan hanya organisasi yang bisa beradaptasi secara tepat terhadap tuntutan lingkungan yang akan dapat mencapai keberhasilan (Lubis dan Huseini, 1987, h. 5). Berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk bertahan, Hick mengungkapkan bahwa sebuah organisasi yang dinamakan “*A Viable Organization*” merupakan organisasi yang

secara intern dikelola (*managed*) dengan baik dan mempunyai hubungan yang terus menerus berhasil dengan lingkungannya (J. Winardi, 2003, h. 139).

Untuk dapat menjawab tantangan dari tuntutan lingkungannya, maka tidak bisa tidak organisasi harus melakukan adaptasi atau penyesuaian. Kondisi ini secara tidak langsung akan berpengaruh kepada desain organisasi. Desain suatu organisasi akan berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi di dalam lingkungan, dan kebutuhan-kebutuhannya yang berubah. Saat ini bentuk keorganisasian yang makin lama makin banyak muncul pada organisasi-organisasi modern adalah organisasi dengan bentuk kelompok tugas (*Task Force*), yang terdiri dari sejumlah orang dan teknologi yang disatukan dalam suatu lingkungan khusus untuk melaksanakan pencapaian tujuan khusus tertentu (J. Winardi, 2003, h. 142). Lebih jelas lagi disampaikan, kerjasama menekankan pengendalian serta tujuan individu sehingga sasaran kelompok umum dapat tercapai (Scott, Likert, Carto, Jr, Brown & Stone, 1992, h. 72).

2.1.5. Struktur Organisasi

Pada semua organisasi akan dicapai suatu titik pada masa pertumbuhannya, dimana seorang pimpinan harus mendelegasikan otoritas manajen kepada seorang bawahan atau lebih sehingga menciptakan sebuah otoritas vertikal. Mengingat bahwa kini koordinasi menjadi lebih terspesialisasi, maka akan dilihat munculnya sebuah organisasi yang bersifat lebih kompleks (J. Winardi, 2003, h. 87). Jika lingkungan bertambah kompleks maka organisasi juga harus menjadi lebih kompleks agar mampu menghadapinya. Setiap elemen dari lingkungan perlu dihadapi oleh suatu bagian khusus dari suatu organisasi. Oleh karena itu organisasi yang berada pada lingkungan yang kompleks seharusnya memiliki lebih banyak bagian maupun jenis tugas (Lubis dan Huseini, 1987, h. 19).

Terkait dengan konsep struktur organisasi yang harus dapat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada, James Thomson menggambarkan organisasi sebagai suatu inti teknis pelaksanaan produksi yang dikelilingi oleh sejumlah bagian. Inti teknis merupakan bagian yang mengerjakan tugas utama organisasi. Inti teknis

ini dikelilingi oleh sejumlah bagian peredam yang bertugas untuk meredam ketidakpastian lingkungan.² Untuk setiap segmen lingkungan digunakan satu bagian peredam secara khusus. Bagian-bagian peredam ini misalnya adalah bagian penelitian dan pengembangan, keuangan, pembelian, pencairan sumber daya, dan lain-lain (Lubis dan Huseini, 1987, h. 32).

Sementara itu, pada saat organisasi harus berada pada lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian, maka organisasi tersebut akan mencoba membangun lebih banyak hubungan dengan organisasi lainnya. Hubungan yang lebih banyak memberikan perlindungan kepada suatu organisasi karena memberikan kesempatan untuk mencari laveransir bahan ataupun konsumen yang baru secara lebih mudah, jika hubungan dengan laveransir dan konsumen yang lama tidak lagi dapat dipertahankan (Paulson, 1974, h. 319-337).

Kondisi antara satu organisasi dengan organisasi lainnya mungkin akan berbeda tergantung kondisi lingkungannya. *Each organization has a unique external environment that has unique impact on organization, due to the fact that organization are located in different place and are involved in different business activities with different products, services, customers and so on* (Capon, 2000, p. 8).

2.1.6. Teknologi Organisasi

2.1.6.1. Ketahanan Jangka Panjang

Technology is combination of resources, knowledge and techniques that creates a product of service output for an organisation (Bailey, Schermerhorn, Hunt, & Osborn, 1991, p. 324). Agar organisasi dapat bertahan dalam waktu yang cukup panjang maka diperlukan penggantian teknologi-teknologi kuno (usang) secara periodik dengan teknologi-teknologi yang bertahan dalam suatu lingkungan yang berkembang. Secara typis, kehidupan teknologi-teknologi (kehidupan produk-produk, proses-proses, prinsip-prinsip, program-program, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur dan bahkan orang) akan mengalami fase-fase introduksi, fase

² Bagian peredam ini berusaha membuat kondisi inti teknis menjadi seperti sebuah sistem tertutup agar bisa berfungsi dengan cara yang paling efisien.

pertumbuhan, fase kedewasaan dan fase kemunduran. Artinya teknologi yang digunakan oleh suatu organisasi itu memiliki umur yang terbatas (J. Winardi, 2003, h. 178).

2.1.6.2. Teknologi Intensif

Menurut pendapat Thompson, organisasi adalah suatu sistem terbuka dan teknologi organisasi adalah cerminan dari kondisi lingkungan organisasi dan juga jenis kegiatan internal yang terjadi di dalam organisasi. Thompson mengelompokkan teknologi organisasi menjadi tiga jenis, yang masing-masing menggambarkan jenis hubungan yang terjadi dengan konsumen maupun jenis kegiatan internal yang terjadi dalam organisasi. Salah satu teknologi organisasi yang diperkenalkan oleh Thomson adalah Teknologi Intensif (*intensive technology*). Teknologi Intensif (*intensive technology*) merupakan kumpulan dari beberapa jenis pelayanan khusus, yang seluruhnya digabungkan untuk melayani klien. Teknologi intensif ini umumnya digunakan pada kegiatan yang mempunyai akibat cukup berarti pada klien, sehingga klien bisa mengalami perubahan. Contoh dari teknologi intensif adalah pelayanan pasien di rumah sakit, beberapa jenis pelayanan khusus seperti unit anastesi, kamar bedah, unit X ray, digunakan bersama sama untuk melayani seorang pasien (J. Winardi, 2003, h. 103).

Menarik diri dari tugas yang tidak dikuasai dengan baik tampaknya tidak merupakan tindakan bodoh bila mana bisa mengalihkan kepada rekan kerja yang lebih menguasai tugas itu (J. Hoogendorn, 1989, h. 31). Dalam kondisi tertentu penanganan anak berkebutuhan khusus perlu dilakukan secara bersama-sama atau secara team. *Team that are diverse in terms of members demography, experiences and cultures by contrast have a rich pool of information, talent and varied perspective that can help creativity* (Schermerhorn, Hunt, & Osborn, 1991, p. 195).

2.1.7. Perubahan Organisasi

Perubahan merupakan salah satu hal penting bila berbicara mengenai ketahanan organisasi. Perubahan yang tepat menyebabkan organisasi dapat

mempertahankan kelangsungan hidupnya di dalam lingkungan yang berubah. Namun sebaliknya, kesalahan perubahan yang dilakukan dapat menyebabkan suatu organisasi hancur karena tidak dapat mengikuti tuntutan dari lingkungannya. Garnerd dalam buku Teori Organisasi dan Pengorganisasian karangan J. Winardi menyatakan: *“renewal is not just innovation and change. It is also the process of bringing the results of change into the line with (the organization’s) purposes”* (J. Winardi 173). *Organizational change refer to planned or un planned transformation in organizational’s structure, technology and/or people* (Greenberd and A. Baron, 2003, p. 587).

Agar mampu mengikuti setiap perubahan maka organisasi itu harus cukup elastis. Organisasi elastis adalah suatu organisasi yang budaya organisasinya mudah mengikuti perubahan-perubahan internal dan eksternal. Budaya organisasi yang mudah menyesuaikan diri itu disebabkan oleh berkembangnya cara berfikir, norma-norma, nilai-nilai, sikap dan perilaku masyarakat organisasi tersebut (Sastrodipoera, 2006, h. 46). *Thus the ideal organization of the furure can be described as an intelegent organization, which means being capable of cointinuous renewal of anticipating change and of learning fast* (Sydanmaanlakka, 2002, p. 166). Dalam melakukan proses adaptasinya, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh organisasi dapat mencapai tiga bentuk, dimana ketiga bentuk perubahan itu memiliki pengaruh dan peranan yang sama pentingnya sehingga agar dapat memberikan hasil yang optimal maka harus terjadi pembauran dari ketiganya tersebut (J. Winardi, 2003, h. 175).

- a) Perubahan-perubahan teknologi yang meliputi produk-produk baru serta proses-proses baru,
- b) Perubahan structural yang meliputi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan prosedur baru dan,
- c) Perubahan manusia yang mencakup teknik-teknik promosi baru atau personil baru.

2.1.7.1. Perubahan Yang Direncanakan

Stephen Robbins merumuskan perubahan yang direncanakan (*planned change*), sebagai aktivitas-aktivitas perubahan yang bersifat internasional dan yang berorientasi pada tujuan” (J. Winardi, 2003, h. 237). Terdapat dua macam tujuan dari perubahan yang direncanakan tersebut, yaitu ;

- a) Mengupayakan untuk memperbaiki kemampuan organisasi yang ada untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan dan,
- b) Diupayakan untuk mengubah perilaku karyawan (anggota organisasi).

2.1.7.2. Tipe Perubahan Keorganisasian

Baru-baru ini telah dikembangkan sebuah tipologi instruktif perubahan keorganisasian oleh David A. Nadler dan Michael L. Tushman. Mereka membuat model kerangka perubahan dimana perubahan yang terjadi diidentifikasi berdasarkan dua sumbu utama yaitu sebab dan tujuan serta mekanisme perubahan yang dilakukan. Berdasarkan sebab dan tujuannya mereka mengelompokkan sebuah perubahan menjadi perubahan antisipatif dan perubahan reaktif.³ Berdasarkan mekanisme perubahannya mereka mengelompokkan perubahan menjadi perubahan inkremental dan perubahan strategis⁴. Dalam model Nadler-Tushman tentang perubahan keorganisasian terdapat empat macam tipe, yakni:⁵ Perbaikan terus-menerus (*tuning*), Adaptasi (*adaptation*), Reorientasi (*reorientation*), Rekreasi (*recreation*) (J. Winardi, 2003, h. 198).

³ Perubahan antisipatoris yaitu perubahan yang direncanakan secara sistematis, dan yang bertujuan untuk memanfaatkan situasi yang diekspektasi. Perubahan reaktif yaitu perubahan yang harus terjadi karena kejadian-kejadian atau tekanan-tekanan di dalam lingkungan yang tidak diekspektasi terjadi.

⁴ Perubahan inkremental adalah perubahan mencakup penyesuaian-penyesuaian subsistem yang diperlukan guna memungkinkan organisasi bersangkutan tetap pada jalur yang dipilih. Perubahan strategis mengubah bentuk umum atau arah organisasi yang bersangkutan.

⁵ Perubahan terus menerus merupakan tipe perubahan yang paling beresiko kecil, sering disebut dengan istilah pemeliharaan. Adaptasi mencakup perubahan-perubahan inkremental. Reorientasi adalah tipe perubahan yang bersifat antisipatoris dan skope strategis dinamakan reorientasi karena organisasi yang bersangkutan secara signifikan berubah. Rekreasi merupakan perubahan yang bersifat intend an penuh resiko.

2.1.8. Penyesuaian Pada Proses Belajar Mengajar Di Sekolah Inklusif

Sebagaimana disampaikan oleh Sapon-Shevin bahwa pendidikan/sekolah inklusif sebagai sistem pendidikan yang mensyaratkan agar semua anak cacat dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler, bersama-sama teman seusianya maka sekolah perlu melakukan beberapa penyesuaian sedemikian rupa sehingga dapat menjadi tempat yang mendukung pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi setiap anak, termasuk dalam hal ini adalah anak cacat. Salah satu penyesuaian yang perlu dilakukan oleh sekolah adalah terkait dengan proses belajar mengajar di sekolah (Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Inklusi, Direktorat Pembinaan SLB, 2003).

Selama ini siswa yang ada di sekolah umumnya memiliki kemampuan dan kompetensi serta karakteristik yang dapat dikatakan homogen sebagaimana pada umumnya. Lantas bagaimana jika sekolah tersebut harus menangani siswa dengan karakteristik yang lebih heterogen, baik dalam hal kecerdasannya, kondisi fisik, bahkan mungkin kondisi mentalnya. Siswa berkebutuhan khusus dengan segala keterbatasannya tentu tidak sepenuhnya dapat mengikuti proses belajar mengajar yang selama ini berjalan dan diperuntukkan untuk anak normal pada umumnya. Adapun salah satu tujuan dari suatu sistem pendidikan yang baik adalah harus menyediakan bagi semua orang yang ingin belajar peluang untuk menggunakan sumber-sumber daya yang ada pada suatu ketika dalam kehidupan mereka (Illich, 2000, h. 99).

Walaupun diketahui bahwa kelas sebenarnya heterogen, guru menganggap dan memperlakukan anak-anak seakan-akan kelas itu homogen. Oleh sebab itu banyak kegagalan dan frustrasi yang dialami oleh anak-anak. Bagaimana pengaruhnya adalah pada rasa enggan belajar, benci terhadap pelajaran, merasa terpaksa, rasa rendah diri dan berbagai efek negatif lainnya (Nasution, 2000, h. 2). Berkenaan dengan hal tersebut, seyogyanya sekolah dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga sekolah tersebut menjadi tempat yang ramah dan nyaman bagi anak berkebutuhan khusus untuk berada didalamnya. Bila kita menginginkan agar seseorang mau belajar terus sepanjang hidupnya maka pelajaran di sekolah harus

merupakan pengalaman yang menyenangkan bagi muridnya (Nasution, 2000, h. 37). *Student have different needs, interest, motivations and moods. Theya have developed different communication skills. Some seek attention by overachieving, others by underachieving, some by speaking up, others by keeping silent* (J. Buckley, 2000, h. 32).

Prosedurnya, pendidikan inklusif tidak hanya membawa anak cacat berada dalam kelas reguler setiap harinya, tetapi juga mendapat kurikulum dan pembelajaran yang fleksible, lingkungan sekolah yang ramah dan mudah diadaptasi oleh semua anak, adanya guru yang ramah, adanya pusat sumber, serta terjalinnya kemitraan yang baik antara sekolah, guru, pemerintah instansi terkait, orang tua dan masyarakat (Salman, 2008, h. 16). Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak tertentu terhadap sistem pengajaran, sehingga pengajaran beralih pendekatannya dari cara lama ke cara baru. Beberapa perubahan terkait dengan prinsip belajar mengajar adalah pengajaran hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan individual. Terkait dengan aspek perkembangan peserta didik, guru seyogyanya berupaya mencegah timbulnya frustrasi pada diri peserta didik, dengan cara menyesuaikan bahan pelajaran dengan minat individu dan mengurangi kemungkinan terjadinya persaingan dan pertentangan (Hamalik, 1999, h. 11).

Pada dasarnya sekolah memerlukan transformasi dari perubahan watak institusional dari lembaga pendidikan yang bersifat *subject matter-oriented* ke lembaga pendidikan yang bersifat *student-oriented* (Buchori, 1995, h. 158). Individu merupakan satu kesatuan yang berbeda satu dengan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal, yang disebabkan oleh faktor keturunan dan/atau pengaruh lingkungannya. Perbedaan itu meliputi aspek-aspek kecerdasan, bakat, jasmani, sosial, emosional, pengaruh keluarga dan prestasi belajar. Upaya pembelajaran untuk melayani perbedaan individu itu dalam bentuk menyediakan program khusus bagi anak yang tergolong cerdas, pengajaran individual, penyelenggaraan kelas khusus, kelas remedial, bagi anak lamban, pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan,

pembentukan kelompok informal, pelajaran pilihan, deferensiasi tugas dan sistem tutorial (Hamalik, 1999, h. 102).

Pengajar harus memperhatikan minat, bakat dan kebutuhan pelajar ketimbang sibuk dengan target-target untuk menyelesaikan kurikulum yang sebageaian mungkin tidak relevan dengan minat, bakat dan kebutuhan pelajar setempat (Harefa, 2001, h. 68). Dalam kondisi tertentu, kebutuhan pendidikan bagi anak cacat memang memiliki kecenderungan perorangan. Mereka membutuhkan perhatian lebih sehingga apa yang disampaikan oleh guru dapat lebih dipahami oleh mereka. Banyak siswa cacat membutuhkan pelatihan khusus dan perhatian secara perorangan karena itu suatu program pengajaran mungkin membutuhkan perombakan besar-besaran sebelum dapat diberikan secara tepat kepada siswa cacat. Pakar khusus yang mampu bekerja dengan penyandang disabilitas haruslah merupakan bagian dari tim perencanaan pengajaran (E. Kemp, 1994, h. 66). Sementara itu, sebagai seorang professional, seorang pendidik akan dapat menggali, membina, mengarahkan dan mengembangkan bakat dan potensi anak didik, sehingga dapat bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat (Nata, 2003, h. 234).

Khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ini sekolah reguler atau sekolah biasa diharapkan dapat melakukan pembaharuan dalam hal pembelajaran. Terdapat dua aspek perubahan yang penting dalam rangka gerakan pembaharuan pendidikan. Pertama pembaharuan dalam pendekatan pembelajaran yang menyangkut esensi, materi dan metode pembelajaran. Aspek perubahan yang pertama ini terjadi karena pengaruh berbagai temuan/teori/konsep baru yang berkembang mengenai otak dan kecerdasan serta di picu oleh dinamika perubahan multidimensional dari lingkungan hidup dan kehidupan yang menuntut komitmen dan kemampuan yang lebih tinggi dari sumber daya manusia. Aspek perubahan yang kedua adalah pembaruan terkait pemanfaatan teknologi informasi/komunikasi yang sudah berkembang sedemikian canggih untuk menunjang tercapainya pembaruan strategi dan teknik pembelajaran (S. Hood dan Hardi, 2008, h. 155).

Menurut teori *multiple intelegences*, anak belajar melalui berbagai macam cara. Anak mungkin belajar melalui kata-kata, melalui angka-angka, melalui gambar, warna, nada-nada suara, melalui interaksi dengan orang lain, melalui diri sendiri, melalui alat dan mungkin melalui perenungan tentang hakikat sesuatu. Meskipun demikian, anak pada umumnya belajar melalui kombinasi dari beberapa cara. Setiap anak juga memiliki cara untuk menjadi cerdas. Anak menempuh cara yang paling sesuai untuk dirinya, yang mungkin sekali berbeda dengan anak lain. Setiap anak adalah unik dan memiliki kecenderungan cara belajar yang tidak selalu sama (Musfiroh, 2008, h. 23). Adapun esensi dari teori *Multiple Intellegences* menurut Gardner dalam Amstrong, adalah menghargai keunikan setiap orang, berbagai variasi belajar, mewujudkan sejumlah model untuk menilai mereka dan cara yang hampir tak terbatas untuk mengaktualisasikan diri di dunia ini (Musfiroh, 2008, h. 38). Selanjutnya, menurut Gardner bahwa setiap orang sebenarnya mempunyai kapasitas untuk mengembangkan kecerdasan-kecerdasannya hingga tingkat tertinggi, asalkan memperoleh dukungan, pengayaan dan pembelajaran yang tetap atau pas (Musfiroh, 2008, h. 39).

Terkait dengan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif, sekolah dapat membuat Program Pembelajaran Individual (PPI) yang mempertimbangkan prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik. PPI umumnya dikembangkan oleh guru PLK yang bertugas di sekolah biasa. Isi dari PPI tentu menuntut kelengkapan fasilitas dan pengorganisasian yang tidak sederhana. Kegunaan PPI adalah menjamin bahwa setiap anak kesulitan belajar memiliki suatu program yang diindividualkan untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan kelas yang dimiliki mereka dan untuk mengkomunikasikan program tersebut kepada orang-orang yang berkepentingan dalam bentuk program tertulis. Program semacam ini diharapkan dapat membantu para guru untuk mengadaptasi program umum dan atau program khusus bagi anak berkesulitan belajar yang bertolak dari kekuatan, kelemahan dan minat anak (Abdurahman, 2003, h. 56). Sementara itu, hubungan antara pembelajaran dengan hasil atau prestasi siswa bukan hanya bersifat garis lurus, tapi bisa bercabang dari faktor-faktor lain, misalnya

faktor siswa, guru dan sarana belajar siswa (Arikunto, Safrudin, & Jabar, 2004, h. 2).

Di samping itu peranan orang tua di sekolah pada prinsipnya juga diperlukan. *They (parent) are a part of what goes on in school or an extension of it. Without them a school like this (effective school) could never achieve its purpose-to teach kids how to learn. We do not have the resource to do it alone. That's why effective school have to create a link between home and school* (Borich, 1995, p. 36).

2.1. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian *National Centre on Educational Restructuring and Inclusion* (NCERI) berhasil mengidentifikasi tujuh faktor implementasi pendidikan inklusi yaitu (MaryAnn and Byrnes, 2002, p. 201):

- a) Kepemimpinan visioner kepala sekolah dan penilik sekolah
- b) Kolaborasi antara lembaga pendidikan dengan pihak-pihak terkait yaitu konsultan pendidikan, psikolog, ahli evaluasi, ahli orthopedagogi
- c) Penggunaan penilaian yang terfokus yaitu pendekatan otentik untuk melihat kebutuhan dan kekuatan siswa
- d) Dukungan dari staff
- e) Dukungan untuk siswa. Diperlukan alat bantu untuk melayani siswa, misalnya modifikasi kurikulum, strategi pembelajaran khusus, kriteria penilaian, prosedur, teknologi dan peran para professional dan personil pendukung lainnya.
- f) Pendanaan. Perlu dukungan dana yang relative lebih mahal untuk penyelenggaraan program inklusif.
- g) Keterlibatan orang tua. Sekolah harus menggunakan pendekatan yang kreatif untuk membuat orang tua menjadi bagian dari komunitas sekolah.

Hasil penelitian lainnya menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD X di Propinsi Lampung dapat berjalan maksimal, jika dilakukan hal-hal sebagai berikut (Herpatiwi, 2007, p. xxxiii):

Pertama, masukan;

- a) Dilakukan penilaian (*assessment*) oleh pengelola sekolah, khususnya guru sehingga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan khusus siswa.
- b) Ada guru khusus, sehingga pembelajaran efektif
- c) Disusun program pembelajaran individual
- d) Ada program penyesuaian/modifikasi kurikulum
- e) Ada sarana dan prasarana bagi siswa berkebutuhan khusus
- f) Ada dana yang mencukupi/biaya operasional kelas inklusif.

Kedua, proses:

- a) Kegiatan belajar dan pembelajaran memperhatikan kemampuan awal dan perbedaan individual siswa
- b) Pengelolaan ruang kelas siswa sesuai karakteristik individu
- c) Bentuk dan ukuran meja dan kursi sesuai dengan kebutuhan khusus siswa
- d) Program remedial diberikan secara intensif
- e) Ditingkatkan kualitas dalam membina hubungan antar pribadi
- f) Evaluasi dilaksanakan secara adil terutama evaluasi formatif.

Ketiga, produk:

Perkembangan akademik, sosial dan psikologis siswa berkebutuhan khusus akan lebih baik jika guru mau dan mampu melakukan inovasi pembelajaran dan didukung oleh pengelola pendidikan, orang siswa berkebutuhan khusus dan pihak terkait.

2.3. Keterkaitan Konsep

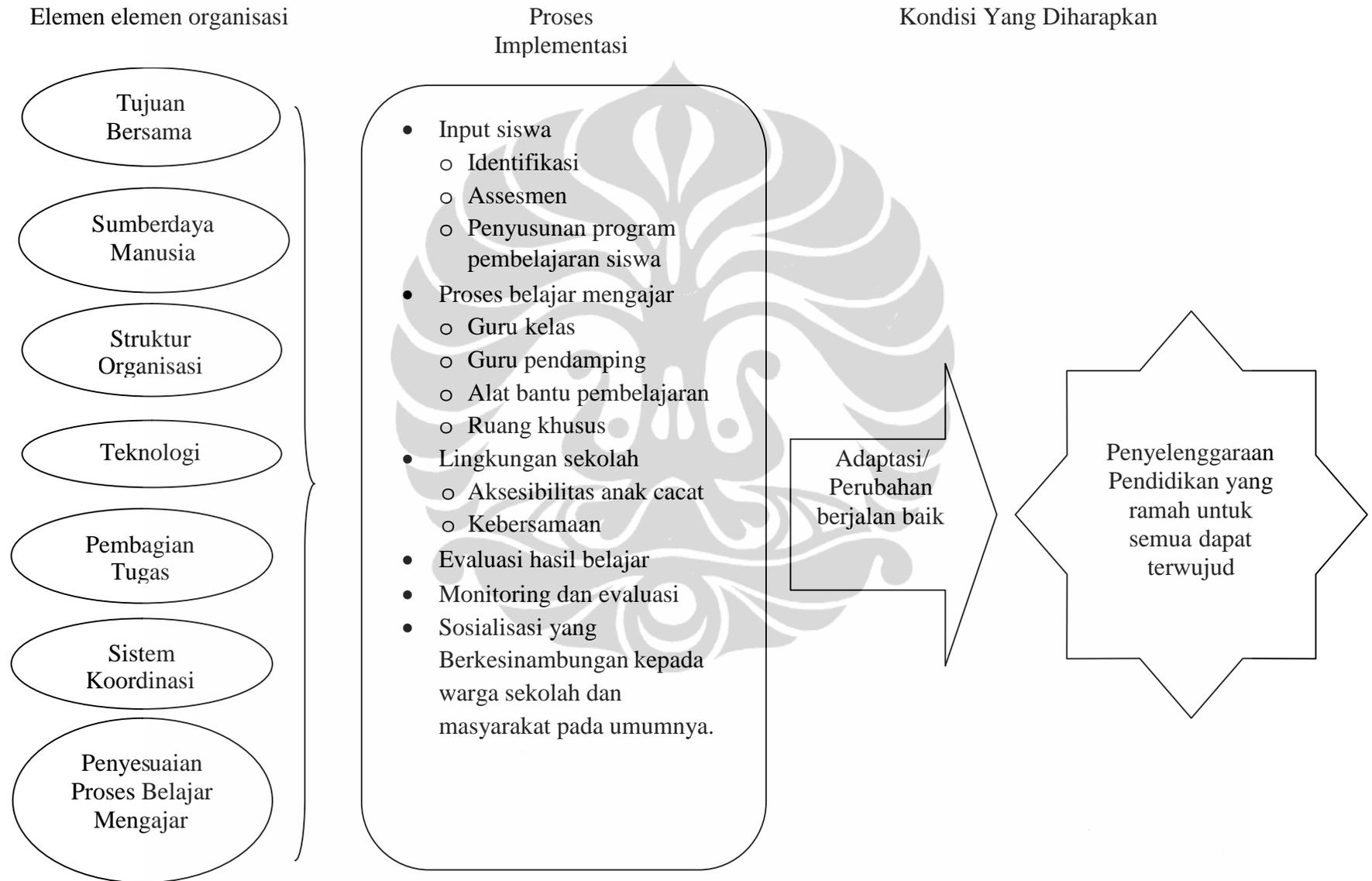
Selama ini sekolah reguler telah berjalan dengan standar yang jelas yang terus berkembang baik dalam kurikulum, sarana, prasarana, infrastruktur, sistem manajemen pengelolaan, proses belajar mengajar dan lain-lain. Konsentrasi mereka selama ini adalah pada anak-anak normal. Sekolah reguler yang semula didesain untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak normal pada perkembangannya harus mengikut tuntutan lingkungan dan menjadi sekolah yang selain menangani anak-anak normal, juga harus menangani pendidikan bagi anak-anak cacat.

Sekolah memiliki ciri-ciri atau karakteristik serta elemen-elemen yang lengkap sebagai suatu organisasi. Dengan sasaran memberikan layanan pendidikan yang baik dan layan kepada anak-anak normal, tentu seluruh elemen-elemen atau sumber daya yang ada di sekolah tersebut telah memiliki spesialisasi tugasnya masing-masing. Di samping itu mereka telah memiliki sistem pembagian tugas maupun sistem koordinasi yang baik, sehingga proses belajar mengajar tersebut dapat berjalan dengan cukup baik.

Tidak berhenti di situ, sebagai organisasi modern, seyogyanya sekolah juga dapat beradaptasi menjawab tuntutan yang muncul dari lingkungannya. Lantas bagaimana kondisi elemen-elemen organisasi setelah sekolah tersebut juga melayani pendidikan bagi anak cacat. Diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap elemen-elemen organisasi yang ada tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah dalam hal pengorganisasian sumber daya yang dimiliki oleh sekolah tersebut harus tetap berpegang erat pada kaidah-kaidan pengorganisasian yang baik.

Siswa normal tentu juga memiliki hak untuk mendapat pendidikan yang berkualitas di sekolah tersebut, walaupun sekolah tersebut juga akan menangani pendidikan untuk anak cacat. Jangan sampai keputusan menjadi sekolah yang inklusif akan membuat sekolah menurun kualitas karena tidak lagi fokus dalam memberikan pelayanan pendidikan. Untuk itu sekolah harus dipersiapkan sedemikian rupa, secara bertahap sehingga mampu menjadi sekolah inklusif yang baik. Keberhasilan penyelenggaraan sekolah inklusif tentu tidak lepas kaitannya dengan kesiapan sekolah tersebut sebagai organisasi dalam menjawab tantangan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan atau kondisi lingkungan yang ada.

Bagan 2.1 Operasional Konsep



Sumber : Bagan diolah oleh penulis dari Schein, Reece, Fayol, Abdurahman, Shapon-Shevin, E Kemp.

2.4. Operasionalisasi Konsep

Penetapan tujuan merupakan langkah awal kebijakan dalam pelaksanaan program inklusif di sekolah reguler. Penetapan tujuan tersebut pada prinsipnya harus dilakukan secara sadar dan disepakati oleh seluruh pihak yang berkompeten didalamnya. Hal yang juga menarik untuk dikaji adalah berkenaan dengan persepsi dan cara pandang kepala sekolah serta guru-guru terkait keberadaan anak cacat di sekolah mereka. Di samping itu perlu juga digali mengenai latar belakang kepala sekolah, guru dan tenaga ahli lainnya yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia yang ada serta bagaimana pengorganisasian mereka.

Lantas bagaimana dengan struktur organisasi, mekanisme kerja dan koordinasi diantara mereka? Bagaimana pandangan masyarakat dan siswa normal akan keberadaan anak cacat di sekolah mereka? Mengapa sekolah reguler cenderung konservatif, kurang “adaptif” dan belum secara optimal dapat mengakomodir perubahan lingkungan dewasa ini yang menuntut adanya inklusifitas dalam dunia pendidikan.

Bagaimana kondisi faktor-faktor organisasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah yang diteliti? Banyak pertanyaan yang dapat digali untuk mengetahui bagaimana tantangan dan kesempatan yang mungkin ditemukan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah reguler tersebut. Dengan demikian dapat diperoleh gambaran tentang bagaimana kondisi faktor-faktor atau elemen-elemen organisasi seperti tujuan bersama, sumber daya manusia, struktur organisasi, teknologi, pembagian tugas dan sistem koordinasi yang ada pada SDN 02 Lebak Bulus, SDN 06 Lebak Bulus dan SDN 24 Kramat Jati, terutama dalam kaitannya penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berkenaan dengan hal tersebut, maka bila faktor-faktor atau elemen-elemen organisasi sebagaimana tersebut di atas dapat tersedia atau berfungsi dengan baik, serta didukung dengan penyesuaian pada proses pembelajaran maka diharapkan dapat menunjang proses implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif mulai dari proses penerimaan siswa (input

siswa), proses belajar mengajar dan evaluasi hasil belajar yang dapat mengakomodir berbagai kebutuhan anak, lingkungan sekolah yang ramah untuk semua, sampai dengan proses monitoring pelaksanaan kegiatan yang berkesinambungan. (Tabel 2.1).



Tabel 2.1 . Operasional Konsep

No	Konsep	Indikator	Sumber data	
			Primer	Sekunder
1.	Tujuan Bersama	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan sekolah untuk melaksanakan program pendidikan inklusif di sekolah reguler (menerima anak cacat). 	Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah reguler. • Pedoman penyelenggaraan pendidikan . • Visi dan misi sekolah
2.	Sumberdaya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Sikap kepala sekolah • Sikap guru kelas • Ketersediaan guru khusus/guru kunjung/pendamping bagi siswa dengan diabilitas. • Ketersediaan tenaga ahli/profesional (dokter, psikolog, dll) • Kesesuaian latar belakang pendidikan/pengalaman • Sikap siswa cacat berada di lingkungan siswa normal • Sikap siswa normal terhadap siswa dengan diabilitas • Sikap orang tua dan masyarakat terhadap 	Wawancara	

		keberadaan siswa cacat..		
3.	Struktur Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian skema organisasi • Penyesuaian struktur organisasi yang diperlukan terkait dengan implementasi pendidikan inklusif. • Penempatan individu 	Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> • Bagan struktur organisasi
4.	Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya mekanisme identifikasi dan assesmen siswa cacat. • Adanya mekanisme perencanaan dan proses pembelajaran yang sesuai • Adanya mekanisme evaluasi belajar yang sesuai • Ketersediaan alat bantu pembelajaran bagi siswa cacat • Ketersediaan sarana dan prasarana belajar yang aksesable bagi siswa cacat. • Ketersediaan infrastruktur yang aksesible bagi siswa cacat • Ketersediaan ruang khusus sekolah inklusif 	Wawancara/pe ngamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme kerja penanganan anak cacat.
5.	Pembagian Tugas	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pembagian tugas dan tanggungjawab antar bagian yang terkait • Adanya tupoksi masing- 	Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> • Tupoksi masing-masing bagian

		<p>masing bagian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profesionalisme pelaksanaan tugas masing-masing bagian 		
6.	Sistem Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya (Sistem hubungan) 	Wawancara	
7.	Penyesuaian Proses Belajar Mengajar	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Program Pembelajaran Individual (PPI) yang sesuai • Ketersediaan GPK yang memadai. • Adanya penyesuaian proses penilaian yang sesuai. 	Wawancara	

Sumber : diolah oleh penulis dari Schein, Reece, Fayol, Abdurahman, Shapon-Shevin, E Kemp.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Positivist social science is an organized method for combining deductive logic with precise empirical observations of individual behavior in order to discover and confirm a set of probabilistic causal laws that can be used to predict general patterns of human activity (Neuman, 2006, p. 82). Pendekatan ini adalah untuk mengungkapkan kebenaran realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan (Salim, 2001, h. 39). Dalam penelitian positivism, informasi kebenaran itu dinyatakan peneliti kepada individu yang dijadikan responden penelitian. Untuk mencapai kebenaran ini, maka seorang pencari kebenaran (peneliti) harus menanyakan langsung kepada objek yang diteliti, dan objek dapat memberikan jawaban langsung kepada peneliti bersangkutan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu saat tertentu. Keunggulan metode deskriptif antara lain meliputi: melukiskan keadaan suatu objek pada suatu saat tertentu, mengidentifikasi data yang menunjukkan gejala-gejala dari suatu peristiwa, menemukan data yang menunjukkan appearance dari suatu realitas dan mengumpulkan data yang dapat menunjukkan realisasi suatu gagasan/ide atau peraturan.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah :

a) Studi Dokumentasi:

Metode ini bertujuan untuk memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis yang masih relevan dengan pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah reguler misalnya jumlah dan jenis kecacatan dari siswa cacat yang ada, data ketersediaan sarana dan prasarana yang aksesable bagi anak cacat, struktur

organisasi sekolah sebagai sekolah inklusif, latar belakang pendidikan kepala sekolah dan guru, dan lain-lain.

b) Observasi:

Observasi lapangan akan dilakukan dalam hal ini adalah untuk mengetahui bagaimana tersedianya dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai bagi anak cacat di sekolah inklusif serta bagaimana penerimaan warga sekolah dan masyarakat, proses penanganan, proses belajar mengajar, khususnya terkait dengan penanganan siswa cacat.

c) Wawancara Mendalam:

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer, pertanyaan untuk wawancara ini akan dituangkan pada kuisioner wawancara walaupun dimungkinkan pengembangan penggalian informasi lebih lanjut di lapangan. Informasi yang diperoleh dari para pelaku langsung di lapangan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mencakup berbagai aspek dan sudut pandang.

3.3. Informan

Informan yang akan diwawancarai terdiri dari berbagai komponen yang dirasa cukup relevan dan mempunyai pengaruh cukup besar dengan keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif di suatu sekolah reguler. Proses wawancara akan berpedoman pada panduan yang akan dibuat sebelumnya. Informan tersebut antara lain :

a). Kepala Sekolah

Kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi dalam organisasi sekolah tersebut, yang menetapkan kebijakan suatu sekolah menjadi sekolah yang inklusif. Peranan kepala sekolah dianggap sangat besar akan keberhasilan pelaksanaan sekolah inklusif.

b) Guru kelas dan Guru Pendamping

Guru kelas dan Guru Pendamping merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Tentunya dalam proses belajar mengajar ini keberadaan siswa cacat tidak boleh menjadi penghambat bagi guru kelas memberikan materi pembelajaran kepada siswa. Artinya dalam melakukan

pekerjaannya guru kelas harus tetap fokus memberikan pelayanan tanpa terganggu hal-hal teknis lainnya. Harus ada pihak-pihak lain yang menangani/memenuhi kebutuhan siswa cacat sehingga proses belajar mengajar khususnya bagi siswa cacat tetap fokus dan berjalan lancar.

c) Siswa Normal

Hal ini erat kaitannya dengan pandangan siswa normal ketika mereka harus belajar dengan siswa cacat yang memiliki karakteristik sedikit berbeda. Disamping itu peneliti juga akan menggali kesediaan siswa tersebut untuk membantu temannya bila diperlukan.

d) Siswa cacat

Siswa cacat merupakan objek utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah reguler tersebut. Mereka harus merasa nyaman berada di lingkungan yang berbeda, untuk itu salah satu pertanyaan yang akan peneliti ajukan adalah apakah mereka merasa lingkungan sekolah ini adalah lingkungan yang ramah bagi mereka.

e) Masyarakat (disesuaikan dengan kondisi di lapangan)

Dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah reguler sangatlah memberikan pengaruh positif. Selain memberikan dukungan moral, diharapkan masyarakat sekitar sekolah dapat memberikan dukungan yang lebih real lagi sehingga seluruh pihak yang ada akan lebih termotivasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua.

f) Orang tua siswa normal dan orang tua siswa cacat

Orang tua yang akan dijadikan informan adalah orang tua dari siswa normal dan juga orang tua dari siswa cacat yang bersekolah di sana. Dari sana peneliti diharapkan dapat memperoleh masukan dari kedua belah pihak secara objektif dari sudut pandang yang mungkin berbeda.

g) Mitra kerja sekolah inklusif (disesuaikan dengan kondisi di lapangan)

Begitu banyak mitra kerja terkait dengan penyelenggaraan inklusif ini, seperti tenaga medis, psikolog, asosiasi/profesi, kelompok kerja dan lain-lain. Kemungkinan di lapangan belum ditemukan kondisi ideal sebagaimana dituangkan dalam beberapa pedoman yang pernah ada. Namun potret yang ada di lapangan tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaksana

maupun pengambil kebijakan untuk meningkatkan pelaksanaan pendidikan inklusif di kemudian hari.

- h) Pemerintah pusat/pemerintah daerah terkait (d disesuaikan dengan kondisi di lapangan)

Wawancara kepada pemerintah diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pemerintah daerah terkait implementasi pendidikan inklusif di sekolah reguler.

3.4. Proses Analisis Data

Berkenaan dengan langkah tersebut maka secara garis besar analisis data penelitian kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini melalui tahapan sebagai berikut (Irawan, 2007, h. 74) :

- a) Pengumpulan data mentah
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data mentah, misalnya melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka.
- b) Transkrip data
Merubah catatan ke dalam bentuk tertulis. Tulisan yang dibuat harus apa adanya tidak dicampur aduk dengan pendapat dan pikiran penulis.
- c) Pembuatan koding
Membaca kembali tulisan transkrip data untuk menemukan hal penting yang perlu dicatat untuk proses berikutnya. Dari hal penting tersebut kemudian diambil kata kunci.
- d) Kategorisasi Data
Menyederhanakan data dengan cara mngikat konsep-konsep (kata-kata) kunci.
- e) Penyimpulan Sementara
Langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan sementara berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi penulis. Pendapat pribadi penulis akan dituangkan dalam *observer's comments* (OC).

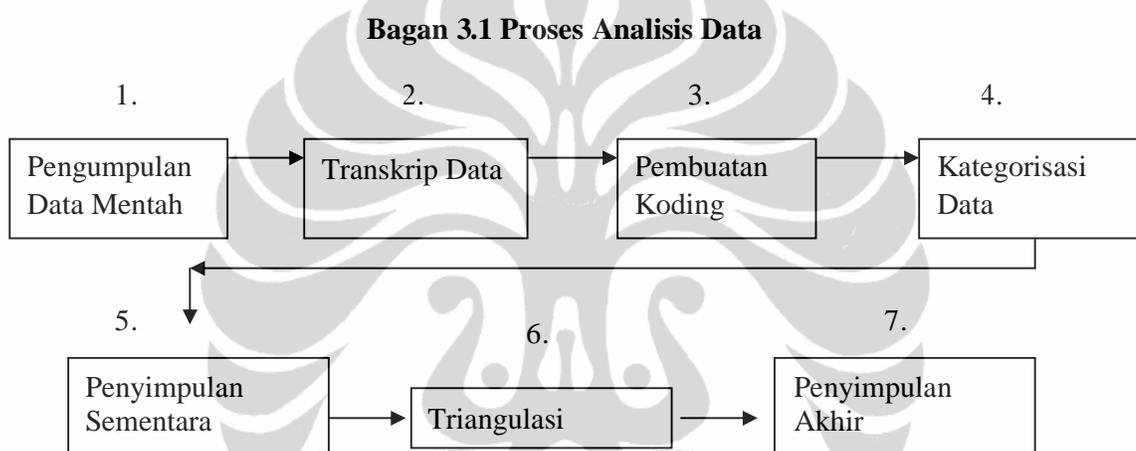
f) Triangulasi

Dari penyimpulan (sementara) penulis akan melakukan check dan recheck antara satu sumber dengan sumber lainnya.

g) Penyimpulan Akhir

Penyimpulan akhir akan diambil bila dirasa data sudah jenuh (*saturated*) dan penambahan data baru hanya berarti ketumpang tindihan (*redundant*).

Secara garis besar proses penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :



Sumber bagan : Prasetya Irawan, h. 73

3.5. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan di wilayah DKI Jakarta, yaitu pada sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif. Penelitian akan dilakukan pada bulan Nopember 2009 – Juni 2010. Pemilihan lokasi penelitian di propinsi DKI Jakarta, karena propinsi DKI Jakarta termasuk salah satu propinsi yang cukup lama dan termasuk perintis dalam menyelenggarakan program pendidikan inklusif di sekolah reguler. Ironinya adalah, walaupun propinsi DKI Jakarta merupakan salah satu propinsi yang melakukan rintisan tersebut, namun berdasarkan data yang ada, siswa inklusif yang ada sebagian besar adalah dari kategori anak lambat belajar, sedangkan siswa dengan jenis kecacatan lainnya seperti tunanetra, tunarungu dan lain-lain jumlahnya masih relatif terbatas.

3.6. Keterbatasan Penelitian

Fokus penelitian ini hanya terbatas pada faktor-faktor organisasi yang mempengaruhi angka partisipasi anak cacat pada sekolah dasar yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di SDN 02 Lebak Bulus, SDN 06 Lebak Bulus dan SDN 24 Kramat Jati.



BAB 4

PELAKSANAAN PENDIDIKAN SEKOLAH INKLUSIF DI PROPINSI DKI JAKARTA

4.1. Kebijakan Pengembangan Pendidikan Inklusif Di Propinsi DKI Jakarta

Rintisan awal pelaksanaan pendidikan inklusif di propinsi DKI Jakarta di mulai sejak tahun 2003. Pada waktu itu pemerintah daerah DKI Jakarta mendapat bantuan dari Helen Keller Internasional (HKI) sebagai salah satu lembaga yang menjadi pelopor pengembangan pendidikan inklusif di Indonesia. Dasar hukum pelaksanaan pendidikan inklusif di propinsi DKI semakin kuat setelah dikeluarkannya Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No.116 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. Pada bab III pasal 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusidi setiap Kecamatan sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) TK/RA, SD/MI, dan satu SMP/MTS dan disetiap Kota sekurang-kurangnya 3 (tiga) SMU/SMK/MA/MAK.¹ Pemerintah daerah propinsi DKI Jakarta memahami pentingnya demokratisasi dan pemerataan akses pendidikan bagi semua peserta didik bagaimanapun kondisinya, hal ini tentunya sejalan dengan tuntutan nilai-nilai kemanusiaan khususnya terkait dengan hak asasi setiap individu untuk memperoleh pendidikan. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana disebutkan dalam peraturan gubernur tersebut di atas, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta menetapkan tujuan dari penyelenggaraan pendidikan inklusif ini adalah sebagai berikut ;

- a) Meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan untuk menuju masyarakat yang demokratis;
- b) Memberikan pendidikan yang sesuai dengan nilai kemanusiaan;

¹ Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus dan mengakomodasi kebutuhan khusus anak pada umumnya di satuan pendidikan TK/RA dan sekolah/madrasah.

- c) Memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.²

Dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini berarti sekolah-sekolah reguler yang berada di propinsi DKI Jakarta seyogyanya dapat menerima peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak-anak normal lainnya. Umumnya sekolah-sekolah inklusif yang ada di propinsi DKI Jakarta ini lebih mudah menerima anak berkebutuhan khusus yang masih memiliki IQ normal atau di atas rata-rata. Penerimaan anak berkebutuhan khusus dengan karakteristi IQ di bawah normal atau bahkan mengalami retardasi mental sangat tergantung pada kesiapan khusus dari masing-masing sekolah. Masa-masa awal setelah diterbitkannya peraturan gubernur tersebut, di propinsi DKI Jakarta terdapat 41 sekolah inklusif, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Saat ini jumlah sekolah inklusif yang ada di propinsi DKI Jakarta untuk tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) berjumlah 4 sekolah, untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) berjumlah 657 sekolah, pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 89 sekolah, dan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 62 sekolah serta sebanyak 16 sekolah merupakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).³

Agar sekolah reguler siap memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan bermutu, apapun kondisi anak berkebutuhan khusus yang akan dilayani, maka sekolah reguler harus melakukan penyesuaian. Kesiapan sekolah tersebut pada dasarnya menyangkut pada sumber daya manusia yang memadai (tersedianya guru pembimbing khusus yang memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus), sarana dan prasarana yang aksesible bagi anak berkebutuhan khusus serta program pembinaan yang dikembangkan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus tersebut.

² Peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi dan fisik. Peserta didik berkebutuhan khusus meliputi ; a. Siswa dengan gangguan penglihatan, b. Siswa dengan gangguan pendengaran, c. Siswa dengan gangguan wicara, d. Siswa dengan gangguan fisik, e. Siswa dengan kesulitan belajar, f. Siswa dengan gangguan lambat belajar, g. Siswa dengan gangguan pemusatan pemikiran, h. Siswa cerdas istimewa, i. Siswa bakat istimewa dan j. Siswa yang memiliki kebutuhan khusus secara sosial.

³ Data Sekolah Inklusif Tahun 2008 dari Direktorat Pembinaan SLB.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif tentu bukanlah hal yang mudah dan dapat menjadi tantangan tersendiri bagi pimpinan sekolah/madrasah. Hal ini cukup dapat dimaklumi karena pada umumnya pimpinan sekolah/madrasah dan guru-guru yang ada belum atau tidak memiliki latar belakang pendidikan ataupun pengalaman yang mencukupi terkait dengan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Berkenaan dengan hal tersebut maka, dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, pimpinan sekolah/madrasah dapat bekerja sama dengan komite sekolah, dewan pendidikan, pusat sumber, universitas dan lembaga terkait lain baik pemerintah maupun swasta serta forum komunikasi pemerhati pendidikan inklusif.

Terkait dengan pembelajaran, kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah inklusif adalah kurikulum yang berlaku pada umumnya, namun bila diperlukan dapat dilakukan penyesuaian agar dapat lebih sesuai dengan kondisi maupun kebutuhan khusus masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus. Demikian juga halnya dalam proses belajar mengajar, dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan individual dan kebutuhan khusus peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat berkembang sesuai kemampuannya. Dalam hal ini proses belajar mengajar merupakan tanggungjawab guru kelas dan guru mata pelajaran. Guru kelas maupun guru mata pelajaran ini akan dibantu oleh guru pembimbing khusus (GPK) terutama terkait dengan pelaksanaan pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus.⁴ Dalam hal tidak tersedia GPK pada sekolah/madrasah tersebut maka pemerintah daerah akan memfasilitasinya dengan meminta bantuan pada sekolah luar biasa (SLB) atau pusat sumber.⁵

⁴ Guru Pembimbing Khusus (GPK) adalah guru yang bertugas mendampingi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik.

⁵ Pusat sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusif yang berasal dari SLB atau lembaga lain atau pendukung pendidikan inklusif. Pusat sumber merupakan komponen atau bagian yang memberi dukungan bagi anak berkebutuhan khusus dan yang menjadi pusat pengembangan pengembangan pendidikan inklusif. Pusat sumber ini diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi bagaimana mendapatkan alat-alat pembelajaran dan pengajaran yang sesuai, buku-buku braille, memberikan masukan dan rekomendasi bagaimana penyediaan tenaga pengajar yang terlatih untuk mendukung dan membimbing anak berkebutuhan khusus. Dari pusat sumber inilah dirancang program-program pelatihan dan pembinaan guru baik guru kelas maupun guru khusus, program pembelajaran dan pembinaan bakat siswa berkebutuhan khusus dan termasuk juga program kemitraan dengan pihak-pihak lainnya yang berkompeten.

Pada prinsipnya keberadaan GPK ini di sekolah inklusif sangat diperlukan, sehingga dalam permendiknas tentang pendidikan inklusif menerangkan bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan minimal satu GPK pada satu satuan pendidikan yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif dan untuk sekolah yang tidak mendapat penunjukan, dan akan menyelenggarakan pendidikan inklusif wajib menyediakan sendiri minimal satu GPK. Sementara itu, lokasi penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di samping belajar bersama dengan peserta didik lainnya dalam satu kelas yang sama, bila diperlukan dapat juga dilaksanakan pada ruang khusus. Kondisi memang diperlukan, karena tingkat kebutuhan khusus peserta didik terkadang berbeda-beda pada suatu waktu atau tingkatan tertentu. Misalnya siswa berkebutuhan khusus belum atau tidak mengalami kesulitan yang berarti ketika mengikuti mata pelajaran yang bersifat menghafal, tapi karena keterbatasan yang dimiliki kemungkinan mereka akan menemui sedikit kesulitan saat pelajaran matematika. Pada saat seperti itu anak berkebutuhan khusus dapat ditarik ke ruang khusus untuk menerima pelajaran tersebut dengan menggunakan alat bantu dan metode-metode yang telah disesuaikan.

Perihal kurikulum dan proses pembelajaran sebagaimana yang digariskan dalam peraturan gubernur tersebut di atas, semakin didukung lagi setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (permendiknas) No. 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, terutama sebagaimana dijelaskan pada pasal 7, pasal 8 dan pasal 9. Dalam permendiknas tersebut menyatakan bahwa kurikulum yang digunakan pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai bakat minat dan kemampuannya. Sementara itu, dalam hal pembelajaran pada pendidikan inklusif harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik. Dalam hal ini guru kelas dibantu dengan tenaga yang berkompeten menyusun program pengajaran individual (PPI).⁶ Dalam hal

⁶PPI atau program pengajaran individual merupakan program pengajaran dimana siswa dapat mengerjakan dengan tepat tugas-tugas dalam waktu yang cukup dan kondisi yang

penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif juga mengacu dan disesuaikan pada jenis kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.

Beberapa sekolah inklusif menampung anak berkebutuhan khusus yang masih memiliki kecerdasan normal dan atau bahkan di atas rata-rata, namun demikian terkadang ditemui pada suatu sekolah inklusif terdapat anak berkebutuhan khusus yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Tingkat kecerdasan tersebut berpengaruh pada kurikulum yang dikembangkan. Permendiknas menyatakan bahwa peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar pendidikan, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh sekolah dan akan memperoleh surat tanda tamat belajar yang dibuat dan dikeluarkan oleh masing-masing sekolah bersangkutan. Berdasarkan Surat tanda tamat belajar tersebut, siswa dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus. Peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional. Dari penjelasan tersebut cukup jelas menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat mengikuti kurikulum sesuai standar nasional pendidikan tidak diwajibkan untuk mengikuti ujian nasional dan boleh mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh sekolah dan tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. Berikut disampaikan kondisi dan jumlah siswa berkebutuhan khusus dan siswa normal yang terdapat di masing-masing sekolah yang diteliti (tabel 4.1)

termotivasi. Program ini disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan siswa sehingga memungkinkan siswa belajar secara optimal dan menguasai tingkat materi tertentu yang telah ditetapkan. Penyusunan program dilakukan sebelum siswa mendapat pelayanan khusus pada seting pendidikan tertentu. PPI dapat menjamin akuntabilitas dimana guru yang bertanggungjawab memberikan instruksi memiliki harapan dan target kurikulum yang jelas yang harus dipenuhi dan dimonitor.

Tabel 4.1 Tabel Kondisi/Jumlah Siswa ABK (Siswa Cacat/Siswa Berkebutuhan Khusus) Tahun 2009/2010

No	Nama Sekolah	Jenis Kecacatan (siswa ABK)	Keadaan Siswa												Jumlah Siswa		Luas Tanah		
			Kelas I		Kelas II		Kelas III		Kelas IV		Kelas V		Kelas VI		Normal	ABK	Tanah	Bangunan	
			Normal	ABK	Normal	ABK	Normal	ABK	Normal	ABK	Normal	ABK	Normal	ABK					
1	SDN 02 Lebak Bulus JI Pertanian Raya No 59 Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, 12440 Tahun Berdiri : 1974	A		-		-		1		-		1		-	2			2.176 m2	1.250 m2
			56		56		86		88		84		86		456				
2	SDN 06 Lebak Bulus JI Gunung Balong RT/RW: 007/04 Kec. Cilandak Jakarta Selatan 12440 NIS: 100340 NSB: 101016307025 Akreditasi: B Tahun Berdiri : 1975	Q				-				-				1		1			
		H		2		1		2		1				1		7			
			37		40		67		36		38		34		252		2.925 m2	599 m2	
3	SDN 24 Kramat Jati JI Kerja Bhakti RT/RW: 003/09 Kec. Kramat Jati Jakarta Timur 13510 NSS: 10101645148 NSB: 1015520010403024 Akreditasi: A Tahun Berdiri : 1982	B				1										1			
		C		1												1			
		G					1									1			
		H		5		4		7		5		10		5		36			
			44		47		49		30		23		20		213		3.500 m2	1.500 m2	

Keterangan:

ABK = Siswa ABK = Siswa Cacat (berkebutuhan khusus)

A = Tunanetra

B = Tunarungu

C = Tunagrahita

G = Tunaganda

H = Kesulitan/Lambat Belajar

Q = Autis

Sumber tabel : Data SIM Dit PSLb, Data Sekolah Dit TK/SD

4.2. Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Di SDN 02 Lebak Bulus, SDN 06 Lebak Bulus dan SDN 24 Kramat Jati

4.2.1. SDN 02 Lebak Bulus Jakarta Selatan

SDN 02 Lebak Bulus Pagi, beralamat di Jl. Pertanian Raya No. 59, Lebak Bulus Cilandak. Sekolah ini mulai melaksanakan pendidikan inklusif sejak tahun 1999, setelah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Propinsi sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Lokasi sekolah ini berdekatan dengan SLB A Lebak Bulus. Kemitraan dengan SLB menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN 02 Lebak Bulus. Saat ini sekolah tersebut memiliki 12 (dua belas) ABK, yang terdiri dari 2 (dua) anak tuna netra dan 10 (sepuluh) anak dengan keterlambatan belajar. Saat ini kepala sekolah SDN 02 Lebak Bulus dijabat oleh Bapak Alex Djumadi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Alex, sekolah inklusif adalah sekolah reguler yang didalamnya terdapat siswa yang berkebutuhan khusus atau membutuhkan pelayanan khusus (wawancara dengan penulis, 2 Pebruari 2010).

Sekolah memandang belum perlu untuk melakukan perubahan dari visi dan misi yang sudah ada sejak dulu karena visi dan misi yang ada masih cukup relevan untuk memayungi penyelenggaraan inklusif di sekolah tersebut.

VISI

“ Unggul Dalam prestasi Berdasarkan Iman dan Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berjiwa Inovatif Kreatif dan Kompetitif ”

MISI

- a) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- b) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh siswa
- c) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut juga budaya bangsa sehingga arif dalam bertindak.
- d) Menetapkan manajemen partisipatif.

4.2.1.1. Bidang Kesiswaan

Bapak Alex menambahkan, penetapan SDN 02 Lebak Bulus menjadi sekolah inklusif juga harus disosialisasikan kepada warga sekolah lainnya, karena dengan penetapan tersebut berarti sekolah tidak lagi hanya menangani pembelajaran untuk anak-anak normal, tetapi juga anak berkebutuhan khusus. Dukungan dari seluruh warga sekolah sangat diperlukan untuk keberhasilan pendidikan inklusif tersebut. Sekolah inklusif harus menjadi tujuan bersama yang dipahami dan dapat diterima oleh seluruh warga sekolah. SDN 02 Lebak Bulus telah menyediakan quota khusus bagi ABK. Berdasarkan informasi yang kami terima dari kepala sekolah, setiap tahun sekolah menyediakan satu bangku untuk anak berkebutuhan khusus pada tiap-tiap kelas. Satu kelas rata-rata terisi oleh 28 siswa.

Seperti umumnya sekolah inklusif yang lain, dalam proses penerimaan siswa baru SDN 02 Lebak Bulus ini juga melakukan proses identifikasi dan asesmen terhadap kondisi anak berkebutuhan khusus. Dalam proses identifikasi dan asesmen tersebut, pihak sekolah memberdayakan guru-guru yang ada dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang dibuat oleh Dinas Pendidikan terkait. Namun demikian untuk proses identifikasi dan asesmen yang bersifat lebih spesifik dan memerlukan keahlian khusus, pihak sekolah akan melakukan kemitraan dengan pihak-pihak yang berkompeten, dalam hal ini misalnya saat melakukan analisa kecerdasan dan emosional siswa, sekolah melakukan kerja sama dengan fakultas psikologi, Universitas Indonesia. Hasil identifikasi dan asesmen tersebut dijadikan salah satu dasar dalam proses pembinaan, evaluasi, dan pemantauan perkembangan siswa berkebutuhan khusus. Berkenaan dengan hal tersebut, sekolah menyimpan sebagai data bases hasil identifikasi dimaksud. Komponen-komponen yang menjadi fokus dalam proses identifikasi itu antara lain terkait dengan dengan identitas dan latar belakang siswa, IQ, kondisi emosional, kondisi fisik, kondisi mental, bakat dan kemampuan siswa, kelemahan dan kebutuhan alat bantu pembelajaran, pedoman pengajaran individual (PPI) dan data prestasi siswa.

Tanggapan dari orang tua siswa normal maupun siswa berkebutuhan khusus terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif ini cukup positif. Diakui oleh ibu Tinessi salah satu orang tua dari anak berkebutuhan khusus, pada awalnya pandangan

masyarakat kurang mendukung, namun saat ini sudah banyak dari mereka yang bisa memahami keberadaan anak berkebutuhan khusus dan mulai mendukung program pendidikan inklusif di sekolah ini. Masyarakat, khususnya orang tua dari siswa normal tidak keberatan jika sekolah ini menerima anak berkebutuhan khusus. Mereka sudah bisa memahami bahwa keberadaan anak berkebutuhan khusus diantara siswa normal lainnya dapat meningkatkan dan menumbuhkembangkan rasa kebersamaan diantara sesama siswa termasuk pada diri anak-anak mereka. Hal ini sesuai seperti yang disampaikan oleh Ibu Tinessi yang menyatakan bahwa pendidikan inklusif sangat diperlukan karena melalui pendidikan yang inklusif diharapkan masing-masing anak dapat terbiasa untuk memahami perbedaan yang ada sekaligus menjadi salah satu wahana untuk belajar bersosialisasi dengan banyak orang dengan berbagai kondisi dan latar belakang. Ibu Tinessi mempunyai alasan tersendiri mengapa ia lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah inklusif dibanding di SLB yaitu dikarenakan beliau ingin sedini mungkin membangun rasa kemandirian dan keberanian bersosialisasi di masyarakat pada diri anaknya karena cepat atau lambat anaknya juga harus bergaul dan berkarya di tengah-tengah masyarakat.

Suffa Almirah Barkah, adalah siswa dengan kebutuhan khusus *low vision* (dengan cacat mata). Ia mengaku senang bersekolah di SDN 02 Lebak Bulus karena teman-teman yang ada sangat baik dan tidak segan untuk bermain dan belajar bersamanya. Suffa merasa tidak banyak mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru karena adanya alat bantu bisa ia gunakan seperti, komputer yang dapat mengeluarkan suara, balok-balok atau alat peraga untuk pelajaran matematika dan alat peraga IPA. Dalam mengerjakan soal-soal ulangan yang diberikan oleh guru misalnya pada pelajaran matematika, Suffa mengaku sedikit mengalami kesulitan bila soal yang diberikan itu menggunakan gambar-gambar. Apa yang disampaikan oleh Suffa ini dibenarkan oleh Gerald Driksly Posumen salah seorang siswa normal menyatakan terkadang anak berkebutuhan khusus menghadapi kesulitan bila menerima pelajaran yang berbentuk gambar-gambar. Gerald mengaku tidak merasa terganggu dengan keberadaan anak berkebutuhan khusus, mereka cukup

memahami kondisi yang ada dan bersedia belajar, bermain bersama dan siap membantu bila anak berkebutuhan khusus tersebut memerlukan bantuan.

4.2.1.2. Bidang Pendidikan Dan Pengajaran

Bapak Alex mengatakan bahwa SDN 02 Lebak Bulus ini merupakan SD Negeri biasa yang program-programnya sama dengan SD Reguler lainnya. Secara umum program-program penyelenggaraan pendidikan untuk anak reguler menurut kepala sekolah masih dapat diterapkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang ada saat ini. Termasuk dalam menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) yang harus dicapai, pada siswa berkebutuhan khusus, secara umum masih mengacu pada SDKD untuk siswa reguler pada umumnya, kecuali untuk kondisi tertentu yang memang tidak bisa tercapai karena keterbatasan yang dialami oleh siswa berkebutuhan khusus, maka akan diambil kebijakan penyesuaian. Kepala sekolah menambahkan, terkait dengan pengembangan siswa, ABK tidak saja diarahkan untuk mengikuti pelajaran bidang akademik, tetapi juga bakat dan kemampuan lain bidang non akademik.

Dalam hal teknis pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus ini sekolah sangat terbantu dengan keberadaan GPK, terlebih lagi belum adanya pelatihan khusus bagi guru-guru yang ada perihal pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Namun demikian jumlah keberadaan GPK tersebut tidak bisa berada setiap hari di sekolah tersebut mengingat GPK yang sama juga mempunyai tugas yang serupa di tempat yang berbeda. Bila jumlah dan jenis anak berkebutuhan khusus bertambah dan tersebar pada kelas-kelas yang berbeda, tentu diperlukan GPK dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Dalam keterbatasan waktu yang ada tersebut GPK membuat jadwal rencana pertemuan dengan guru kelas maupun kepala sekolah untuk selalu berkoordinasi perihal pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pertemuan rutin dijadwalkan sekali dalam seminggu namun demikian bila diperlukan dapat dilakukan pertemuan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan (misalnya pada saat ulangan, ujian kenaikan kelas, dan lain-lain). GPK di SDN 02 Lebak Bulus dipandang sebagai orang yang paling memahami karakteristik anak berkebutuhan khusus karena GPK tersebut

memang berpengalaman serta memiliki latar belakang pendidikan khusus. Ditambah lagi GPK ini juga telah beberapa kali mengikuti pelatihan khusus untuk memberikan layanan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.

Karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah dalam pelaksanaan pendidikan inklusif tersebut SDN 02 Lebak Bulus tidak melakukan perubahan kurikulum dan masih menggunakan kurikulum untuk anak reguler lainnya. Hanya saja untuk mengakomodir kebutuhan khusus beberapa anak berkebutuhan khusus yang ada perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada beberapa bagian. Penyesuaian tersebut merupakan rekomendasi dari GPK berdasarkan analisa kurikulum yang digunakan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi anak berkebutuhan khusus yang ada di sana.

Di samping melakukan analisa kurikulum, GPK juga terlibat secara aktif dalam penyusunan rencana pengembangan program pendidikan inklusif terutama pada saat penyusunan program khusus bagi anak tunanetra yang ada di sekolah tersebut yaitu berkenaan dengan penyiapan bahan ajar, penyediaan alat bantu, orientasi, mobilitas braille serta pengadaan buku-buku braille. Khusus terkait dengan penyediaan buku-buku braille, GPK akan berkoordinasi dengan guru kelas untuk mendiskusikan buku-buku apa yang akan menjadi bahan pelajaran di kelas untuk beberapa waktu ke depan, selanjutnya GPK akan memfasilitasi ketersediaan buku bahan pelajaran tersebut dalam huruf braille. Proses menjadikan bahan pelajaran tersebut ke dalam bentuk braille menggunakan alat yang ada di pusat sumber yang ada di SLB A Lebak Bulus. GPK diharapkan dapat menjembatani antara kondisi fisik, emosional dan psikologis siswa berkebutuhan khusus dengan kebutuhan mekanisme pembelajaran yang sesuai bagi siswa berkebutuhan khusus.

Dalam kondisi tertentu, dengan melihat kondisi siswa berkebutuhan khusus yang beraneka ragam, maka program pengajaran individual (PPI) memang diperlukan agar siswa dapat dengan lebih mudah menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Penyusunan PPI ini harus melibatkan beberapa pihak terkait memang memiliki kontribusi dalam pemberian layanan pendidikan kepada siswa berkebutuhan khusus. Mereka yang terlibat dalam penyusunan PPI ini antara lain guru kelas, guru bidang

studi, GPK dan juga orang tua murid. Sementara guru kelas dan guru bidang studi memberikan materi pembelajaran yang akan disampaikan secara umum, GPK mempunyai peranan pada penentuan teknik pendekatan dan metodologi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik anak berkebutuhan khusus.

Berkenaan dengan adanya siswa berkebutuhan khusus, maka SDN 02 Lebak Bulus juga melakukan penyesuaian pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). RPP yang mengakomodir kebutuhan siswa berkebutuhan khusus disusun oleh GPK bersama dengan guru kelas, guru mata pelajaran dan juga melibatkan pengawas TK/SD. RPP tersebut biasanya memuat tentang waktu belajar siswa (terkadang anak berkebutuhan khusus memerlukan tambahan waktu untuk dapat menerima dan mencerna pelajaran dengan baik), mekanisme belajar, (dalam hal ini terkait dengan penyesuaian manajemen kelas), tempat belajar (tempat duduk siswa diletakkan di depan yang terdekat dengan guru sehingga siswa dapat lebih jelas mendengar apa yang disampaikan oleh guru di kelas), sumber belajar, alat bantu pembelajaran yang diperlukan (misalnya buku-buku *braille*, peta *braille*, alat peraga, dan lain-lain). Dalam RPP tersebut juga dirancang bila, dalam kondisi tertentu diperlukan, GPK dapat berada di dalam kelas untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru kelas terutama bila anak berkebutuhan khusus tersebut mengalami kesulitan dalam memahami suatu konsep misalnya untuk pengenalan simbol *braille* yang relatif baru diketahui oleh anak.

Untuk memfasilitasi keterbatasan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus agar mereka dapat mengikuti materi pembelajaran yang baik, maka anak berkebutuhan khusus tersebut harus difasilitasi dengan alat bantu atau sarana dan prasarana penunjang yang sesuai. Misalnya untuk anak tunanetra yang ada di sekolah tersebut, mereka harus difasilitasi dengan buku-buku *braille*, peta *braille*, alat peraga dan lain-lain. Walaupun sudah memiliki beberapa alat bantu yang diperlukan, tapi secara umum sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini belum sepenuhnya aksesable bagi ABK. Misalnya kamar mandi dan WC yang ada masih untuk anak-anak normal, belum dirancang atau disesuaikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Seperti yang disampaikan oleh Suffa, dia masih sedikit mengalami kesulitan ketika akan

menggunakan KM/WC karena lokasinya relatif jauh dari kelas, dan belum ada fasilitas aksesibilitas jalan yang membantu (tanda bantu) anak tunanetra menuju tempat yang dituju tersebut.

Demikian halnya dengan fasilitas lainnya yang ada di sekolah seperti perpustakaan dan laboratorium belum sepenuhnya ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Salah satu prasarana penting yang juga perlu ada di sekolah inklusif adalah ruang pusat sumber dan atau ruang khusus siswa inklusif.

Mengacu pada perencanaan dan proses belajar mengajar yang dilaksanakan, kepala sekolah menyatakan bahwa soal ulangan harian, soal ujian kenaikan kelas ataupun soal ujian akhir untuk siswa berkebutuhan khusus dapat disamakan dengan siswa normal lainnya. Hanya saja dalam kondisi tertentu anak berkebutuhan khusus yang ada di sana harus dibantu dengan alat bantu pembelajaran atau mungkin penambahan waktu.

4.2.1.3. Bidang Kerjasama

Sebagaimana tertuang pada peraturan gubernur tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusif seorang pimpinan sekolah dapat melakukan kemitraan dengan pihak-pihak terkait seperti komite sekolah, dewan pendidikan, universitas, pusat sumber dan lembaga lainnya. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ini, kerjasama yang masih terus berjalan secara berkesinambungan adalah dengan SLB A Lebak Bulus, terutama terkait dengan penyediaan GPK dan penggunaan beberapa sarana dan fasilitas yang ada di SLB A Lebak Bulus tersebut. Kebutuhan akan beberapa alat bantu pembelajaran diperoleh dari SLB A Lebak Bulus tersebut, termasuk dalam penyediaan buku-buku braille, peta braille dan lain-lain.

Menurut kepala sekolah, karena keterbatasan dana yang ada, hingga saat ini dalam menangani ABK mereka belum dapat secara berkesinambungan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak seperti tenaga psikolog, tenaga medis atau dokter, atau tenaga lain yang sebenarnya memang diperlukan. Hal ini yang menjadikan tugas GPK pada pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN 02 Lebak Bulus menjadi cukup berat

ditambah lagi sekolah belum atau tidak dapat memberikan secara khusus honor yang memadai bagi tenaga-tenaga yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah tersebut.

Kepala sekolah menyatakan bahwa kompetensi SDM yang sesuai dalam menangani anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut memang relatif masih kurang, untuk itu sekolah telah membuat usulan kepada pihak-pihak terkait, berkenaan dengan kebutuhan SDM yang memadai untuk pengembangan sekolah inklusif tersebut, sekolah telah mengusulkan kepada Dinas dan Departemen Pendidikan Nasional untuk dapat membantu penyediaan tenaga khusus/narasumber atau konsultan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam kegiatan belajar mengajar ataupun untuk dapat menugaskan guru pembimbing khusus.

4.2.2. SDN 06 Lebak Bulus Jakarta Selatan.

SDN 06 Lebak Bulus, beralamat di Jl. Gunung Balung, Lebak Bulus Cilandak, Jakarta Selatan. Sekolah ini melaksanakan pendidikan inklusif sejak tahun 2004. Adapun penetapan sekolah ini menjadi sekolah inklusif adalah berdasarkan penunjukan yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.

Kepala sekolah SDN 06 Lebak Bulus saat ini adalah Ibu Tumiyem, S.Pd, beliau berpandangan bahwa melalui pendidikan inklusif ABK dapat dibimbing ke arah normal, sekolah inklusif merupakan tempat bersosialisasi bagi ABK agar mereka dapat mandiri dan diterima di masyarakat. Beliau menambahkan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan pendidikan inklusif perlu dilakukan kepada seluruh warga sekolah karena pelaksanaan pendidikan inklusif hanya akan berjalan dengan lancar bila mendapat dukungan dari seluruh pihak terkait. Menurut beliau sekolahnya selalu berupaya melayani ABK agar setara dengan siswa normal untuk itu dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, sekolah ini mempunyai visi dan misi sesuai dengan prinsip pendidikan untuk semua (wawancara dengan penulis, 4 Pebruari 2010).

Keberadaa GPK sangat penting di sekolah inklusif. GPK diperlukan untuk membantu siswa berkebutuhan khusus agar lebih mudah mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Berkenaan dengan hal tersebut, sebaiknya GPK menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dari sekolah dan masuk dalam struktur organisasi sekolah.

Tanggapan dari orang tua siswa umumnya positif. Ibu Asni, orang tua dari Dimas, dari salah satu anak autis yang menjadi siswa di sekolah tersebut sangat bersyukur karena anaknya dapat diterima dengan baik di sekolah tersebut. Alasan mengapa ibu Asni lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah inklusif dibanding di SLB adalah bahwa pada prinsipnya anaknya yang mengalami autis adalah sama dengan anak normal, hanya saja anak autis mengalami keterbatasan dalam hal komunikasi, dimana komunikasi yang dilakukan bersifat lebih sederhana. Sementara itu, Ibu Siti Mariam yang merupakan orang tua dari siswa normal juga merasa keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut tidak mengganggu, beliau percaya bahwa sekolah ini mampu untuk memberikan layanan pendidikan yang baik untuk siswa normal maupun siswa berkebutuhan khusus.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif harus didukung dan merupakan sinergi dari seluruh pihak terkait. Koordinasi antara beberapa komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah perlu dilakukan sehingga kondisi dan perkembangan pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN 06 Lebak Bulus dapat diketahui. Kepala sekolah selalu menyelenggarakan pertemuan internal secara periodik antara orang tua ABK, GPK dan guru kelas. Melalui pertemuan periodik ini diharapkan kepala sekolah dapat mengetahui perkembangan maupun hambatan dari pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah tersebut sehingga dapat diambil kebijakan, langkah dan tindak lanjut yang sesuai sedini dan seakurat mungkin.

4.2.2.1. Bidang Kesiswaan

Dalam proses penerimaan anak berkebutuhan khusus yang akan masuk, kepala sekolah selalu berkoordinasi secara internal dengan guru-guru dan GPK yang ada, bila disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki belum mampu dan siap untuk menangani anak berkebutuhan khusus tersebut dengan sangat terpaksa sekolah akan menolaknya dengan pertimbangan demi kebaikan anak itu sendiri. Saat ini, SDN 06 Lebak Bulus, menangani 7 (tujuh) anak kesulitan belajar termasuk hiperaktif dan 1

(satu) anak autis. Rafif Dewantara, seorang siswa dengan kesulitan belajar pemahaman mengaku senang bersekolah di SDN 06 Lebak Bulus karena teman-teman bersikap baik, bersedia untuk belajar maupun bermain bersama serta tidak berkeberatan untuk membantunya bila ia memerlukannya.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh GPK, untuk pelajaran matematika Rafif memang perlu dibantu diarahkan. Dalam hal ini biasanya Rafif dibantu dengan menggunakan gambar-gambar sehingga dia lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru ataupun soal yang diberikan saat ulangan dan ujian. Halim, salah seorang siswa normal menambahkan bahwa keberadaan anak berkebutuhan khusus tidak mengganggu dirinya dan ia membenarkan bahwa dalam mengerjakan soal-soal ulangan atau ujian anak berkebutuhan khusus terkadang harus dibimbing untuk memahami soal-soal yang dimaksud.

Sebagai salah satu langkah untuk mengoptimalkan pelayanan pendidikan inklusif sekolah akan melakukan identifikasi dan assesmen bagi anak berkebutuhan khusus yang akan masuk ke sekolah tersebut. Adapun komponen-komponen yang diidentifikasi antara lain terkait dengan identitas siswa, IQ siswa, kondisi emosional, kondisi fisik, kondisi mental, bakat dan kemampuan, kelemahan/hambatan yang dihadapi, rencana pembelajaran siswa dan data prestasi siswa. Sekolah mensyaratkan bahwa setiap ABK yang masuk ke sekolah tersebut memiliki hasil test IQ dan surat keterangan psikolog atau pihak terkait lainnya. Dalam melakukan test IQ ini memang sebaiknya melibatkan pihak-pihak yang memang berkompeten dalam melakukan pengujian tersebut, agar hasil yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun secara moral.

Dalam kondisi tertentu dimungkinkan bahwa pembelajaran dan penanganan bagi anak berkebutuhan khusus yang diberikan oleh sekolah belum mencukupi. Beberapa orang tua dari siswa berkebutuhan khusus, berinisiatif untuk membawa anaknya kepada tenaga terapis yang dapat mendukung perkembangan bagi si anak. Sebagai contoh misalnya seperti apa yang lakukan oleh Ibu Asni, orang tua dari siswa berkebutuhan khusus yang bernama Tirto Ananda Laksono (Dimas). Dimas adalah siswa kelas II dan merupakan seorang anak autis. Dimas terdeteksi mengalami

kesulitan bicara sejak usia dua tahun, melihat perkembangan anaknya yang berbeda dengan anak normal lainnya, tanpa menunda lagi Ibu Asni membawa anaknya ke lembaga Dwi Gantari yang menyediakan jasa terapis bagi anak-anak autis. Saat mulai memasuki usia sekolah, oleh lembaga Dwi Gantari, pembinaan kepada Dimas diarahkan untuk persiapan masuk sekolah. Salah satu fokus pembinaan untuk persiapan masuk sekolah tersebut adalah berkenaan dengan kemampuan kognitif anak. Pihak Dwi Gantari ini pula yang mengeluarkan surat pengantar yang berisi keterangan tentang kondisi dan karakteristik anak. Berdasarkan surat pengantar ini kepala sekolah mempertimbangkan dan memutuskan untuk menerima Dimas bersekolah di sana.

4.2.2.2. Bidang Pendidikan Dan Pengajaran

Sampai dengan saat ini, dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif sekolah ini juga masih berpedoman dan menggunakan kurikulum yang sama, yang membedakan dalam hal ini adalah pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus. Sekolah mengupayakan semaksimal mungkin ABK bisa berkembang seperti anak normal oleh karena itu dalam pengembangan program inklusif ini sekolah tidak membuat pengembangan program secara terpisah. Pengembangan program pendidikan baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dibuat menyatu antara siswa normal maupun siswa berkebutuhan khusus.

Adapun SKKD yang dikembangkan di SDN 06 Lebak Bulus ini pada prinsipnya berlaku umum bagi ABK maupun siswa reguler. Namun demikian, dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik anak berkebutuhan khusus, tentu dalam beberapa standar dan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa perlu diberikan kelonggaran dan penyesuaian. Dalam penyesuaian dari SKKD yang ada, kepala sekolah melibatkan guru kelas dan GPK. Guru kelas dipandang sebagai pihak yang memahami rancangan umum program-program pembelajaran di kelas sehingga siswa dapat mencapai SKKD yang diharapkan, sedangkan GPK dipandang sebagai unsur yang paling mendalami dan memahami kondisi ABK sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi penyesuaian pencapaian SKKD bagi anak-anak berkebutuhan khusus tersebut.

Dalam rangka optimalisasi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, dan terkait dengan keterbatasan sumber daya yang ada, sementara ini sekolah mengambil kebijakan bahwa dalam satu kelas diupayakan tidak ada anak berkebutuhan khusus dengan jenis kecacatan yang berbeda karena hal ini akan terkait dengan program pengajaran individual (PPI) yang dibuat. GPK diberikan kewenangan untuk membuat PPI bagi ABK di mana selanjutnya PPI tersebut dikoordinasikan dengan kepala sekolah dan guru-guru terkait. PPI dibuat untuk memfasilitasi kondisi dan karakteristik anak berkebutuhan khusus dengan program pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru kelas. Melalui PPI inilah mekanisme, metodologi dan teknik-teknik pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus direncanakan sehingga pada akhirnya anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti dan tidak tertinggal pada materi pembelajaran tertentu.

Secara umum materi pembelajaran yang diberikan bagi ABK sama dengan materi yang diberikan bagi siswa reguler lainnya, hanya saja dalam kondisi tertentu memang untuk ABK perlu dilakukan penyesuaian. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) di buat oleh guru kelas dan berlaku untuk semua baik untuk anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. RPP yang disusun secara umum mencakup waktu belajar, mekanisme belajar, tempat belajar sumber belajar dan media pembelajaran. Secara umum mekanisme belajar mengajar di kelas berjalan seperti biasa, namun dalam kondisi tertentu terkadang perlu dilakukan modifikasi atau penyesuaian dalam proses pembelajaran tersebut agar penyampaian materi kepada siswa berkebutuhan khusus dapat berjalan dengan baik. Bentuk-bentuk penyesuaian dapat berupa penyesuaian pada cara penyampaian materi, penyederhanaan bahasa agar menjadi lebih mudah dipahami, mengatur posisi tempat duduk siswa berkebutuhan khusus sedemikian rupa agar lebih dekat kepada guru dan mudah untuk diamati, termasuk juga penggunaan alat peraga ataupun alat bantu bila diperlukan. Layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah ini tidak terbatas kepada bidang akademik, sekolah juga menyediakan program pengembangan bakat siswa berkebutuhan khusus. Dijelaskan oleh kepala sekolah di sekolah itu terdapat anak autis yang memiliki bakat bermain marawis.

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, saat pelajaran matematika kelas VI, selain guru kelas yang menyampaikan materi pembelajaran secara umum di depan kelas, di dalam kelas tersebut terdapat GPK yang fokus memberikan bimbingan, bantuan ataupun penjelasan tambahan kepada siswa berkebutuhan khusus sehingga mereka pada akhirnya tidak jauh tertinggal untuk materi yang disampaikan pada hari itu. Contoh lain yang juga berdasarkan hasil pengamatan adalah, setelah jam pelajaran usai, Dimas mendapat pendalaman materi untuk mata pelajaran matematika oleh GPK di ruang kepala sekolah. Pada kesempatan tersebut secara personal GPK memberikan penjelasan-penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan terkadang berulang-ulang sehingga Dimas dapat menangkap dan memahami maksud dari materi yang disampaikan tersebut.

Dengan mengacu pada perencanaan dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan, kepala sekolah berpandangan soal ulangan, soal ujian kenaikan kelas maupun ujian akhir untuk siswa berkebutuhan khusus dapat diberlakukan sama seperti siswa reguler lainnya. Namun demikian, dengan mempertimbangkan kondisi anak berkebutuhan khusus, kepala sekolah mengambil kebijakan untuk menurunkan standar kelulusan siswa dengan harapan standar nilai yang ditetapkan tersebut dapat dicapai oleh beberapa siswa berkebutuhan khusus yang ada. Walaupun menurunkan standar kelulusan, namun pihak sekolah tetap memacu siswa reguler pada umumnya untuk tetap semaksimal mungkin mencapai nilai atau prestasi yang setinggi-tingginya.

Dalam proses pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus tersebut memang diperlukan pembagian tugas dan kerja sama yang baik antara guru kelas dan GPK sehingga masing-masing pihak dapat tetap fokus dan memberikan layanan yang optimal. Saat ini sekolah tersebut hanya memiliki satu orang GPK, tentu jumlah ini dipandang belum memadai, karena satu orang GPK ini harus membagi waktu untuk membina 7 anak autis yang ada di sekolah tersebut. Beruntung, GPK tersebut memang hanya bertugas secara rutin di SDN 06 Lebak Bulus, sehingga setiap hari memang berada di sekolah sehingga dapat fokus memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, GPK telah memiliki jadwal pendampingan di dalam kelas, sehingga seluruh siswa berkebutuhan khusus

yang ada masih dapat terpantau. GPK tersebut juga memiliki latar belakang pendidikan khusus dan telah memiliki pengalaman yang baik dalam menangani ABK. Di samping itu, untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki, GPK tersebut kerap diikutkan pada pelatihan yang relevan dengan layanan pendidikan bagi ABK.

Secara umum sarana dan prasarana yang ada di sekolah guna memenuhi kebutuhan pembelajaran yang memadai bagi anak autis masih kurang. Namun demikian dengan keterbatasan dana yang dimiliki, sekolah tetap berupaya memenuhi kebutuhan minimal agar proses belajar mengajar tetap dapat berjalan dengan baik. Salah satu prasarana penting bagi sekolah inklusif namun belum dimiliki oleh sekolah ini adalah ruang pusat sumber dan atau ruang khusus. Dengan adanya ruang khusus bagi siswa inklusif tersebut diharapkan penanganan khusus bagi ABK dapat dilakukan dengan lebih fokus dan terarah di ruang khusus tersebut.

Kepala sekolah mengakui bahwa sumber dana untuk pelaksanaan pendidikan inklusif secara optimal relatif masih kurang. Sumber dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif ini berasal dari Pemerintah Daerah Tingkat I (dalam hal ini Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta), berupa beasiswa untuk ABK sebesar Rp. 50.000/bulan/siswa. Pada tahun 2009 sekolah ini pernah menerima bantuan dana sebesar Rp 20.000.000 yang digunakan oleh kepala sekolah untuk penyediaan sarana dan operasional GPK.

4.2.2.3. Bidang Kerja Sama

Sampai dengan saat ini, sekolah belum melakukan kemitraan secara langsung dengan pihak lain seperti SLB, Perguruan Tinggi, Tim Medis, Psikolog, maupun lembaga terkait lainnya. Kepala sekolah menyatakan bahwa dengan kondisi seperti ini tentu saja kuantitas dan kualitas tenaga yang kompeten untuk menangani ABK tersebut masih kurang. Berkenaan dengan hal itu, sekolah telah melakukan langkah-langkah untuk menjembatani kekurangan tersebut antara lain dengan mengupayakan adanya GPK tambahan, berusaha mengikutsertakan secara kontinu guru-guru yang ada pada penataran, seminar ataupun pelatihan-pelatihan yang relevan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 06 Lebak Bulus ini, kepala sekolah mengandalkan kemitraan yang kuat antara sekolah dengan orang tua dari beberapa siswa berkebutuhan khusus yang ada. Kepala sekolah menyatakan bahwa dalam pembinaan kepada siswa berkebutuhan khusus, dukungan, dorongan semangat dan kerja sama orang tua memberikan kontribusi yang sangat besar. Orang tua seyogyanya memiliki perhatian atas pendidikan yang dijalani anaknya di sekolah.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dilakukan oleh ibu Asni, beliau sangat memahami kondisi yang ada pada anaknya tersebut, sehingga tanpa segan, bu Asni kerap berkomunikasi dengan guru menanyakan adakah tugas atau PR yang harus dikerjakan oleh anaknya, karena memang menurut penuturan ibu Asni, anaknya tidak pernah melapor bila guru memberikan tugas atau PR untuk di rumah. Di samping itu bu Asni selalu mengkomunikasikan perkembangan anaknya di sekolah kepada ahli terapis yang menangani anaknya di lembaga Dwi Gantari. Demikian sebaliknya, setiap perkembangan atau kondisi yang disampaikan oleh pihak terapis akan dikomunikasikan kepada pihak sekolah. Bagi kedua belah pihak (pihak terapis maupun sekolah) tentu informasi tersebut sangat penting karena dapat dijadikan dasar pembinaan yang lebih terfokus dan terarah mengikuti perkembangan anak berkebutuhan khusus.

4.2.3. SDN 24 Kramat Jati, Jakarta Timur.

Jabatan kepala sekolah SDN 24 Kramat Jati saat ini dipegang oleh Ibu Dra. Ch. Purwanti, beliau berpandangan bahwa pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan penyelenggaraan pendidikan yang tidak membedakan latar belakang, kultur, budaya, sosial ekonomi, untuk semua anak tanpa ada perbedaan. Pandangan tersebut sangat relevan dengan makna dari pendidikan inklusif yang berkembang saat ini (wawancara dengan penulis, 8 Pebruari 2010).

SDN 24 Kramat Jati, beralamat di Jl Kerja Bhakti No. 40, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sekolah ini sudah melaksanakan pendidikan inklusif sejak tahun 2005. Rintisan awal pengembangan pendidikan inklusif di sekolah ini dimulai ketika sekolah ini ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Propinsi untuk menjadi rintisan sekolah model inklusif yang didukung oleh Helen Keler Indonesia (HKI).

Setelah mendapat penunjukan menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, pihak kepala sekolah segera menindaklanjutinya dengan mengadakan musyawarah bersama guru-guru dan orang tua siswa. Musyawarah ini perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman awal kepada warga sekolah tentang apa dan bagaimana pendidikan inklusif tersebut. Dengan menjadi sekolah inklusif berarti sekolah secara perlahan namun pasti harus bersedia dan siap menerima anak berkebutuhan khusus. Ditambahkan oleh kepala sekolah bahwa membangun sekolah inklusif akan terasa nyaman bila semua *stake holder* yang ada memiliki komitmen yang kuat dan sama, saling mendukung, membantu dan berani mengadakan perubahan pelayanan yang sesuai bagi anak berkebutuhan khusus. Para guru perlu secara kontinu mendapat pengetahuan tentang kekhususan anak berkebutuhan khusus sehingga mereka dapat memberikan layanan pendidikan yang sesuai bagi anak berkebutuhan khusus tersebut. Demikian halnya sarana dan prasarana, media pembelajaran yang sesuai bagi anak berkebutuhan khusus harus tersedia dengan baik.

Dalam penyelenggaraan sekolah inklusif ini sekolah mengangkat seorang manager program inklusif dan GPK. Manager program inklusif bertanggungjawab terkait dengan pelaksanaan administratif penyelenggaraan pendidikan inklusif dan hubungan antara sekolah dengan pihak-pihak luar yang terkait. Guru Pembimbing Khusus (GPK) lebih fokus kepada pembinaan kepada anak berkebutuhan khusus. Jabatan manager program inklusif dipegang oleh salah seorang guru agama yang bernama bapak Maruli sedangkan posisi GPK tersebut dipegang oleh seorang guru dari SLB Matraman, bernama Hery Susanto S.Pd, yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta menjadi GPK di SDN 24 Kramat Jati tersebut.

Terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini, kepala sekolah SDN 24 Kramat Jati memandang perlu untuk melakukan penyesuaian atas visi dan misi yang sebelumnya ada. Beliau menyatakan bahwa sebaiknya sekolah memiliki visi dan misi yang memang mengarah pada penyelenggaraan pendidikan yang inklusif. Berikut visi dan misi dari SDN 24 Kramat Jati.

VISI

“ Terwujudnya wajib belajar untuk semua dengan baik, yang tampak pada penampilan siswa dan hasil belajar yang optimal ”

MISI

“ Memberi layanan pendidikan yang ramah dan inklusif “

Sosialisasi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 24 Kramat Jati ini dilakukan melalui berbagai media, selain melalui kegiatan pertemuan yang diselenggarakan oleh sekolah, sosialisasi juga dilakukan melalui internet. Berdasarkan pengakuan dari ibu Riana Indraswari, SS, beliau mengetahui tentang adanya program pendidikan inklusif di SDN 24 Kramat Jati ini melalui internet. Ibu Riana adalah orang tua dari seorang anak berkebutuhan khusus yang bernama Raden Raihan Meganando. Raden adalah siswa kelas III merupakan anak yang mengalami ADHD.

Adapun tanggapan masyarakat akan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah ini cukup positif. Dari hasil wawancara dengan salah satu orang tua dari siswa normal yaitu ibu Ariyanti, adanya siswa berkebutuhan khusus di sekolah tersebut menurutnya tidak mengganggu anak normal lainnya dan proses belajar mengajar baik untuk anak normal dan anak berkebutuhan khusus tetap dapat berjalan dengan baik. Beliau percaya bahwa layanan pendidikan di sekolah ini tetap dapat berjalan dengan baik, karena walaupun ada anak berkebutuhan khusus di sana, namun sekolah ini juga memiliki guru pembimbing khusus yang membantu penanganan anak tersebut.

Kepala sekolah menambahkan bahwa dalam pengembangan pendidikan inklusif tersebut, sekolah juga telah membuat rancangan program jangka pendek, jangka panjang maupun jangka menengah. Rancangan program ini berisi rencana capaian jangka pendek sampai dengan jangka panjang dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Melalui program pengembangan yang dibuat ini penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat lebih terarah dan terfokus.

Terkait pelaksanaan dan pengembangan pendidikan inklusif di sekolah tersebut, kepala sekolah secara periodik menyelenggarakan pertemuan internal dengan warga sekolah terkait seperti guru, GPK dan juga orang tua murid. Pertemuan secara periodik ini dapat dikatakan sebagai rapat koordinasi penyelenggaraan pendidikan

inklusif, pada koordinasi ini dibicarakan hal-hal berkaitan dengan perkembangan anak dalam pencapaian materi yang telah disampaikan. Melalui koordinasi yang rutin dan berkesinambungan ini kepala sekolah berharap segala keberhasilan atau bahkan rintangan dan hambatan yang dihadapi dapat segera diketahui dan dapat diambil langkah-langkah tindak lanjut yang sesuai.

4.2.3.1. Bidang Kesiswaan

Setelah ditunjuk sebagai sekolah model inklusif SDN 24 Kramat Jati menyediakan 5 % tempat duduk untuk siswa berkebutuhan khusus. Beliau memberikan contoh, kelas I yang daya tampungnya berjumlah 40 orang berarti anak berkebutuhan khusus yang dapat diterima di kelas I tersebut sebanyak 2 orang. Sebelum memutuskan untuk menerima anak berkebutuhan khusus, terlebih dahulu dilakukan rembuk antara kepala sekolah, guru-guru dan GPK untuk membicarakan kesiapan sekolah. Hingga saat ini SDN 24 Kramat Jati menampung 38 siswa berkebutuhan khusus dengan berbagai jenis kebutuhan sebagai berikut; 1 orang anak hiperaktif, 3 anak autis, 1 anak mengalami ADHD, 15 anak teridentifikasi mengalami lambat belajar dan 18 anak dikategorikan mengalami kesulitan belajar.

Dalam penerimaan siswa baru, SDN 24 Kramat Jati juga melalui proses identifikasi atau asesmen. Pada prinsipnya proses identifikasi dilakukan oleh tenaga profesional. Anak berkebutuhan khusus yang didaftarkan oleh orang tuanya akan menunjukkan referensi atau keterangan yang dikeluarkan oleh tenaga ahli. Di samping proses identifikasi terhadap siswa baru, SDN 24 Kramat Jati ini juga melakukan identifikasi dan asesmen terhadap siswa yang ada untuk menjangkau informasi, apakah dari sejumlah siswa yang ada terdapat anak-anak yang masuk dalam kategori anak lambat belajar atau anak dengan kesulitan belajar. Proses identifikasi terhadap siswa yang ada ini terkadang perlu melibatkan tenaga psikolog atau tenaga ahli lainnya agar metode yang digunakan maupun hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, karena keterbatasan alokasi dana yang dimiliki oleh sekolah, pemanfaatan tenaga psikolog dalam proses identifikasi ini belum dapat berjalan berkesinambungan. Umumnya hasil identifikasi dan atau asesmen yang dilakukan

terdiri dari aspek-aspek seperti identitas dan latar belakang siswa, IQ siswa, kondisi emosional, kondisi fisik, kondisi mental, kelemahan siswa, kebutuhan alat bantu pembelajaran bagi siswa, dan lain-lain.

4.2.3.2. Bidang Pendidikan Dan Pengajaran

Dalam rangka memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, sampai dengan saat ini secara umum sekolah belum melakukan modifikasi kurikulum dan masih menggunakan kurikulum yang sama antara siswa berkebutuhan khusus maupun siswa reguler. Hal ini disebabkan karena kepala sekolah masih mengharapkan agar anak berkebutuhan khusus masih bisa dikondisikan untuk belajar seperti siswa reguler lainnya.

Namun demikian dengan mempertimbangkan keterbatasan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus, sekolah terkadang memandang perlu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai kondisi dan kebutuhan. Adapun unsur-unsur sekolah yang melakukan penyesuaian-penyesuaian tersebut adalah mereka yang memahami kondisi anak berkebutuhan khusus dan atau yang berinteraksi langsung dengan anak berkebutuhan khusus yaitu guru kelas, guru mata pelajaran dan GPK. Modifikasi kurikulum tetap mengacu pada KTSP yang ada. Tenaga psikolog pernah juga ikut terlibat dalam proses penyesuaian ini, namun sifatnya tidak berkesinambungan. Keterlibatan psikolog ini biasanya saat disekolah tersebut ada program kerja sama dengan perguruan tinggi atau pihak –pihak lain. Ditambahkan oleh Bapak Maruli, dengan diberlakukannya otonomi sekolah, maka sekolah diberi kewenangan oleh Dinas Pendidikan Propinsi untuk melakukan modifikasi pelaksanaan pembelajaran.

SKKD yang dikembangkan di SDN 24 Kramat Jati secara umum tidak dibedakan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler, hanya saja dalam hal SKKD ini sekolah terkadang perlu mempertimbangkan kondisi anak berkebutuhan khusus, sehingga untuk beberapa SKKD yang memang tidak memungkinkan untuk dicapai oleh anak berkebutuhan khusus dengan kondisi tertentu akan disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam penyesuaian SKKD ini sekolah melibatkan guru kelas dan atau guru

mata pelajaran dan GPK. Kedua unsur tersebut harus dapat bekerja sama dengan baik, berkoordinasi dan berbagi tugas dalam melakukan penyesuaian SKKD tersebut.

Dalam hal pembelajaran sekolahpun memandang perlu dilakukan beberapa penyesuaian, dengan melihat kondisi masing-masing anak berkebutuhan khusus. Biasanya guru kelas atau guru mata pelajaran mempersiapkan materi maupun mekanisme pembelajaran secara umum kepada seluruh siswa, selanjutnya materi dan mekanisme pembelajaran yang telah disusun tersebut akan dipelajari oleh GPK untuk kemudian disesuaikan pelayanannya agar dapat diterima dengan baik oleh anak berkebutuhan khusus. Dalam hal modifikasi pembelajaran ini memang lebih banyak diambil perannya oleh GPK karena memang GPK ini yang lebih fokus dalam hal pembinaan bagi anak berkebutuhan khusus.

Bervariasinya jenis anak berkebutuhan khusus yang ada, menjadikan kebutuhan layanan pembelajaran khusus bagi masing-masing anak berkebutuhan khusus itu juga berbeda-beda. Agar masing-masing anak berkebutuhan khusus tersebut tidak mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran yang diberikan di sekolah, maka sekolah memandang perlu untuk membuat Program Pengajaran Individual (PPI) bagi masing-masing anak. PPI yang dibuat akan menyangkut banyak aspek, oleh karena itu dalam penyusunan PPI bagi siswa berkebutuhan khusus di SDN 24 Kramat Jati ini dilakukan oleh tim penyusun yang terdiri dari GPK, guru kelas dan juga orang tua siswa

Kepala sekolah menambahkan, selain guru kelas atau guru mata pelajaran yang menyampaikan pelajaran secara umum di dalam kelas, bila diperlukan, ada kalanya GPK harus mendampingi anak berkebutuhan khusus di dalam kelas. Kondisi ini biasanya dilakukan untuk beberapa mata pelajaran tertentu saja. Dengan demikian diharapkan proses belajar mengajar di dalam kelas tetap dapat berjalan lancar, di satu sisi proses belajar mengajar anak normal dapat berjalan dengan baik, di sisi lain anak berkebutuhan khusus ada yang mendampingi sehingga tidak tertinggal.

Berdasarkan pengamatan proses belajar mengajar di kelas dan informasi yang disampaikan oleh kepala sekolah, Coki Yudistrira, seorang siswa kelas V, yang merupakan anak autisme, dapat mengikuti pelajaran bahasa Inggris dengan baik, dan nilai

yang diperoleh juga relatif baik. Untuk memudahkan pengamatan oleh guru kelas dalam kesehariannya, Coki duduk dibarisan paling depan dekat dengan tempat duduk guru. Dari hasil pengamatan tampak Coki begitu bersemangat mengikuti pelajaran tersebut, walaupun kadang-kadang kerap mengeluarkan suara keras ketika ditanya oleh ibu guru.

Demikian halnya dengan Andika, seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus ganda, yaitu kesulitan dalam berkomunikasi dan kesulitan dalam mendengar. Andika mengaku bersekolah di sana karena teman-temannya bersikap baik padanya dan mau belajar dan bermain bersamanya. Andika mulai bersekolah di SDN 24 Kramat Jati, sejak kelas III dan saat ini duduk di kelas VI. Dengan kalimat yang tidak begitu jelas terdengar, tapi masih bisa ditangkap, Andika menjelaskan bahwa mata pelajaran yang paling ia senangi adalah matematika. Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Maruli, Andika pindah ke SDN 24 Kramat Jati karena orang tuanya merasa di sekolah yang lama Andika tidak begitu mendapat perlakuan khusus. Bagi SDN 24 Kramat Jati, Andika merupakan salah satu contoh sukses dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Melalui pembinaan yang dilakukan dengan baik, saat ini terdapat perkembangan yang sangat besar dalam diri Andika, semula tidak bisa apa-apa saat ini Andika sudah bisa berkomunikasi, berjalan, bermain bola dan belajar bersama teman-temannya.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara umum disusun oleh guru kelas dan berlaku untuk semua baik untuk anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. RPP mencakup waktu belajar, mekanisme belajar, tempat belajar sumber belajar dan media pembelajaran. Dalam kondisi tertentu dengan mempertimbangkan kondisi yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus, biasa guru kelas akan bekerja sama dengan GPK untuk melakukan penyesuaian RPP bagi anak berkebutuhan khusus tersebut. Ditambahkan oleh GPK bahwa dalam penyusunan RPP ini GPK memberikan masukan kepada guru kelas dalam hal metode penyampaian pelajaran bagi ABK di dalam kelas. Penyesuaian RPP yang dibuat biasanya mencakup waktu belajar, mekanisme belajar, tempat belajar, sumber belajar serta media atau alat bantu pembelajaran.

Adapun peranan GPK dalam penyesuaian pada mekanisme atau proses belajar mengajar ini adalah sebagai pendamping bagi guru kelas dalam proses belajar mengajar di kelas. Tidak sebatas pada pembelajaran klasikal di kelas, bagi siswa berkebutuhan khusus terkadang perlu diberikan pendalaman materi agar mereka tidak tertinggal pelajaran dari teman-teman yang lain. Mengingat jumlah siswa berkebutuhan khusus yang tidak sedikit serta jenis kebutuhan yang beraneka ragam, GPK merasa perlu membuat jadwal pendalaman materi bagi siswa. GPK menambahkan pendalaman materi yang beliau tangani terutama pada pelajaran matematika dan konsep pemahaman bahasa agar anak berkebutuhan khusus dapat menerima informasi dengan lebih cepat.

Kepala sekolah menambahkan untuk kelas rendah target yang diharapkan dapat dicapai terutama untuk anak berkebutuhan khusus adalah kemampuan membaca, menulis dan berhitung. Kelas 4, 5 dan 6 target yang diharapkan dapat dicapai adalah berkenaan dengan konsep pemahaman. Selain memberikan pembelajaran di bidang akademik, pembinaan kepada anak berkebutuhan khusus di SDN 24 Kramat Jati ini juga diarahkan pada pengembangan bakat dan minat yang dimiliki siswa. Biasanya pembinaan bakat dan minat ini dikembangkan melalui program-program ekstrakurikuler yang ada di sekolah.

Dari hasil pengamatan di lapangan dan juga wawancara dengan GPK maupun kepala sekolah, SDN 24 Kramat Jati memiliki beberapa sarana untuk anak berkebutuhan khusus. Kepala sekolah menyebutkan bahwa bantuan dana yang diterima dari dinas akan dimanfaatkan untuk menyediakan atau menyempurnakan kebutuhan sarana bagi anak berkebutuhan khusus. Informasi berkenaan dengan kebutuhan sarana tersebut biasanya dibuat oleh GPK yang memang fokus dalam menganalisis kebutuhan akan sarana maupun prasarana tersebut.

Saat ini SDN 24 Kramat Jati telah memiliki ruang khusus siswa inklusif. Ruang khusus tersebut dikelola oleh GPK. Di ruang khusus tersebut disimpan beberapa alat terapis dan alat belajar bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam ruang khusus itulah tempat GPK memberikan pendalaman materi kepada siswa berkebutuhan khusus pada jam-jam tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai sekolah model inklusif, kepala sekolah SDN 24 Kramat Jati mengaku memperoleh bantuan dan sumber dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat I. Dari pemerintah pusat SDN 24 Kramat Jati mendapat bantuan komputer untuk mengembangkan pendidikan berbasis ICT kepada siswa pada umumnya dan siswa berkebutuhan khusus pada khususnya. Menurut penjelasan yang disampaikan oleh bapak Maruli, dalam penggunaan komputer ini, beberapa anak berkebutuhan khusus memiliki kemampuan yang luar biasa dan bahkan tidak kalah dengan anak normal lainnya.

Dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia yang terlibat aktif dan memiliki peranan penting dalam pengembangan pendidikan inklusif di SDN 24 Kramat Jati adalah kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, manajer sekolah inklusif dan GPK. Diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik antara unsur-unsur tersebut. GPK yang memiliki latar belakang pendidikan khusus ini memang mendapat tugas khusus untuk menangani anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut. Saat ini SDN 24 Kramat Jati hanya memiliki satu orang GPK, untuk menangani 38 anak berkebutuhan khusus dengan jenis yang begitu bervariasi tentu jumlah ini tidak mencukupi. Kehadiran GPK di sekolah tersebut rata-rata tiga kali dalam seminggu, kecuali dalam kondisi tertentu bila sewaktu-waktu diperlukan GPK akan diminta untuk datang ke sekolah. Sekali dalam seminggu digunakan oleh GPK untuk mengajar di pusat sumber SLBN 7 Matraman.

Metode pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif perlu ditingkatkan. Terlebih bila ditemukan teknologi-teknologi atau metode-metode baru penanganan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang mungkin belum atau tidak dipahami oleh guru-guru di sekolah reguler, oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat memfasilitasi dan memberdayakan guru-guru reguler yang ada melalui bimbingan dan penataharian khusus yang berkesinambungan. Di sisi lain, bagi guru-guru yang terlibat dalam penanganan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tentu memiliki beban kerja yang lebih dibanding dengan guru-guru lainnya, untuk itu diharapkan pemerintah dapat memberikan perhatian khusus, dengan harapan dapat

meningkatkan motivasi kerja guru-guru yang turut menangani anak berkebutuhan khusus tersebut.

Secara umum kepala sekolah SDN 24 Kramat Jati menilai bahwa dengan mengacu pada perencanaan dan proses belajar mengajar yang sudah terprogram dengan baik, maka pada prinsipnya untuk beberapa kondisi, anak berkebutuhan khusus masih dapat diberikan soal ulangan, soal ujian kenaikan kelas maupun soal ujian sekolah yang sama dengan anak normal lainnya. Namun demikian, dengan memahami kondisi yang ada, di mana sekolah tersebut menampung anak dengan berbagai kondisi, maka sekolah mengambil kebijakan untuk menurunkan standar nilai kenaikan kelas atau standar kelulusan, dengan harapan, standar yang ditetapkan masih dapat dicapai oleh anak berkebutuhan khusus, namun di sisi lain usaha untuk mendapatkan nilai atau prestasi tertinggi bagi siswa normal lainnya tetap menjadi prioritas lainnya.

Berkenaan dengan kelulusan siswa berkebutuhan khusus, SDN 24 Kramat Jati memberlakukan dua alternatif. Pertama, sekolah diberikan membuat ujian sekolah bagi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan dan proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Pada alternatif pertama ini sekolah dapat mengeluarkan surat tanda tamat belajar bagi siswa berkebutuhan khusus tersebut. Alternatif yang kedua adalah jika berdasarkan proses belajar mengajar dan hasil analisa anak berkebutuhan khusus dipandang dapat mengikuti ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN), maka anak tersebut akan diarahkan untuk mengikuti UASBN tersebut. Namun demikian dalam hal ini sekolah tetap akan berkonsultasi dengan orang tua anak berkebutuhan khusus, bila orang tua menginginkan anaknya tetap mengikuti UASBN walaupun sekolah tidak merekomendasikan, maka anak diperbolehkan untuk mengikuti UASBN dengan konsekwensi terburuk adalah tidak lulus.

4.2.3.3. Bidang Kerjasama

Adapun kemitraan yang menonjol dan berkesinambungan adalah dengan SLBN 7 Matraman. Sebagai pusat sumber bagi SDN 24 Kramat Jati, SLBN 7 Matraman sangat membantu dalam proses pengembangan pendidikan inklusif di SDN 24 Kramat Jati antara lain penyediaan GPK. Dibantu oleh GPK itu juga, saat ini SDN

24 Kramat Jati dapat melakukan melakukan bedah SKKD, penyusunan dan penyesuaian silabus sekolah, penyusunan PPI hingga modifikasi indikator baru untuk siswa kelas I.

Sebagai sekolah model, pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN 24 Kramat Jati ini memang banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak yang peduli dengan pengembangan pendidikan inklusif tersebut. Banyak pihak yang ingin bekerja sama atau melakukan penelitian tentang pendidikan inklusif di sekolah ini. Kondisi ini merupakan berkah tersendiri bagi SDN 24 Kramat Jati, karena menurut kepala sekolah SDN 24 Kramat Jati sebelumnya adalah sekolah yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat karena kondisinya yang kumuh.

Perguruan Tinggi yang pernah bermitra dengan SDN 24 Kramat Jati ini antara lain Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Uhamka dan Atmajaya. Kemitraan itu biasanya ada pada saat tertentu saja seperti misalnya saat perguruan tinggi tersebut melakukan penelitian tentang pendidikan inklusif atau pada saat ada program pendampingan dari perguruan tinggi kepada sekolah inklusif. Program pendampingan ini merupakan salah satu program yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.

Kerjasama yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut dalam bentuk yang berbeda-beda. Fakultas psikologi UI memberikan peningkatan pemahaman dan teknik-teknis pendampingan ABK di kelas, Uhamka memberikan teknik-teknik penanganan ABK di kelas dan Universitas Atmajaya dalam kesempatan tersebut melakukan evaluasi mengenai kegiatan inklusif di SDN 24 Kramat Jati.

BAB 5
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR ORGANISASI PADA
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SDN 02 DAN SDN
06 LEBAK BULUS SERTA SDN 24 KRAMAT JATI

Analisis terhadap upaya dari sekolah-sekolah (yang menjadi objek penelitian ini) dalam melakukan perubahan atau penyesuaian dan pengelolaan faktor-faktor atau elemen-elemen organisasi sedemikian rupa sehingga sekolah tersebut menjadi lebih siap dan mampu dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ini akan diuraikan berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut: tujuan bersama; sumber daya manusia; proses belajar mengajar, serta struktur organisasi dan pengorganisasian. Perubahan merupakan salah satu hal penting berkenaan dengan ketahanan organisasi. Hal ini sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh Gerner: *“renewal is not just innovation and change. It is also the process of bringing the result of change into the line with (the organization’s) purposes”* (J. Winardi, 2003, h. 173).

5.1. Tujuan Bersama Dalam Pelaksanaan Sekolah Inklusif Yang Ramah Untuk Semua.

Walaupun pada awalnya penetapan sekolah tersebut menjadi sekolah inklusif berdasarkan penunjukan dari pemerintah, sekolah-sekolah tersebut pada dasarnya mengawali pelaksanaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan proses musyawarah bersama yang melibatkan seluruh warga sekolah. Kepala sekolah SDN 02 Lebak Bulus, Alex Djumidi menyampaikan bahwa dalam penetapan sekolahnya sebagai pelaksanaan pendidikan inklusif, beliau mengawalinya dengan proses musyawarah yang melibatkan banyak stake holder di sekolah tersebut. Berikut petikan wawancara dengan Kepala SDN 02 Lebak Bulus, Alex Djumidi:

“Sekolah ini mulai menyelenggarakan pendidikan inklusif sejak tahun 1999. Tentunya dalam proses penetapan sekolah ini menjadi sekolah inklusif kami perlu melakukan musyawarah. Dalam musyawarah tersebut

kami melibatkan banyak stake holder terkait di sekolah ini” (percakapan langsung 2 Pebruari 2010).

Kondisi yang sama juga dilakukan di SDN 24 Kramat Jati seperti yang disampaikan oleh Ibu Ch. Purwanti, di mana beliau mengatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak terlepas dari dukungan dan komitmen semua pihak, sehingga penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah tersebut diawali dengan musyawarah yang melibatkan unsur-unsur terkait di sekolah. Berikut petikan wawancara dengan Kepala SDN 24 Kramat Jati, Ch Purwanti:

“...karena keberhasilan pendidikan inklusif itu tidak terlepas dari dukungan dan komitmen semua pihak, dalam proses selanjutnya penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah ini, kami awali dengan musyawarah yang melibatkan unsur-unsur terkait di sekolah. Setiap ada anak berkebutuhan khusus yang ingin masuk ke sini kami para kepala sekolah dan guru akan rembukan baru kemudian memutuskan” (percakapan langsung 8 Pebruari 2010).

Musyawarah dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh kepala sekolah ini, dapat dipandang sebagai proses sosialisasi akan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah. Di mana sosialisasi yang berkesinambungan dapat menumbuhkan atau bahkan meningkatkan pemahaman warga sekolah lainnya tentang bagaimana konsep dan penyelenggaraan pendidikan yang ramah untuk semua. Dengan pemahaman yang sama tentang pendidikan inklusif tersebut, diharapkan warga sekolah akan lebih dapat menerima tujuan sekolah yang baru sebagai tujuan bersama. Adapun tujuan yang baru dari sekolah itu adalah menerima dan memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada anak berkebutuhan khusus. Langkah dari kepala sekolah untuk menjadikan tujuan pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus disekolah ini dipandang relevan dan salah satu karakteristik suatu organisasi yang diungkapkan oleh banyak pakar, terutama terkait dengan tujuan organisasi sebagai tujuan bersama.

Seperti disampaikan dalam Bab II, bahwa Edgar H. Schein, menyatakan semua organisasi memiliki empat macam ciri yaitu; koordinasi upaya, tujuan bersama, pembagian kerja dan hirarki otoritas. Pendapat ini seirama dengan apa

yang disampaikan oleh Reece bahwa terdapat beberapa elemen dalam suatu organisasi yaitu; manusia, tujuan tertentu, pembagian tugas-tugas dan sebuah sistem untuk mengkoordinasikan tugas-tugas tersebut serta sebuah batas yang dipatok yang menunjukkan pihak yang berada di luarnya. Ciri atau karakteristik dari organisasi yang disampaikan baik oleh Edgar H. Schein dan Reece ini dapat dikatakan serupa dengan apa yang disampaikan oleh E. Kast dan James E. Rosenzwing yang menyatakan bahwa dalam suatu organisasi harus memuat sekurang-kurangnya empat unsur yaitu; pencapaian tujuan (*goal oriented*), orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan (*psychological system*), hubungan kerja sama yang berpola (*structure activities*) serta penggunaan teknologi dalam pencapaian tujuan (*technology system*).

Dari pendapat yang disampaikan oleh empat pakar tersebut terdapat kesamaan terkait dengan karakteristik organisasi, dalam hal ini adalah suatu organisasi itu perlu memiliki tujuan bersama untuk dapat dipahami dan diterima oleh semua anggota organisasi. Dengan bekerja sama dan mengkoordinasikan upaya baik secara mental maupun fisik, setiap individu akan memperoleh sesuatu hal yang terbaik. Koordinasi upaya dari setiap individu tidak akan terwujud, bila tidak ada tujuan bersama diantara mereka. Untuk itu, para individu yang telah bersatu dalam suatu bentuk organisasi tertentu, juga harus memiliki keinginan untuk mencapai persetujuan untuk mencapai sesuatu yang merupakan kepentingan bersama (walaupun pada awalnya para individu tersebut memiliki tujuan berbeda), dan memberikan rangsangan kepada anggota suatu organisasi untuk bertindak. Dari hasil pengamatan yang ada di lapangan, masing-masing warga sekolah, berdasarkan tugas dan fungsinya saling bahu-membahu dan melengkapi dalam berkontribusi memberikan layanan yang terbaik bagi anak berkebutuhan khusus.

Perlu menjadi perhatian disini adalah, perlu adanya sosialisasi dan pembinaan yang terus menerus kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah tersebut karena, seiring berjalannya waktu sikap mental, keyakinan dan kesiapan mereka dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus kerap berfluktuasi sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi komitmen mereka pada tujuan bersama yang telah disepakati bersama tersebut.

5.2. Sumber Daya Manusia Pada Penyelenggaraan Sekolah Inklusif

Sebagaimana diungkapkan oleh J. Winardi, elemen inti suatu organisasi adalah orang-orang (manusia) yang berinteraksi dan interaksi tersebut merupakan kondisi yang diperlukan untuk menetapkan eksistensi suatu organisasi. Hal ini juga sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Luthans bahwa walaupun kegiatan rekognisi, strategi dan implementasi globalisasi, teknologi informasi dan kualitas total penting bagi suatu organisasi yang menghadapi perubahan, tapi elemen kunci untuk meraih keunggulan kompetitif adalah manusia. Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan, kondisi di lapangan memang memperlihatkan begitu dominannya peranan elemen manusia seperti kepala sekolah, guru-guru, orang tua maupun masyarakat terkait lainnya dalam terlaksananya pendidikan inklusif di sekolah. Kepala sekolah, guru-guru dan masyarakat terkait lainnya merupakan individu-individu yang memiliki kemampuan untuk bertindak, mempengaruhi orang lain dan memanfaatkan konsep-konsep seperti menciptakan, merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, berkomunikasi dan kemampuan untuk mengawasi.

Menetapkan sekolah untuk menjadi sekolah inklusif berarti dengan disadari perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian pada sekolah tersebut. Perubahan yang dilakukan mencakup banyak aspek baik pada kebijakan-kebijakan, proses pembelajaran, manajemen pengelolaan sekolah maupun sumber daya manusia dan lain-lain. Berikut petikan wawancara dengan Kepala SDN 06 Lebak Bulus, Tumiyem:

“Betul sekali, di sekolah kami memang melakukan perubahan atau istilahnya penyesuaian visi dan misi, saat ini intinya sekolah berupaya melayani anak berkebutuhan khusus agar setara dengan siswa normal, visi dan misi disesuaikan dengan prinsip pendidikan untuk semua” (Percakapan langsung 4 Pebruari 2010)

Perubahan pada tataran kebijakan yang telah ditetapkan baik oleh kepala sekolah SDN 02 Lebak Bulus, SDN 06 Lebak Bulus maupun SDN 24 Kramat Jati tentu harus ditindaklanjuti dengan penguatan sumber daya manusia (SDM) yang memadai pula. Sumber daya manusia yang ada sebelumnya memang hanya dipersiapkan untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak normal,

dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif berarti berarti layanan juga harus dapat diberikan kepada anak cacat atau anak berkebutuhan khusus. Bagi guru-guru, perubahan ini bukan merupakan hal yang mudah, pertama mereka harus mengubah cara pandang mereka sendiri tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan yang lebih inklusif. Kedua keterbatasan kompetensi yang mereka miliki berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tentu memerlukan perhatian tersendiri. Ketiga berkenaan dengan fokus pekerjaan dan ketersediaan waktu. Umumnya dalam menangani anak normal saja, guru kelas maupun guru mata pelajaran yang ada sudah memiliki beban kerja dan tanggungjawab yang cukup tinggi, apalagi bila mereka juga harus menangani anak berkebutuhan khusus.

Untuk itu dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, sekolah mengusahakan ketersediaan dukungan teknis dari pihak-pihak berkompeten dari luar sekolah, seperti melakukan kerjasama dengan lembaga atau organisasi serta tenaga ahli, termasuk dalam hal ini mengusahakan ketersediaan guru tambahan yang memang akan ditugaskan secara khusus untuk memberikan dukungan teknis pada layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tersebut. Untuk meningkatkan pemahaman guru-guru akan penyelenggaraan pendidikan inklusif, kepala sekolah kerap mengikutkan guru-guru pada pelatihan-pelatihan, program-program pembinaan dan peningkatan mutu terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berikut petikan wawancara dengan Kepala SDN 24 Kramat Jati, Ch Purwanti:

“Beberapa guru di sini sudah mengikuti pelatihan tentang pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus. Termasuk di sini adalah guru pembimbing khusus” (Percakapan Langsung 8 Pebruari 2010).

Dalam meberikan dukungan teknis dalam implementasi pelaksanaan proses belajar mengajar, kepala sekolah mengusahakan tersedianya guru pembimbing khusus (GPK). Kerjasama dengan pihak-pihak terkait termasuk penyediaan GPK tersebut merupakan salah satu bentuk adaptasi atau penyesuaian yang dilakukan oleh sekolah terhadap perkembangan kebutuhan layanan pendidikan yang semakin beragam. Berikut petikan wawancara dengan Kepala SDN 24 Kramat Jati, Ch Purwanti:

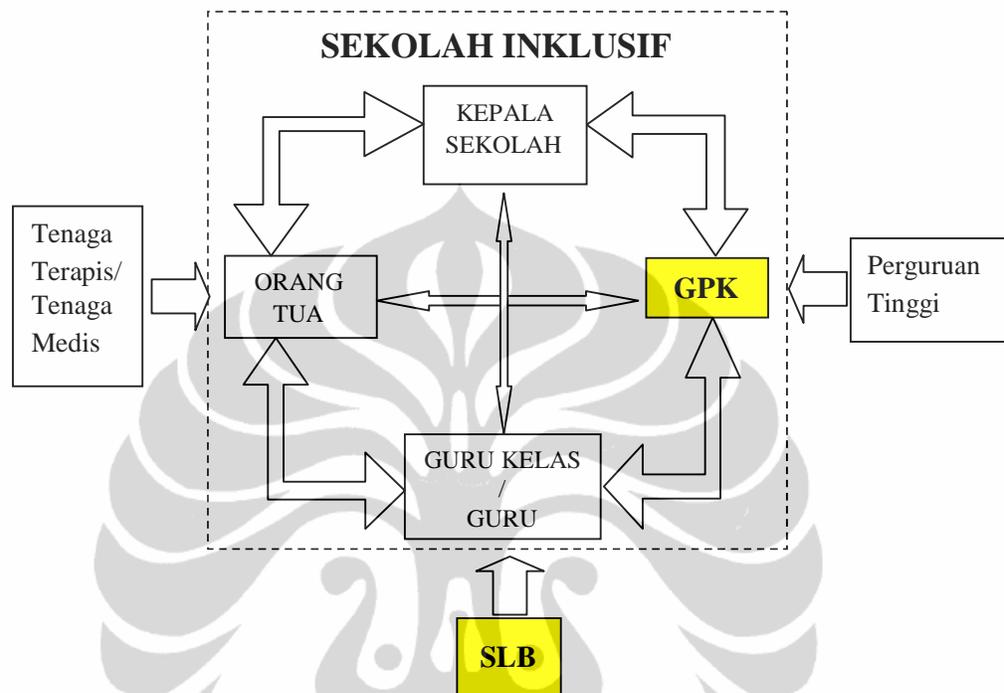
“Kami memiliki seorang guru pembimbing khusus, mereka memiliki latar belakang tentang pendidikan khusus dan sudah cukup berpengalaman dalam menangani anak berkebutuhan khusus” (percakapan langsung 8 Pebruari 2010).

Salah satu ciri yang membedakan antara sekolah reguler dengan sekolah inklusif adalah keberadaan Guru Pembimbing Khusus (GPK). GPK merupakan sumber daya manusia yang memang ditugaskan untuk memberikan dukungan teknis maupun pendampingan lainnya kepada anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut.

Pelaksanaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut dapat berjalan hingga saat ini karena sekolah menjalin beberapa kerjasama. Secara internal, sekolah menjalin koordinasi dan kerja sama antara elemen-elemen manusia yang ada di dalam sekolah tersebut (Kepala Sekolah, Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran, GPK maupun Orang tua/Masyarakat). Dalam hal kerja sama dengan pihak eksternal, di samping kerja sama dengan terapis, tenaga ahli dari lembaga/perguruan tinggi, salah satu ciri yang paling menonjol dari pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah tersebut adalah adanya kerjasama antara sekolah inklusif dengan sekolah luar biasa (SLB). SLB ini menyediakan GPK serta memfasilitasi ketersediaan alat bantu pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhannya (gambar 5.1)

Penguatan sumber daya dan kerjasama yang dilakukan sekolah menurut penulis sudah tepat. Bila hanya mengandalkan pada sumber daya manusia internal sekolah di mana pemahaman serta kemampuan teknis pada penanganan anak berkebutuhan khusus sangat terbatas, tentu sekolah akan mengalami kesulitan dalam memeberikan layanan yang baik kepada anak berkebutuhan yang ada.

Gambar 5.1 Kerjasama Sekolah Inklusif



Sumber : Gambar diolah oleh penulis dari berbagai sumber

Langkah-langkah yang dilakukan oleh sekolah-sekolah tersebut sesuai dengan sudut pandang organisasi dengan pendekatan modern atau pendekatan “ketergantungan” yang menyatakan bahwa suatu organisasi akan dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya dan hanya organisasi yang bisa beradaptasi secara tepat terhadap tuntutan lingkungan yang akan dapat mencapai keberhasilan. Dengan melakukan kerja sama itu pula, maka sekolah inklusif dapat dikategorikan sebagai organisasi dengan system terbuka sebagaimana diungkapkan oleh Huseini dan Lubis dalam buku Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro) disebutkan bahwa dalam rangka keterbukaan organisasi terhadap lingkungannya tampak bahwa organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan yang memerlukan input dari lingkungan, melakukan proses transformasi untuk menghasilkan output yang pada akhirnya dikeluarkan pada lingkungan organisasi tersebut.

Namun demikian, walaupun telah melakukan langkah-langkah yang baik dalam proses adaptasi yaitu dengan meningkatkan daya dukung sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, secara kuantitas maupun kualitas kerja sama yang dilakukan oleh pihak sekolah masih perlu ditingkatkan lagi. Misalnya dalam menjalin kerja sama dengan tenaga psikolog untuk proses identifikasi dan assesmen anak berkebutuhan khusus, belum dapat dilakukan secara berkesinambungan dan sekolah-sekolah tersebut masih mengandalkan pada adanya program kerja sama yang diselenggarakan oleh pemerintah, melalui program pendampingan perguruan tinggi atau bantuan subsidi operasional sekolah inklusif. Termasuk dalam hal pendampingan oleh tenaga ahli, tenaga medis atau tenaga terapis terkait belum dapat dilakukan secara intensif dan berkesinambungan kepada siswa berkebutuhan khusus yang memerlukan karena keterbatasan yang dihadapi oleh sekolah. Berikut petikan wawancara dengan Kepala SDN 02 Lebak Bulus, Alex Djumidi:

“Kemitraan yang paling menonjol di sini adalah dengan SLBN Lebak Bulus, kebetulan letaknya bersebelahan dengan sekolah kami. Kami memiliki keterbatasan dalam mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti misalnya tenaga psikolog, ataupun tim medis karena memang kami tidak memiliki dana khusus untuk itu” (pembincaraan langsung 2 Pebruari 2010).

Penanganan bagi anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik sedikit berbeda dengan penanganan bagi anak normal, di mana disamping masalah pembelajaran, untuk anak berkebutuhan khusus penanganan dan pembinaan pada kemampuan fisik dan psikis (tergantung pada jenis kebutuhan khusus) sebaiknya juga dapat dilakukan bersamaan, agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal. Dalam hal ini kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru dari sekolah reguler tentu tidak mencukupi.

Sekolah-sekolah tersebut saat ini masing-masing hanya memiliki satu GPK, bahkan GPK di SDN 02 Lebak Bulus bertugas tidak hanya di satu sekolah inklusif, beliau juga menjadi GPK di salah satu SMP Inklusif di daerah Lebak Bulu, Jakarta Selatan. Umumnya GPK tersebut memiliki latar belakang dan pengalaman di bidang pendidikan khusus. Guru pembimbing khusus (GPK)

memiliki peranan cukup penting dalam penanganan teknis bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah. Bila melihat kondisi yang ada di lapangan jumlah GPK tersebut dapat dikatakan masih sangat kurang, mengingat salah satu filosofi dari penyelenggaraan pendidikan inklusif ini adalah untuk meningkatkan daya tampung anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah reguler sehingga angka partisipasi sekolah anak cacat diharapkan dapat meningkat, konsekwensi dari filosofi tersebut adalah sekolah reguler seyogyanya siap dan dapat menampung banyak anak berkebutuhan khusus. Di sisi lain, jenis kebutuhan khusus atau kecacatan sangatlah beragam, masing-masing jenis memiliki karakteristik dan memerlukan penanganan yang berbeda. Sulit dibayangkan bila hanya dengan satu GPK yang mungkin juga memiliki kemampuan terbatas, sekolah menampung banyak anak berkebutuhan khusus, terlebih lagi bila anak berkebutuhan khusus tersebut terdiri dari berbagai jenis kebutuhan khusus yang berbeda. Dua dari tiga sekolah yang menjadi objek penelitian yaitu SDN 02 Lebak Bulus dan SDN 06 Lebak Bulus juga menyatakan bahwa karena keterbatasan GPK yang ada saat ini mereka hanya memfokuskan menerima anak berkebutuhan khusus dari satu jenis kecacatan. Jenis kecacatan yang mereka terima biasanya disesuaikan dengan kesiapan, latar belakang dan pengalaman GPK dalam menangani suatu jenis kebutuhan khusus anak. Untuk SDN 02 Lebak Bulus memfokuskan pada penerimaan anak dengan kebutuhan khusus tunanetra, sedangkan SDN 06 Lebak Bulus memfokuskan pada penerimaan anak berkebutuhan khusus autis.

Lantas bagaimana dengan anak dengan kebutuhan khusus tunarungu, tunadaksa, tunagrahita dan lain-lain? menurut informasi yang penulis terima dari beberapa informan, di propinsi DKI Jakarta beberapa sekolah membuat konsensus atau kesepakatan tidak tertulis untuk membagi spesialisasi penanganan anak berkebutuhan pada beberapa sekolah yang ada. Menurut penulis kondisi ini kurang menguntungkan bagi peserta didik karena bila di suatu wilayah hanya terdapat sekolah inklusif yang menangani anak tunanetra, tentu anak tunarungu atau jenis kecacatan lainnya tidak dapat bersekolah di sana sehingga harus mencari sekolah yang siap menanganinya dan bukan tidak mungkin lokasinya akan berada jauh di wilayah tempat anak itu tinggal. Kondisi ini membuat akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menjadi terbatas dan secara tidak langsung bertolak belakang

dengan konsep pendidikan yang ramah untuk semua. Melihat dari sisi kesinambungan program, bisa jadi anak berkebutuhan khusus dari jenis tertentu yang sudah lulus sekolah dasar (SD) tidak dapat diterima di sekolah menengah pertama (SMP) terdekat karena sekolah tersebut tidak siap menerima karena keterbatasan SDM.

Dalam mengimplementasikan konsep pendidikan yang ramah untuk semua, seyogyanya sekolah inklusif dapat segera beradaptasi menjawab kebutuhan yang berkembang di lapangan. GPK dengan latar belakang yang memadai sebaiknya dapat disediakan dengan cepat dan tepat sehingga bila muncul kebutuhan untuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan jenis kebutuhan khusus tertentu tetap dapat terlayani. Demikian halnya dengan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, harus dapat direncanakan untuk disediakan secara cepat dan tepat untuk pemenuhannya. Untuk kondisi ini, menurut penulis langkah yang dapat dilakukan oleh sekolah-sekolah inklusif tersebut adalah menyediakan atau memberdayakan *resource centre* pendidikan inklusif di sekolah. Melalui *resource centre* inilah sekolah-sekolah tersebut dapat menjalin dan merancang mekanisme kerja sama yang lebih intensif dan efisien, tidak hanya dengan sekolah luar biasa (SLB) terdekat tapi beberapa SLB lainnya sesuai kebutuhan yang dapat melengkapi daya dukung sekolah tersebut. Bahkan bila diperlukan kerja sama yang intensif tersebut dapat juga dilakukan dengan pihak-pihak lain di luar sekolah seperti Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Rumah Sakit/Puskesmas, Tenaga Terapis dan lain-lain.

5.3. Penyesuaian Pada Proses Pembelajaran Di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia pendidikan berkembang begitu pesat, termasuk dalam hal kebijakan, prosedur, kurikulum, metode pembelajaran, penggunaan sarana dan prasarana sampai dengan output yang akan dihasilkan dan lain-lain. Terkait dengan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah tersebut dilakukan penyesuaian di bidang pembelajaran dimulai dari proses penerimaan siswa baru, proses belajar mengajar dan proses penilaian hasil belajar siswa dan juga penyesuaian pada kesediaan sarana belajar yang aksesable bagi anak berkebutuhan

khusus. Kondisi yang ada saat ini di sekolah inklusif menggunakan kurikulum, standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD), proses belajar mengajar maupun soal-soal ulangan atau ujian yang relatif masih sama dengan sekolah reguler lain pada umumnya. Namun demikian dalam mengakomodir anak berkebutuhan khusus yang memiliki karakteristik berbeda dari anak normal, sekolah melakukan penyesuaian-penyesuaian juga dalam hal tersebut. Berikut petikan wawancara dengan Kepala SDN 24 Kramat Jati, Ch Purwanti:

“Pada prinsipnya standar kompetensi dan kompetensi dasar dibuat sama, guru kelas masih berusaha anak berkebutuhan khusus mampu sama layanan materinya dengan reguler, walau tidak kami pungkiri terkadang perlu disesuaikan juga untuk beberapa kondisi. Secara umum bagi anak berkebutuhan khusus, untuk kelas satu, dua dan tiga target kami adalah membaca, menulis dan berhitung, sedangkan untuk kelas empat, lima dan enam, target kami adalah pemahaman siswa” (pembicaraan langsung 8 Pebruari 2010).

Langkah penyesuaian menjadi salah satu sebab proses belajar mengajar di sekolah-sekolah tersebut masih dapat berjalan dengan baik hingga saat ini, walaupun sekolah tersebut juga menangani anak berkebutuhan khusus. Langkah penyesuaian pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah inklusif sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nanan Isman Salman bahwa dalam prosedurnya, pendidikan inklusif tidak hanya membawa anak berkebutuhan khusus berada dalam kelas reguler setiap harinya, tetapi juga mendapat kurikulum dan pembelajaran yang fleksibel, lingkungan sekolah yang ramah dan mudah diadaptasi oleh semua anak, adanya guru yang ramah, adanya pusat sumber, serta terjalinnya kemitraan yang baik antara sekolah, guru, pemerintah instansi terkait, orang tua dan masyarakat (Salman 16). Apa yang disampaikan oleh Nanan Isman Salman ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh S. Nasution bahwa walaupun diketahui bahwa kelas sebenarnya heterogen, guru menganggap dan memperlakukan anak-anak seakan-akan kelas itu homogeny. Oleh sebab itu banyak kegagalan dan frustrasi yang dialami oleh anak-anak. Bagaimana pengaruhnya adalah pada rasa enggan belajar, benci terhadap pelajaran, merasa terpaksa, rasa rendah diri dan berbagai efek negatif lainnya. Ditambahkan oleh

beliau bahwa bila menginginkan agar seseorang mau belajar terus sepanjang hidupnya maka pelajaran di sekolah harus merupakan pengalaman yang menyenangkan bagi muridnya (Nasution 23).

Penerimaan siswa baru, terutama bagi anak berkebutuhan khusus diawali dengan proses identifikasi dan assesmen yang sedikit berbeda. Proses identifikasi dan assesmen kepada anak berkebutuhan khusus ini memang perlu dilakukan sekolah-sekolah tersebut untuk mengetahui kondisi fisik, mental, kecerdasan maupun kondisi psikologis anak dan untuk mengetahui sampai sejauh mana kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh seorang anak sehingga dapat diketahui kebutuhan penyesuaian pada proses pembelajaran seperti apa yang perlu dilakukan untuk anak. Dengan alasan tersebut maka proses identifikasi dan assesmen merupakan tahapan awal yang cukup penting dalam proses pembelajaran di sekolah inklusif tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut sebaiknya proses identifikasi dan assesmen itu senantiasa dapat dilakukan oleh tenaga ahli yang sudah berkompeten seperti tenaga psikolog atau tenaga medis dengan harapan hasil identifikasi dan assesmen tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun secara moral.

Pada suatu waktu memang sekolah pernah melakukan kerja sama dengan beberapa tenaga ahli dalam proses identifikasi tersebut, seperti misalnya tenaga ahli bidang psikologi untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak berkebutuhan khusus. Namun demikian program kerja sama ini sepertinya tidak dapat berjalan berkesinambungan karena keterbatasan yang dihadapi oleh sekolah. Kondisi yang ditemukan di sekolah dalam melakukan proses identifikasi cukup bervariasi. SDN 02 Lebak Bulus dan SDN 24 Kramat Jati memberdayakan GPK yang memiliki latar belakang pendidikan khusus untuk proses identifikasi dan assesmen tersebut. SDN 06 Lebak Bulus proses identifikasi dan assesmennya dengan cara meminta orang tua untuk membawa surat komendasi dari tenaga ahli yang berkompeten yang berisi kondisi anak berkebutuhan khusus tersebut. Berikut petikan wawancara dengan kepala SDN 06 Lebak Bulus, Tumiyem:

“....Anak yang akan mendaftar ke sini kami sarankan untuk dilengkapi hasil identifikasi atau rekomendasi dari tenaga ahli sehingga dapat kami

pelajari kondisi anak tersebut sebelum kami menerimanya” (pembicaraan langsung 2 Pebruari 2010).

Dengan segala keterbatasan yang dihadapi, memang sampai dengan saat ini proses penerimaan siswa berkebutuhan khusus masih dapat berjalan. Namun demikian dikhawatirkan dikemudian hari dapat terjadi kesalahan diagnosa atau analisa terhadap anak berkebutuhan khusus tersebut sehingga pemenuhan kebutuhan pembelajaran bagi mereka menjadi tidak optimal. Untuk itu mekanisme kerja sama khususnya terkait dengan proses identifikasi dan assesmen ini perlu menjadi perhatian serius.

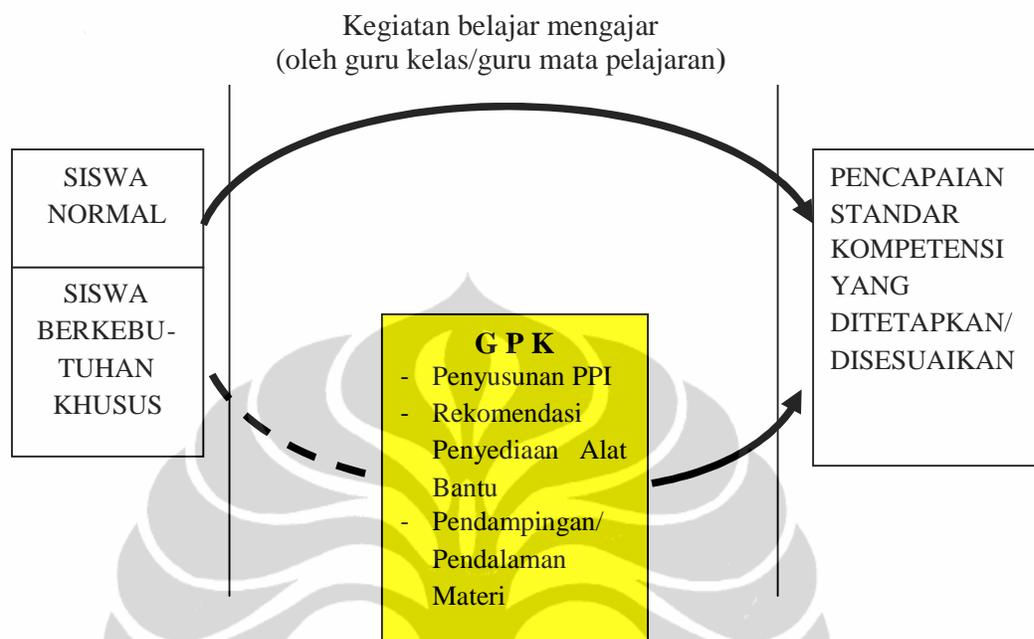
Demikian halnya dalam proses belajar mengajar di sekolah inklusif, dengan bertambahnya karakteristik siswa di kelas maka penyesuaian-penyesuaian dalam hal tersebut perlu juga dilakukan. Berkenaan dengan hal tersebut sekolah-sekolah perlu menggali penyegaran-penyegaran atau pembaharuan-pembaharuan dalam memenuhi tuntutan kebutuhan yang terus berkembang tersebut. Konsep penyegaran atau pembaharuan ini cukup relevan bila dikaitkan dengan apa yang diutarakan oleh S Hood dan Hardi tentang pembaharuan dalam pendekatan pembelajaran dan pembaharuan dalam pemanfaatan teknologi informasi/komunikasi. Disebutkan bahwa terdapat dua aspek perubahan yang penting dalam rangka gerakan pembaharuan pendidikan. Pertama pembaharuan dalam pendekatan pembelajaran yang menyangkut esensi, materi dan metode pembelajaran. Aspek perubahan yang pertama ini terjadi karena pengaruh berbagai temuan/teori/konsep baru yang berkembang mengenai otak dan kecerdasan serta di picu oleh dinamika perubahan multidimensional dari lingkungan hidup dan kehidupan yang menuntut komitmen dan kemampuan yang lebih tinggi dari sumber daya manusia. Aspek perubahan yang kedua adalah pembaruan terkait pemanfaatan teknologi informasi /komunikasi yang sudah berkembang sedemikian canggih untuk menunjang tercapainya pembaruan strategi dan teknik pembelajaran (S Hood dan Hardi , 2008, h. 155).

Salah satu contoh penyesuaian yang dilakukan adalah penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) oleh Guru Kelas dan Program Pengajaran Individual (PPI) bagi anak berkebutuhan khusus yang disusun oleh GPK. Melalui RPP dan PPI ini pula dirancang penyederhanaan-penyederhanaan materi bahan

ajar, penyediaan alat bantu yang diperlukan, dan mekanisme pembelajaran yang sesuai bagi anak berkebutuhan khusus seperti misalnya pendampingan oleh GPK di dalam kelas, *shadow teacher* atau pendalaman materi khusus bagi siswa berkebutuhan khusus. Penyusunan PPI yang dilakukan oleh sekolah cukup relevan dengan apa yang disampaikan oleh Abdurahman sebagaimana dituangkan bahwa PPI umumnya dikembangkan oleh guru SLB yang bertugas di sekolah biasa. Isi dari PPI tentu menuntut kelengkapan fasilitas dan pengorganisasian yang tidak sederhana. Kegunaan PPI adalah menjamin bahwa setiap anak kesulitan belajar memiliki suatu program yang diindividualkan untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan kelas yang dimiliki mereka dan untuk mengkomunikasikan program tersebut kepada orang-orang yang berkepentingan dalam bentuk program tertulis. Program semacam ini diharapkan dapat membantu para guru untuk mengadaptasi program umum dan atau program khusus bagi anak berkesulitan belajar yang bertolak dari kekuatan, kelemahan dan minat anak.

Salah satu penyesuaian para proses belajar mengajar di sekolah inklusif adalah penyediaan dan pemberdayaan GPK untuk membantu proses layanan kepada anak berkebutuhan khusus. Dengan dukungan/pendampingan dari GPK itu siswa berkebutuhan khusus menjadi lebih siap dan dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar serta dapat mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dan atau yang telah disesuaikan (gambar 5.2)

Gambar 5.2. Peranan GPK dalam pembelajaran bagi ABK



Sumber : Gambar diolah oleh penulis dari berbagai sumber

Secara umum langkah penyesuaian pada aspek pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah-sekolah tersebut menurut penulis sudah sejalan dengan teori J. Winardi bahwa agar organisasi dapat bertahan dalam waktu yang cukup panjang maka diperlukan penggantian teknologi-teknologi kuno (usang) secara periodik dengan teknologi-teknologi yang dapat bertahan pada suatu lingkungan yang berkembang dimana teknologi-teknologi (kehidupan produk-produk, proses-proses, prinsip-prinsip, program-program, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur dan bahkan orang) yang digunakan dalam suatu organisasi tersebut memiliki umur yang terbatas.

Di samping itu, dalam memberikan layanan kepada siswa berkebutuhan khusus memang diperlukan gabungan dari beberapa layanan khusus yang saling bersinergi. Layanan dari guru kelas/guru mata pelajaran, GPK, dukungan orang tua siswa dan juga layanan dari tenaga terapis ataupun tenaga ahli lainnya secara bersama-sama sesuai dengan tugas, fungsi dan keahliannya masing-masing diharapkan dapat saling melengkapi sehingga layanan pendidikan bagi anak

berkebutuhan khusus di sekolah inklusif tersebut diharapkan dapat berjalan dengan baik. Konsep menggabungkan berbagai layanan khusus dalam rangka memberikan layanan yang terbaik kepada siswa berkebutuhan khusus ini sejalan dengan teori teknologi intensif yang dikemukakan oleh Thomson, bahwa teknologi intensif (*intensive technology*) merupakan kumpulan dari beberapa jenis pelayanan khusus, yang seluruhnya digabungkan untuk melayani klien.

5.4. Struktur Organisasi Dan Pengorganisasian Sumber Daya Manusia Dan Non Manusia Di Sekolah Inklusif

Salah satu kesamaan yang paling menonjol pada sekolah-sekolah tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah keberadaan GPK. Dari hasil penelitian, GPK ini memegang peranan sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. GPK dan Guru Kelas atau Guru Mata Pelajaran merupakan ujung tombak yang menterjemahkan kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif ke dalam bentuk teknis pelayanan pendidikan kepada siswa.

GPK ini merupakan satu-satunya unsur dari luar sekolah yang dimasukkan dalam struktur organisasi sekolah. Untuk itu dapat dikatakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang inklusif ini sekolah juga melakukan penyesuaian pada struktur organisasi yang ada. Penyesuaian struktur organisasi ini juga dapat dikatakan sebagai adaptasi sekolah terhadap kebutuhan layanan pendidikan yang terus berkembang ini. Penyesuaian struktur organisasi inipun dipandang cukup relevan dengan konsep struktur organisasi yang diungkapkan oleh James D. Thomson, dimana dikatakan bahwa konsep struktur organisasi harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Pendapat James Thompson ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh J. Winardi yang menyebutkan bahwa salah satu bentuk perubahan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam melakukan proses adaptasi adalah perubahan struktural yang meliputi kebijakan-kebijakan dan prosedur baru.

Dari hasil pengamatan di lapangan, sudah terjadi pembagian tugas antara GPK dengan Guru Kelas maupun Guru Mata Pelajaran tersebut. Sementara Guru Kelas bertanggungjawab menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), di

sisi lain GPK menyusun Program Pengajaran Individual (PPI). PPI merupakan bagian dari RPP yang berisi bagaimana penyesuaian-penyesuaian dari RPP dilakukan sehingga menjadi lebih aksesable bagi anak berkebutuhan khusus. PPI tersebut direncanakan dan disusun sesuai dengan kondisi masing-masing anak berkebutuhan khusus. Berikut petikan wawancara dengan GPK SDN 02 Lebak Bulus, Cucu:

“Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran dibuat umum, dibuat oleh guru kelas atau guru mata pelajaran. Saya memberikan rekomendasi bila diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian. Biasanya saya mempelajari bahan ajar yang diberikan oleh guru kelas, lalu membuat rencana pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus seperti ; mengidentifikasi kebutuhan alat bantu atau alat peraga atau fasilitas lain yang sekiranya diperlukan bagi anak berkebutuhan khusus sehingga ia dapat menerima pelajaran dengan lebih baik” (percakapan langsung 2 Pebruari 2010).

Dari sini dapat dilihat bahwa pelaksanaan pembelajaran di sekolah inklusif dapat berjalan baik bila terjadi sinergi yang baik pula antara Guru Kelas atau Guru Mata Pelajaran dengan GPK. Di satu sisi Guru Kelas atau Guru Mata Pelajaran dapat tetap fokus memberikan pembelajaran secara umum kepada seluruh siswa, di sisi lain GPK memberikan dukungan teknis kepada anak berkebutuhan khusus sehingga dapat menerima pelajaran dengan baik, tanpa harus mengganggu proses belajar mengajar secara keseluruhan.

Terkait dengan kondisi yang terjadi di lapangan ini penulis mencoba menggunakan teori James D. Thomson bahwa organisasi digambarkan sebagai inti teknis yang dikelilingi oleh sejumlah bagian peredam. Proses pembelajaran oleh Guru Kelas maupun Guru Mata Pelajaran dapat diasumsikan sebagai suatu inti teknis yang harus fokus menghasilkan output yang berkualitas dan bermutu, sementara GPK dapat diasumsikan sebagai salah satu peredam, yang dapat menetralsisir keadaan sehingga walaupun terdapat anak yang memiliki karakteristik berbeda, proses belajar mengajar tetap dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua.

Seluruh kepala sekolah yang menjadi informan sependapat bahwa keberhasilan penyelenggaraan sekolah inklusif tidak hanya ditentukan oleh kepala

sekolah saja. Kepala sekolah memerlukan dukungan dari banyak pihak seperti guru-guru yang menangani hal-hal yang bersifat lebih teknis, warga sekolah dan masyarakat terkait lainnya serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Tidak cukup sampai di situ, koordinasi dan kerja sama yang baik dari berbagai unsur tersebut juga sangat diperlukan agar penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik. Ini artinya bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ini akan melibatkan banyak elemen-elemen yang saling melengkapi. Keberadaan elemen-elemen tersebut serta adanya tugas dan tanggungjawab, pembagian kerja dan kerja sama antar elemen-elemen tersebut merupakan salah satu tanda telah terjadi suatu proses pengorganisasian dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hal ini sesuai dengan pendapat George R Terry tentang pengorganisasian yang diartikan sebagai tindakan untuk menghubungkan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas tertentu, pada lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Terkait dengan kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas mungkin perlu ditelaah lebih dalam lagi. Dari hasil wawancara diketiga sekolah menyiratkan bahwa guru-guru merasa ingin lebih diperhatikan lagi. Berikut petikan wawancara dengan Manager Program Inklusif SDN 24 Kramat Jati, Maruli:

“...bagi sekolah yang sudah melaksanakan pendidikan inklusif sekarang ini, hendaknya pemerintah memberi perhatian khusus guna memotivasi dengan memberi tunjangan khusus, dibandingkan dengan guru-guru sekolah reguler, dimana tingkat dan beban tugas sangat jauh berbeda”
(percakapan langsung 8 Pebruari 2010)

Masukan seperti ini merupakan hal yang wajar, bila dikaitkan dengan sistem kompensasi. Kompensasi ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Henry Fayol bahwa diperlukan imbalan yang sesuai untuk kerja (*service*) yang telah dilakukan (J Winardi, 2003, h. 23). Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada ketiga sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang menjadi objek penelitian ini, secara umum dapat dikatakan bahwa sekolah-sekolah tersebut telah melakukan langkah-langkah positif yang sesuai dengan kaidah-kaidah pengorganisasian sumber daya. Bila kmengacu pada ada teori pengorganisasian

sumber-sumber daya yang diungkapkan oleh Henry Fayol, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Terkait persiapan rencana dan pelaksanaan operasi secara cermat, pada prinsipnya ketiga sekolah tersebut telah memulai pelaksanaan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus tersebut dengan perencanaan. Walaupun dari hasil analisa yang ada, dikarenakan keterbatasan yang dihadapi dalam pelaksanaannya terkadang belum dapat berjalan optimal, seperti misalnya pada proses identifikasi dan assesmen bagi anak berkebutuhan khusus yang kadang terpaksa dilakukan tanpa pendampingan tenaga ahli.
- b) Cukup jelas tampak bahwa bahwa sekolah-sekolah tersebut telah melakukan pengorganisasian akan faset-faset manusia dan material yang ada dalam memberikan layanan kepada anak berkebutuhan tersebut. Seperti misalnya mengangkat dan memberdayakan GPK dalam penyusunan program pembelajaran individual dan sekaligus memberikan pendampingan teknis kepada siswa berkebutuhan khusus, menetapkan tugas dan tanggungjawab antara Guru Kelas atau Guru Mata Pelajaran dan GPK serta membuat pola dan mekanisme kerja sama diantara mereka. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana sekolah mengusahakan semaksimal mungkin adanya kerja sama dengan pihak terkait lainnya seperti pihak universitas, tim medis maupun tenaga terapis. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sekolah menjaling kerja sama dengan orang tua siswa, karena tidak dapat dipungkiri dukungan moril orang tua siswa kepada anaknya juga dapat memberikan kontribusi positif dalam proses pembelajaran kepada siswa berkebutuhan khusus tersebut.
- c) Peran kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi dan pengambil kebijakan di sekolah terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini sudah sangat baik. Kepala sekolah di ketiga sekolah tersebut dipandang cukup berhasil dalam mengatasi segala keterbatasan yang ada. Pengambilan kebijakan untuk siap menerima anak berkebutuhan khusus merupakan langkah awal untuk selanjutnya memulai pembinaan secara bertahap dan berkesinambungan kepada seluruh warga sekolah terkait melalui sosialisasi, baik yang bersifat formal maupun non formal. Dari kondisi yang ada di lapangan, dalam setiap

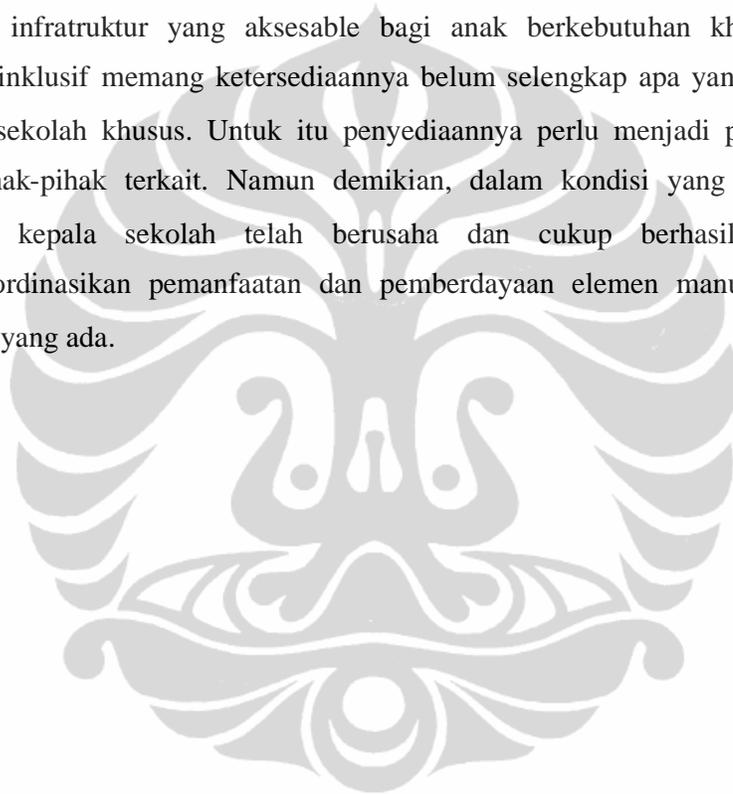
kesempatan yang ada kepala sekolah berusaha mengikutsertakan guru-guru pada program pelatihan terkait dengan pengembangan pendidikan inklusif.

- d) Terkait dengan koordinasi semua kegiatan yang perlu dilakukan pada prinsipnya pelaksanaan pendidikan inklusif di ketiga sekolah tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dan kerja sama antar seluruh unsur atau komponen terkait. Masing-masing memiliki tugas dan fungsi untuk kemudian saling mengisi dan melengkapi.
- e) Rumusan keputusan-keputusan yang jelas dan tepat juga sudah semaksimal mungkin dilakukan oleh kepala sekolah dengan meminta masukan dari para guru yang terkait. Misalnya dalam hal memutuskan untuk menerima anak berkebutuhan khusus, kepala sekolah kerap meminta masukan dari Guru Kelas atau Guru Mata Pelajaran dan GPK, bila ternyata dari rekomendasi mereka sekolah dinyatakan tidak siap maka dengan terpaksa sekolah tidak dapat menerima anak tersebut. Keputusan ini dipandang tepat karena, sekolah inklusif selama ini masih berjalan dalam kondisi yang boleh dikatakan belum sempurna, sehingga bilapun akhirnya harus dipaksakan, dikhawatirkan pembinaan yang diberikan kepada siswa berkebutuhan khusus bersangkutan menjadi tidak optimal.
- f) Bila berbicara terkait dengan kompetensi dan penempatan karyawan, memang tidak dapat dipungkiri, kondisi yang ada di lapangan adalah, jumlah karyawan yang berkompeten untuk terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut masih belum memadai. Karena keterbatasan yang dihadapi, dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sampai dengan saat ini sekolah tidak banyak melakukan pengangkatan pegawai/staff baru dan lebih memilih untuk memberdayakan guru-guru yang ada. Di sisi lain, guru-guru sekolah reguler umumnya tidak memiliki latar belakang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, sehingga diperlukan pelatihan dan pembinaan kepada mereka secara berkesinambungan. Adapun pelatihan dan pembinaan yang dilakukan kepada para guru tersebut kuantitas dan kualitasnya masih belum memadai. Di samping itu umumnya para guru di sekolah reguler telah memiliki tugas dan tanggungjawab yang cukup besar dalam penyelenggaraan

proses belajar mengajar di kelas secara umum, sehingga bila penanganan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus sepenuhnya diserahkan kepada mereka tentu akan menghadapi kendala. Sementara itu GPK yang dipandang sebagai orang yang paling mengerti tentang anak berkebutuhan khusus jumlahnya juga belum memadai. Karena keterbatasan itulah maka kondisi yang ada saat ini adalah sekolah akan menerima anak berkebutuhan khusus dengan jenis kebutuhan khusus atau kecacatan sesuai bidang, latar belakang atau pengalaman dari GPK yang ada. Untuk itu ada baiknya bila sekolah mendapat dukungan untuk dapat menyediakan GPK dalam kuantitas maupun kualitas yang memadai sehingga perluasan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan dengan berbagai jenis kebutuhan atau kecacatan dapat lebih ditingkatkan lagi.

- g) Imbalan yang sesuai dengan servis yang diberikan tentu dalam hal ini belum dapat diterapkan secara sempurna. Berkenaan dengan beban tugas dan tanggungjawab yang cukup berat, beberapa guru berhadapan dengan perhatian yang lebih bagi mereka yang terlibat secara aktif pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah mereka.
- h) Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa komponen terkait, termasuk dengan kepala sekolah, tersirat bahwa kepala sekolah telah berusaha semaksimal mungkin menyamakan persepsi para guru dan warga sekolah lainnya untuk dapat menerima dan bersama-sama dengan penuh disiplin dan konsisten serta satu tujuan untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan inklusif yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Langkah-langkah penyamaan persepsi tersebut dilakukan melalui proses musyawarah, pertemuan formal maupun non formal di sekolah ataupun di luar sekolah. Keberhasilan sekolah dalam penyamaan persepsi tersebut dapat dilihat dari terlaksananya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus lebih di ketiga sekolah tersebut sampai dengan saat ini. Terlaksananya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak akan berjalan tanpa ada dukungan dan kerjasama dari pihak-pihak terkait lainnya.
- i) Elemen organisasi yang paling menonjol dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di ketiga sekolah tersebut adalah elemen

manusia. Dengan kemampuannya untuk bertindak, mempengaruhi orang lain dan memanfaatkan konsep-konsep, selanjutnya elemen-elemen manusia yang terlibat di sekolah tersebut secara bersama-sama telah membuat penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dapat berjalan hingga saat ini. Selain elemen manusia, tentu keberhasilan penyelenggaraan harus didukung dengan sarana, prasarana maupun infrastruktur yang memadai. Walaupun telah ada, namun terkait dengan sarana dan prasarana, maupun infrastruktur yang aksesable bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif memang ketersediaannya belum selengkap apa yang ada di sekolah-sekolah khusus. Untuk itu penyediaannya perlu menjadi perhatian oleh pihak-pihak terkait. Namun demikian, dalam kondisi yang terbatas tersebut kepala sekolah telah berusaha dan cukup berhasil dalam mengkoordinasikan pemanfaatan dan pemberdayaan elemen manusia dan material yang ada.



Tabel 5.1. Intisari Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Sekolah-Sekolah Yang Menjadi Riset Penelitian

No	Komponen yang dianalisa	SDN 02 Lebak Bulus	SDN 06 Lebak Bulus	SDN 24 Kramat Jati
1	Tujuan Bersama	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala sekolah, guru-guru dan orang tua murid telah memahami, dapat menerima dan bersedia mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 02 Lebak Bulus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala sekolah dan sebagian besar guru serta orang tua siswa telah memiliki komitmen yang sama untuk mendukung dan berkontribusi pada penyelenggaraan pendidikan yang inklusif di SDN 06 Lebak Bulus 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar warga sekolah dapat memahami keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut dan mendukung penyelenggaraan pendidikan yang inklusif bagi semua.
2	Sumberdaya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Walaupun mutlak memerlukan dukungan dan kerjasama dengan kepala sekolah dan guru-guru lainnya, namun secara teknis pada pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus GPK memegang peranan sangat penting. 	<ul style="list-style-type: none"> • Salah satu kekuatan sekolah ini dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah keterbukaan, dukungan dan kerjasama orang tua dari anak berkebutuhan khusus dengan pihak sekolah. 	<ul style="list-style-type: none"> • GPK memegang peranan penting dalam hal teknis layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Walaupun kerja sama dan koordinasi dengan sumber daya manusia lainnya sangat diperlukan.

3	Penyesuaian Proses Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian kurikulum dan penyesuaian materi bahan ajar (dengan mempertimbangkan keterbatasan yang dialami oleh anak tunanetra) • Penggunaan alat bantu pendidikan bagi anak tunanetra (buku-buku Braille, alat tulis braille, serta alat peraga pendidikan lainnya bila diperlukan). • Pendampingan langsung oleh GPK di dalam kelas atau pendalaman materi di ruang khusus (bila diperlukan). 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian kurikulum dan penyesuaian materi bahan ajar (dengan mempertimbangkan keterbatasan yang dialami anak autis). • Pendampingan langsung oleh GPK di dalam kelas (GPK memiliki jadwal pendampingan di kelas). • Pendalaman materi kepada siswa autis selepas jam belajar di kelas. • Mengembangkan bakat non akademis siswa berkebutuhan khusus. • Menurunkan standar nilai ujian dan standar nilai kelulusan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian kurikulum dan penyesuaian materi bahan ajar (mempertimbangkan keterbatasan yang dialami anak dengan kebutuhan khusus ganda (kesulitan komunikasi dan kesulitan mendengar). • Pendampingan langsung oleh GPK di dalam kelas. • Menarik siswa di ruang khusus untuk memberikan pendalaman materi (GPK membuat jadwal pendalaman materi). • Menurunkan standar nilai ujian dan standar nilai kelulusan.
4	Organisasi dan Pengorganisasian SDM dan Sumber Daya Non Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian struktur organisasi ditunjukkan dengan keberadaan GPK. • Membagi tugas dan menjaga terbinanya kerjasama antara GPK dan Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran. • Menyediakan alat bantu pembelajaran bagi anak tunanetra seperti buku Braille, alat tulis Braille, alat peraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian struktur organisasi ditunjukkan dengan keberadaan GPK. • Membagi tugas dan menjaga terbinanya kerjasama antara GPK dan Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran. • Mengoptimalkan kerja sama dan komunikasi dengan orang tua (Atas inisiatif sendiri, beberapa orang tua membawa 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian struktur organisasi ditunjukkan dengan keberadaan GPK dan mengangkat seorang manager program inklusif. • Membagi tugas dan menjaga terbinanya kerjasama antara Manager Program Pendidikan Inklusif, GPK dan Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran.

		<p>dan lain-lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjalinkan kerjasama dengan SLBN A Pembina Lebak Bulus dalam hal penyediaan GPK dan sarana dan prasarana pembelajaran bagi anak tunanetra. Sekolah inipun pernah menjalin kerjasama dengan Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia dalam hal analisa kecerdasan dan emosional siswa. 	<p>anaknyake tenaga ahli terapis. Walaupun sekolah tidak dapat memfasilitasi secara langsung namun melalui orang tua siswa dimaksud sekolah mendapat informasi tambahan tentang kondisi atau perkembangan anak tersebut).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalinkan kerjasama dengan SLBN 7 Matraman, terutama dalam hal penyediaan GPK serta proses bedah SKKD, penyusunan dan penyesuaian silabus sekolah, penyusunan PPI hingga modifikasi indikator baru untuk siswa kelas I. • Mengoptimalkan pemberdayaan sarana dan prasarana yang dimiliki (misalnya : mengembangkan pendidikan berbasis IT termasuk kepada siswa berkebutuhan khusus, memanfaatkan alat terapis yang dimiliki, dan lain-lain). • Sekolah ini termasuk memiliki jaringan dan wawasan yang luas, selain pernah dan masih mendapat binaan dari Helen Keler Internasional, sekolah inipun kerap melakukan kerjasama atau mendapat pendampingan dari beberapa perguruan tinggi.
--	--	---	---	---

Sumber : Tabel diolah oleh penulis dari Schein, Reece, Fayol, Abdurahman, Shapon-Shevin, E Kemp.

Hasil analisa menyiratkan bahwa ketiga sekolah tersebut telah melakukan perubahan-perubahan pada beberapa aspek yang diperlukan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang inklusif di sekolah masing-masing dengan tujuan satu yang sama yaitu penyelenggaraan pendidikan yang inklusif untuk semua.

Bila mengacu pada tipologi instruktif perubahan keorganisasian yang dikembangkan oleh David A Nadler dan Michael L Thusman, maka perubahan-perubahan yang dilakukan oleh sekolah tersebut dapat dikategorikan perubahan reaktif. Hal ini disebabkan karena perubahan tersebut merupakan perubahan yang harus dilakukan oleh pihak sekolah karena adanya kejadian-kejadian atau tuntutan kebutuhan dari lingkungan yang memang semula belum pernah dialami atau terbayangkan dalam konteks penyelenggaraan sekolah reguler pada umumnya. Dan dapat dikatakan pula bahwa perubahan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah tersebut merupakan perubahan yang direncanakan (*planned change*) sebagaimana yang dirumuskan oleh Stephen Robin. Terdapat dua tujuan dari perubahan yang direncanakan tersebut yaitu untuk memperbaiki kemampuan organisasi yang ada sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan dan untuk mengubah perilaku karyawan (anggota organisasi). Di satu sisi sekolah harus meningkatkan kemampuannya dalam berbagai aspek sehingga siap dan mampu memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus, di sisi lain kesadaran dan pemahaman dari seluruh warga sekolah terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang inklusif senantiasa harus selalu dibina dan dikembangkan.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Terdapat sejumlah faktor organisasi yang diteliti pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di SDN 02 Lebak Bulus, SDN 06 Lebak Bulus dan SDN 24 Kramat Jati, antara lain; adanya tujuan bersama, sumber daya manusia yang memadai, struktur organisasi, teknologi, pembagian tugas dan sistem koordinasi. Di samping itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana penyesuaian proses belajar mengajar yang dilakukan di ketiga sekolah tersebut.

Berjalannya pendidikan inklusi di sekolah tersebut menjadi salah satu petunjuk bahwa pada ketiga sekolah tersebut telah berhasil menjadikan penyelenggaraan pendidikan inklusi sebagai tujuan bersama sekolah. Dari sejumlah faktor organisasi tersebut di atas, sumber daya manusia merupakan faktor yang memiliki pengaruh paling besar. Tidak terdapat perubahan struktur organisasi secara signifikan pada ketiga sekolah, kecuali keberadaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan atau Manager Program Inklusif.

Pada ketiga sekolah tersebut sudah tampak adanya penyesuaian-penyesuaian pada proses belajara mengajar seta penggunaan atau penerapan teknologi-teknologi (kehidupan produk-produk, proses-proses, prinsip-prinsip, program-program, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, sarana dan prasarana, dll). Terkait dengan pemberian layanan pendidikan kepada siswa cacat, pada ketiga sekolah sudah terjadi pembagian tugas, sistem koordinasi dan kerjasama diantara sumber-sumber daya yang ada, walaupun kuantitas maupun kualitasnya masih perlu ditingkatkan lagi.

6.2. Saran

Sekolah reguler yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusi seyogyanya memiliki faktor-faktor organisasi yang kuat yang dapat mendukung terjadinya perubahan. Faktor-faktor organisasi tersebut antara lain; tujuan bersama, sumber daya manusia yang memadai, struktur organisasi, teknologi, pembagian tugas dan sistem koordinasi. Tidak dapat dipungkiri, sekolah reguler perlu melakukan perubahan, di mana sebaiknya perubahan dilakukan secara bertahap

dan berkesinambungan. Demikian halnya dengan faktor-faktor atau elemen-elemen organisasi tersebut di atas, kondisinya harus disesuaikan dengan arah perubahan yang ingin dicapai tersebut.

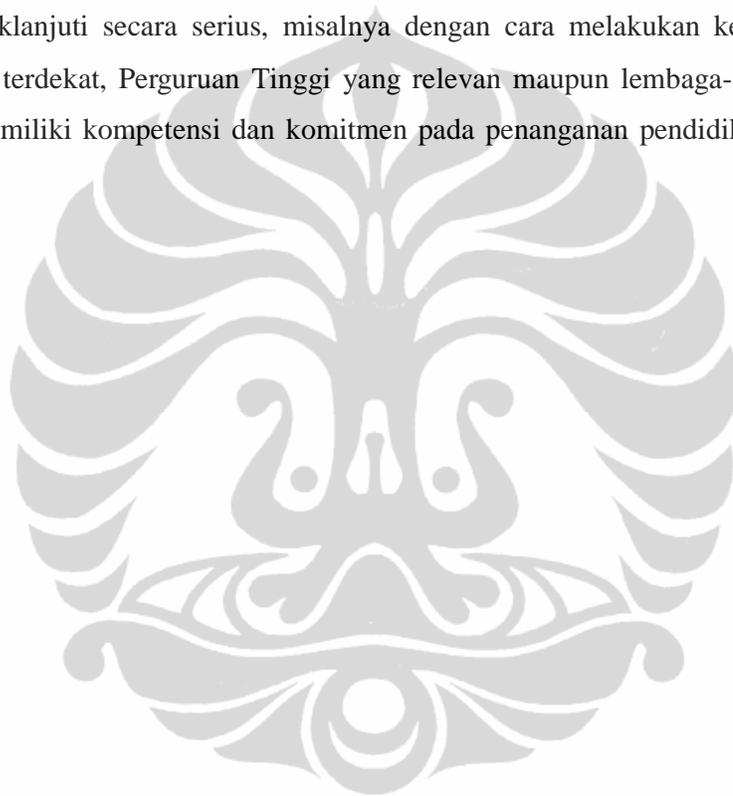
Kebijakan untuk menerima anak cacat di sekolah reguler sejak awal seyoginya ditanamkan untuk menjadi tujuan bersama, hal sangat diperlukan agar dalam proses-proses selanjutnya mendapat dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Proses sosialisasi kebijakan ini hingga dapat menjadi tujuan bersama perlu dilakukan secara berkesinambungan sehingga kesadaran warga sekolah khususnya dan masyarakat pada umumnya akan hak pendidikan bagi anak cacat dapat terus ditingkatkan secara kuantitas maupun kualitas. Dalam lingkup sekolah, di samping melakukan pertemuan-pertemuan rutin, sosialisasi dapat juga dilakukan misalnya dengan melakukan acara bersama antara kepala sekolah, guru, orang tua dan juga masyarakat termasuk siswa-siswa normal dan berkebutuhan khusus untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa saling menghargai.

Penguatan pada sumber daya manusia perlu selalu ditingkatkan guna peningkatan mutu layanan pendidikan inklusi, baik terkait perilaku dan cara pandang maupun kompetensi yang relevan pada penyelenggaraan pendidikan inklusi. Penguatan elemen sumber daya manusia tersebut sekolah dapat dilakukan dengan cara melakukan pelatihan atau diseminasi secara berkesinambungan kepada guru-guru yang terlibat ataupun dengan penyediaan GPK yang memadai. Dukungan dan peranan pemerintah dan pihak lain yang peduli pada penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat diperlukan misalnya dengan menugaskan atau mengangkat guru-guru dengan latar belakang pendidikan khusus untuk menjadi GPK di sekolah-sekolah inklusif. Terkait dengan terbatasnya jumlah sarjana atau lulusan dari jurusan pendidikan luar biasa (PLB) maupun terbatasnya jumlah guru dengan latar belakang pendidikan khusus (latar belakang PLB) maka penyelenggaraan program-program pelatihan jangka pendek dan atau jangka menengah bagi sumber daya manusia yang akan disiapkan menjadi GPK dapat juga dijadikan salah satu alternatif.

Pembagian tugas yang jelas dan terfokus pada masing-masing sumber daya manusia di sekolah, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, perlu direncanakan, dilaksanakan dan dipelihara dengan baik. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga

kualitas layanan pendidikan yang diberikan, baik untuk anak normal maupun untuk anak cacat.

Terkait dengan proses pembelajaran untuk lingkungan kelas yang terdiri dari berbagai kondisi dan karakter anak, maka sekolah perlu menggunakan metode-metode yang sesuai dan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya bagi anak cacat. Keterbatasan metode pembelajaran, sarana dan prasarana yang aksesable bagi anak cacat yang dihadapi oleh sekolah reguler perlu ditindaklanjuti secara serius, misalnya dengan cara melakukan kerjasama dengan SLB terdekat, Perguruan Tinggi yang relevan maupun lembaga-lembaga lain yang memiliki kompetensi dan komitmen pada penanganan pendidikan bagi anak cacat.



DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Nata, Abudin. (2003). *Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Fathoni, Abdurrahman. (2006). *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Salim, Agus. (2001). *Organisasi dan Paradigma Penelitian (dari Denzin Guba dan penerapannya)*.
- Etzioni, Amitai. (1985). *Organisasi-organisasi Modern*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Harefa, Andrias. (2001). *Pembelajaran di Era Serba Otonom*. Jakarta: Kompas
- Capon, Claire. (2000). *Understanding Organisational Context*. Edinburg: Pearson Education Limited.
- Emery, Fred, E., & Trist, L., Eric, L. (1985). "The Causal Texture of Organizational Environment", *Human Relation* 18.
- Fink, Jenks and Willits. (1983). *Designing and Managing Organizations*. Illinois: Richard Dirwin, Inc.
- J Buckley, SJ Francis. (2000). *Team Teaching, What, Why, and How*. California: Sage Publication, Inc.
- Borich, D., Gary. (1995). *Becoming A Teacher, an Inquiring Dialogue for The Beginning Teacher*. London: The Falmer Press.
- Yukl, Gary. (1977). *Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Jakarta: Prenhallindo.
- Gibson, Donnelly, Ivancevich. (1977). *Organizations, Behavior, Structure, Process*. USA: Times Mirror Higher Education Group.
- Hood, S., Hardi dan Hardi, Keostrinie. (2008). *Untuk Apa Sekolah*. Batam: Milaz Grafika.
- Hopkins, David. (2007). *Every School a Great School, Realizing the Potential of System Leadership*. London: Open University Press.
- Illich, Ivan. (2000). *Bebaskan Masyarakat Dari Belenggu Sekolah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- J., Winardi. (2003). *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- *Manajemen Prilaku Organisasi*. Jakarta: Kencana Media Group, 2004
- James, R., Evans. (1994). *Berpikir Kreatif Dalam Pengambilan Keputusan dan Manejemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- James, J, Cribbin. *Kepemimpinan, Mengefektifkan Strategi Organisasi*. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1990
- Muhammad, K., A, Jamila. (2008). *Special Education for Special Children*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Greenberg, Jerald, and A., Baron, Robert. (2003). *Behavior in Organizations, Eight Edition*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- E., Kemp, Jerrold. (1994). *Proses Perancangan Pengajaran*. Bandung: ITB Bandung.
- Bailey, John, Schermehorn, Hunt, James, Osborn, Richard. (1991). *Managing Organization Behavior*. Singapore: John Wiley and Sons.
- Hoogendorn, J., (1989). *Memberikan Pimpinan dengan Kerjasama, Merencanakan dan Melaksanakan Program Perkembangan Manajemen*. Jakarta: UI Press.
- Sastradipoera, Komarudin. (2006). *Pengembangan dan Pelatihan Suatu Pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Kappa-Sigma Bandung.
- Buchori, Mochtar. (1995). *Transformasi Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Abdurahman, Mulyono. (2003). *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Hamalik, Oemar. (1999). *Kurikulum dan Pengembangan*. Jakarta: PT. Bumi Aksarana.
- Sydanmaanlakka, Penntti. (2002). *An Intelegent Organization*. Oxford: Capstone Publishing Limited.
- Lawrence, R., Paul, Lorsch, W. Jay. (1969). *Organizational and Environment*. Irwin.

- Huseini, Martani, Lubis, S., B., Hari. (1987). *Teori Organisasi (suatu pendekatan makro)*, Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Schermehorn, Hunt, James, Osborn, Richard. (2003). *Organizational Behavior*, Eight Edition. New York: John Wiley and Sons.
- S Nasution. (2000). *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Davis, M., Starley, Lawrence, R., Paul. (1977). *Matriks*, Addison-Wesley.
- Arikunto, Suharsini, Safrudin, Cepi, dan Jabar, Abdul. (2004). *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis Praktis bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Musfiroh, Takdiroatun.(2008). *Cerdas Melalui Bermain: Cara Mengasah Multiple Intellegences Pada Anak Usia Dini*. Jakarta: PT Grasindo.
- Handoko, T., Hani. (1994). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Tilstone, Christina, et.al. (2000). *Pupils With Learning Difficulties in Mainstream Schools*. London: David Fulton Publishers.
- Sekaran, Uma. (1995). *Organisational Behavior, Text and Cases*. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited.
- Neuman, W., Lawrence. (2006). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach (Sixth Edition)*, New York: Pearson Education, Inc.
- Scott, W., Likert Rensis dan Carto, Jr., Rocco, Brown, Wilfred, Living, Stone, Leslie, John. (1992). *Struktur Organisasi dan Dinamika*. Semarang: Effnar dan Dahara Prize.

JURNAL, MAJALAH

- Salman, Nanan, Isman. (2008, April). Mencari Sekolah Yang Tepat Bagi ABK. *Special Need Magazine*, 10-23.
- Grainer, Larry, E. (1972, July-August). Evolution and revolution as Organization Grow. *Jarvard Bisomess Review*, 50.
- Paulson, Steven, K. (1974). Causal Analysis of Interorganizational Relations: An Axiomatic Theory Revised. *Administrative Science Quaterly*. 19.

PEDOMAN

UNICEF. (2005). *Ensuring Access to Education for All*.

UNICEF. (2002). *Implementation Handbook for Convention on The Rights of The Child*.

Direktorat Pembinaan SLB. (2005). *Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu/Inklusif*. Jakarta: Penulis.

UNICEF. (2001). *Understanding and Responding to Children's Needs in Inclusive Classrooms*.

PERUNDANG-UNDANGAN

Departemen Pendidikan Nasional. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*.

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. (2007). *Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, No. 116 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*.

Undang-undang Dasar 1945 (amandemen).

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Universal Declaration of Human Right, 1948.

Salamanca Statement and Framework for Action on Special Need Education, 1994.

ON LINE

Akhmad Sudrajat, (2009). Manajemen Sekolah: Pengertian, Fungsi dan Bidang Manajemen. Artikel: <http://herryanto.com/index.php/pendidikan/39-artikel/49-11-karakteristik-manajemen-sekolah>.

HASIL PENELITIAN

Herpatiwi. (2007). *Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar X Propinsi Lampung*, Jakarta: Program Pasca Sarjana UNJ.

MaryAnn & Byrnes, (2002). *Taking Sides Clashing Views on Controversial Issues in Special Education*. USA, Mc Grow Hill.



Universitas Indonesia

Faktor-faktor organisasi..., Aswin Wihdiyanto, FISIP UI, 2010.

TRANSKRIP WAWANCARA
PENELITIAN DI SDN 02 LEBAK BULUS JAKARTA SELATAN

INFORMAN : GURU KEPALA SEKOLAH
NAMA : Drs. ALEX DJUMIDI
NIP : 470029149

Peneliti :

“Boleh tau pak, pandangan Bapak tentang sekolah inklusif ?”

Kepala Sekolah :

“Menurut pandangan saya, SD Inklusif adalah SD reguler biasa yang didalamnya terdapat siswa/siswi yang berkebutuhan khusus/pelayanan khusus”.

Peneliti :

“Sejak kapan sekolah ini menjadi sekolah inklusif?”

Kepala Sekolah :

“Sekolah ini mulai menyelenggarakan pendidikan inklusif sejak tahun 1999. Tentunya dalam proses penetapan sekolah ini menjadi sekolah inklusif kami perlu melakukan musyawarah. Dalam musyawarah tersebut kami melibatkan banyak stake holder terkait di sekolah ini”.

Peneliti :

“Dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah ini adakah Bapak melakukan perubahan-perubahan atau penyesuaian-penyesuaian pada beberapa hal, misalnya visi dan misi sekolah, kurikulum, proses belajar mengajar dan lain-lain ?”

Kepala Sekolah :

“Sekolah kami belum atau tidak melakukan perubahan visi dan misi sekolah terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini karena sistem pembelajarannya dan evaluasinya masih sama, kurikulum yang digunakan juga sama, tenaga pengajarnya sama dan UASBN materinya juga sama”.

Peneliti :

“Bagaimana dengan struktur organisasi sekolah?”

Kepala Sekolah :

“Demikian halnya dengan struktur organisasi sekolah, pada prinsipnya kami juga tidak melakukan perubahan struktur organisasi sekolah”.

Peneliti :

“Bisa Bapak ceritakan tentang pengembangan program pendidikan inklusif di sekolah ini, misalnya bagaimana untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang?”

Kepala Sekolah :

“Pada prinsipnya kami tidak memiliki pengembangan program pendidikan inklusif secara khusus baik yang bersifat jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Hal ini terjadi karena SD kami adalah SD Negeri biasa yang program-programnya sama dengan SD reguler lainnya”.

Peneliti :

“Bagaimana dengan proses identifikasi untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah ini pak, siapa saja yang terlibat dan aspek apa yang diidentifikasi dari seorang siswa?”

Kepala Sekolah :

“Ya, dalam proses penerimaan siswa berkebutuhan khusus kami juga melakukan proses identifikasi. Dalam proses identifikasi terhadap siswa berkebutuhan khusus ini kami melibatkan guru-guru yang ada dan juga dari unsure Dinas. Guru-guru yang terlibat antara guru music, guru lukis dan guru pembimbing khusus (GPK). Hasil identifikasi tersebut mencakup kondisi fisik siswa, kebutuhan akan alat pembelajaran bagi siswa, pedoman pembelajaran bagi siswa dan data prestasi siswa”.

Peneliti :

“Dari hasil identifikasi itu, anak berkebutuhan khusus apa saja yang teridentifikasi pak?”

Kepala Sekolah :

“Dari proses identifikasi tersebut kami berhasil mendapatkan anak-anak dengan kondisi tunanetra, lambat belajar, malas bicara dan ada juga anak yang teridentifikasi tidak mau diam atau selalu usil”.

Peneliti :

“Bapak simpan hasil identifikasi itu?”

Kepala Sekolah :

“Betul, kami menyimpan hasil identifikasi tersebut. Hasil identifikasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk merencanakan program pembinaan bagi anak berkebutuhan khusus”.

Peneliti :

“Berapa anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sini dan dari jenis apa saja?”

Kepala Sekolah :

“Saat ini di sekolah kami terdapat dua orang anak tunanetra dan beberapa anak keterlambatan dalam belajar”.

Peneliti :

“Apakah ada anak berkebutuhan khusus yang berbeda jenisnya dalam satu kelas di sekolah ini?”

Kepala Sekolah :

“Sampai dengan saat ini boleh dikatakan dalam satu kelas itu tidak ada anak berkebutuhan khusus yang berbeda jenisnya”.

Peneliti :

“Adakah secara khusus sekolah membuat program pengajaran individual bagi tiap-tiap siswa berkebutuhan khusus yang ada di sekolah ini?”

Kepala Sekolah :

“Secara khusus sekolah tidak membuat program pembelajaran yang sifatnya individual bagi masing-masing siswa berkebutuhan khusus, namun memang dalam pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Kesulitan kami dalam penyusunan program pembelajaran individual apalagi untuk masing-masing anak berkebutuhan khusus karena kami tidak memiliki tenaga khusus, guru PNS yang terlibat juga kurang. Di samping itu belum ada diklat khusus untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus tersebut”.

Peneliti :

“Bagaimaa dengan kurikulum yang dikembangkan?”

Kepala sekolah :

“Demikian juga halnya dengan kurikulum, karena keterbatasan kemampuan SDM yang ada, secara khusus kami tidak melakukan perubahan pada kurikulum tersebut. Namun penyesuaian terhadap anak berkebutuhan khusus tetap diperlukan”.

Peneliti :

“Siapa saja yang terlibat dalam penyesuaian tersebut?”

Kepala Sekolah :

“Yang terlibat dalam penyesuaian kurikulum tersebut adalah guru dan guru pembimbing khusus atau guru kunjung”.

Peneliti :

“Bagaimana untuk standar kompetensi dan kompetensi yang dikembangkan bagi anak berkebutuhan khusus?”

Kepala Sekolah :

“Kami belum mampu memodifikasi SKKD khusus untuk anak berkebutuhan khusus, sehingga dalam memberikan layanan bagi anak berkebutuhan khusus tersebut secara umum kami masih menggunakan SKKD yang ada”.

Peneliti :

“Apakah materi pembelajaran yang diberikan sama untuk anak normal dengan anak berkebutuhan khusus?”

Kepala Sekolah :

“Materi pembelajaran yang digunakan pun pada prinsipnya tidak dibedakan antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus, walau kadang perlu juga dilakukan penyesuaian”.

Peneliti :

“Siapa saja yang terlibat dalam penyesuaian materi pembelajaran itu?”

Kepala Sekolah :

“karena memang kami belum menguasai betul bagaimana pembelajaran yang baik bagi anak berkebutuhan khusus. Belum ada diklat khusus untuk melakukan hal tersebut. Hingga saat ini penyesuaian pembelajaran dikoordinasikan dengan guru pembimbing khusus yang ada”.

Peneliti :

“Bisa dijelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus?”

Kepala Sekolah :

“Rencana pelaksanaan pembelajaran yang kami buat juga bersifat umum, untuk anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. Tidak kami pungkiri bahwa sampai saat ini kami hanya dapat membuat RPP SD reguler, untuk memodifikasinya bagi ABK kami masih mengalami kesulitan. Namun demikian terkadang memang diperlukan penyesuaian bagi ABK, dalam hal ini GPK mempunyai peranan yang cukup penting”.

Peneliti :

“Hal apa saja yang tertuang dalam rencana pembelajaran itu?”

Kepala Sekolah :

“Rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat antara lain mencakup waktu belajar, mekanisme belajar, tempat, sumber belajar, media atau alat bantu pembelajaran. Biasanya GPK akan menyesuaikan dengan anak-anak normal”.

Peneliti :

“Selain GPK adakah unsur lain yang terlibat dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran tadi?”

Kepala Sekolah :

“Guru, kepala sekolah dan kadang juga pengawas TK dan SD”.

Peneliti :

“Bagaimana dengan mekanisme belajar bagi anak berkebutuhan khusus, jika diperlukan penyesuaian, bisa Bapak memberikan sedikit penjelasan atau contoh?”

Kepala Sekolah :

“Untuk mekanisme belajar bagi anak berkebutuhan khusus memang kami melakukan penyesuaian-penyesuaian. Hal ini terkait keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing anak berkebutuhan khusus tersebut. Anak tunanetra, dalam pelajaran matematika misalnya, mereka terkadang harus dibantu oleh alat peraga seperti kubus, balok, bola, juring dan lain-lain”.

Peneliti :

“Menurut Bapak, dengan rencana dan pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah ini, apakah perlu ada perbedaan soal-soal bagi anak berkebutuhan khusus, misalnya untuk soal ulangan ataupun soal ujian?”

Kepala Sekolah :

“Dengan kurikulum, rencana pembelajaran dan mekanisme pembelajaran yang dirancang disekolah ini bagi ABK, pada prinsipnya soal-soal ulangan, soal ujian maupun soal ujian akhir untuk ABK tersebut dapat disamakan dengan soal-soal untuk anak-anak normal”.

Peneliti :

“Bagaimana peran GPK di sekolah ini, apakah mereka cukup membantu?”

Kepala Sekolah :

“Ya, GPK tersebut juga memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk ABK di sini. Kami beruntung karena GPK yang kami miliki itu memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, kebetulan dalam hal ini GPK tersebut memahami dan telah berpengalaman dalam menangani anak tunanetra, dan kami merasa sangat terbantu. GPK pun beberapa kali pernah mengikuti pelatihan tentang penanganan ABK di sekolah reguler yang diselenggarakan oleh pemerintah”.

Peneliti :

“Apakah jumlah mereka sudah mencukupi?”

Kepala Sekolah :

“Saya rasa jumlah GPK yang ada di sini masih kurang, karena selain anak tunanetra kami juga ada beberapa anak berkebutuhan khusus lainnya seperti yang telah disebutkan tadi. Sayangnya GPK tersebut tidak dapat setiap hari hadir di sekolah ini karena ia memiliki tugas sebagai GPK di beberapa sekolah lainnya”.

Peneliti :

“Bila melihat kondisi yang ada saat ini, apakah secara umum sumber daya yang ada di sekolah ini sudah cukup memadai untuk menangani anak berkebutuhan khusus?”

Kepala Sekolah :

“Menurut saya belum, saya sudah mengusulkan tenaga khusus atau narasumber atau konsultan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam kegiatan belajar mengajar khususnya bagi sekolah inklusif yang juga menampung anak berkebutuhan khusus. Di samping itu kami mengusulkan kepada Departemen ataupun Dinas Pendidikan terkait untuk menugaskan guru khusus tambahan di sekolah kami”.

Peneliti :

“Adakah quota khusus bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah ini?”

Kepala Sekolah :

“Ya, kami menyediakan quota khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Kebijakan kami yang telah berjalan hingga saat ini adalah, setiap kelas kita menerima satu siswa ABK dari 28 siswa yang kita terima”.

Peneliti :

“Adakah perhatian sekolah dalam pengembangan bakat anak berkebutuhan khusus yang bersifat non akademik misalnya?”

Kepala Sekolah :

“Tidak hanya dalam bidang akademis, bila siswa berkebutuhan khusus memiliki bakat yang bisa dikembangkan, kami pun akan memberikan perhatian ke sana”.

Peneliti :

“Apakah sekolah ini memiliki alat bantu yang sesuai bagi anak berkebutuhan khusus yang ada saat ini?”

Kepala Sekolah :

“Karena sekolah kami berdekatan dengan SLBN Pembina Lebak Bulus, ini memudahkan kami untuk mendapatkan beberapa alat bantu pendidikan yang sesuai bagi ABK”.

Peneliti :

“Apakah sekolah ini telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan aksesable bagi anak berkebutuhan khusus seperti misalnya ruang khusus atau ruang resource centre bagi anak berkebutuhan khusus?”

Kepala Sekolah :

“Namun demikian secara umum sarana dan prasarana yang ada di sini memang belum sepenuhnya aksesable bagi anak tunanetra yang ada. Kami pun belum memiliki ruang khusus bagi siswa berkebutuhan khusus dan kami pun belum memiliki resource room. Untuk itu kami mengusulkan kepada Depdiknas agar sekolah inklusif diberikan tenaga khusus dan dibangun ruang khusus serta sarana dan prasarana yang memadai”.

Peneliti :

“Adakah sekolah ini memiliki dana khusus untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif?”

Kepala Sekolah :

“Sekolah kami mendapat bantuan beasiswa sebesar lima puluh ribu rupiah per siswa per bulan selama satu tahun. Dana itu kami dapat dari pemerintah pusat”.

Peneliti :

“Adakah Bapak melakukan pertemuan internal dengan warga sekolah lainnya untuk sekaligus memantau pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah ini?”

Kepala Sekolah :

“Agar seluruh warga sekolah yang ada dapat memahami keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekolah ini, maka pada kesempatan tertentu kami juga melakukan sosialisasi secara internal kepada warga sekolah perihal penyelenggaraan pendidikan inklusif di sini. Ya, kami secara rutin memonitor perkembangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sini”.

Peneliti :

“Adakah kemitraan yang Bapak lakukan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, bisa disebutkan dengan siapa saja?”

Kepala Sekolah :

“Kemitraan yang paling menonjol di sini adalah dengan SLBN Lebak Bulus, kebetulan letaknya bersebelahan dengan sekolah kami. Kami memiliki keterbatasan dalam mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti misalnya tenaga psikolog, ataupun tim medis karena memang kami tidak memiliki dana khusus untuk itu”.

Peneliti :

“Apa saja yang Bapak dapat dari hasil kemitraan dengan pihak SLB tersebut?”

Kepala Sekolah :

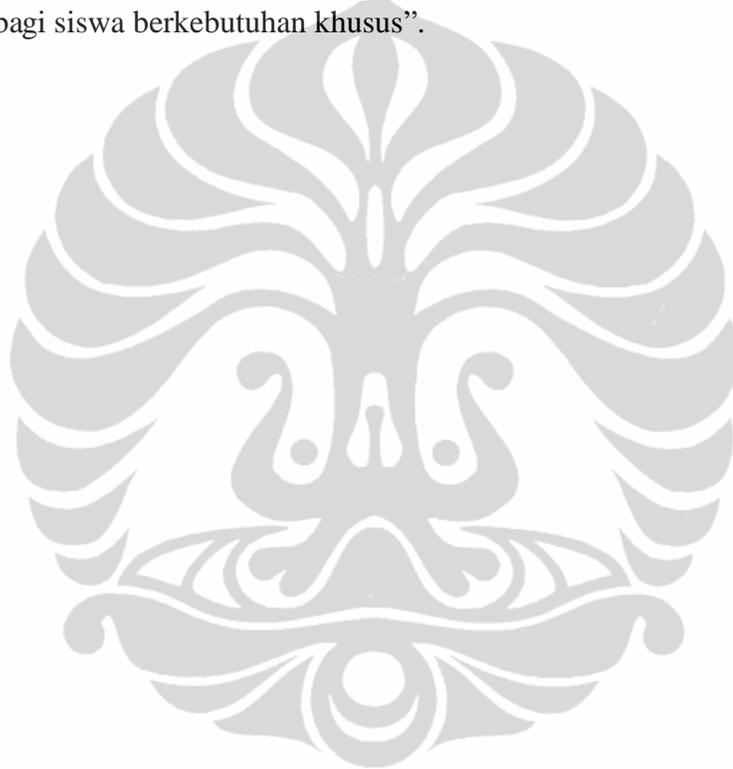
“Kami mendapatkan guru pembimbing khusus dari SLB tersebut, walaupun dalam satu minggu satu hari dia datang. Kerjasama lainnya dengan pihak SLB tersebut adalah kami mengikuti sertakan kegiatan-kegiatan bila ada lomba bagi anak-anak cacat”.

Peneliti :

“Pertanyaan terakhir, apa harapan dan saran Bapak untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif, khususnya di sekolah Bapak ini?”

Kepala Sekolah :

“Saya berharap dapat ditugaskan tenaga khusus untuk abk di sekolah inklusif ini. Di samping itu ketersediaan dana perlu juga menjadi perhatian, dan kami berharap ada dana khusus bagi siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif secara rutin dan besaran nominal tiap bulan yang sesuai. Yang tidak kalah pentingnya, agar pembelajaran dapat lebih terfokus adalah kami mohon dapat dibangun ruang khusus bagi siswa berkebutuhan khusus”.



TRANSKRIP WAWANCARA
PENELITIAN DI SDN 02 LEBAK BULUS JAKARTA SELATAN

INFORMAN : GURU PEMBIMBING KHUSUS (GPK)
NAMA : CUCU NURAENI
NIP : 131417109

Peneliti :

“Bagaimana pandangan Ibu tentang pendidikan yang inklusif?”

GPK :

“Pendidikan inklusif di sekolah reguler adalah suatu sistem layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler dimana sistem seyogyanya dapat menyesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus yang ada. Sejauh yang saya tahu, sekolah ini telah menjadi sekolah inklusif sejak tahun 1996”

Peneliti :

“Apakah Ibu terlibat secara aktif dalam pengembangan pendidikan yang inklusif di SDN 02 Lebak Bulus?”

GPK :

“Betul, saya memang ikut dalam proses pengembangan program pendidikan inklusif di sekolah ini terutama berkaitan dengan penyusunan program khusus seperti orientasi dan mobilitas Braille. Kebetulan sekolah ini memfokuskan pada anak berkebutuhan khusus tunanetra”.

Peneliti :

“Bagaimana untuk proses identifikasi dan atau assesmen bagi anak berkebutuhan khusus?”

GPK :

“Untuk proses identifikasi atau assesmen, saya terlibat terutama dalam hal assesmen fungsional”.

Peneliti :

“Selain itu apakah ada pihak lain yang terlibat dalam proses identifikasi bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah ini, dengan pihak psikolog atau tim medis misalnya?”

GPK :

“Walaupun tidak bersifat berkesinambungan, dalam proses identifikasi ini sekolah kami pernah melibatkan tenaga psikolog dan tim medis. Sekolah pernah melakukan kerjasama dengan fakultas psikologi Universitas Indonesia, jurusan psikologi pendidikan. Bentuknya berupa psikotest bagi anak berkebutuhan khusus, hasil dari test yang dilakukan tersebut memberikan rekomendasi tentang kondisi kecerdasan anak, bakat dan kemampuan, termasuk kondisi emosional anak. Hasil rekomendasi tersebut menjadi salah satu bahan bagi kami untuk mempertimbangkan perlunya penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan baik dalam hal proses belajar mengajar maupun penilaian”.

Peneliti :

“Apakah anak berkebutuhan khusus yang ada dibuatkan program pengajaran individual, dan sampai sejauh mana peranan ibu dalam hal tersebut?”

GPK :

“Untuk anak berkebutuhan khusus tentu perlu disiapkan program pembelajaran individual, adapun peranan saya dalam penyusunan program pembelajaran individual ini adalah dalam menentukan teknik pendekatan dan metodologi pembelajaran yang sesuai bagi kondisi dan karakteristik anak berkebutuhan khusus, tentunya yang menjadi fokus saya di sini diutamakan bagi siswa tunanetra”.

Peneliti :

“Selain Ibu, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan atau penyesuaian program pembelajaran individual tersebut?”

GPK :

“Penyusunan program pembelajaran individual ini tentu harus mencakup beberapa aspek, dan dalam hal ini kami merupakan satu tim yang terdiri dari GPK, guru kelas, guru mata pelajaran, termasuk juga orang tua siswa”.

Peneliti :

“Apakah masing-masing anak berkebutuhan khusus dibuatkan program pembelajaran individual?”

GPK :

“Masing-masing anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang kadang berbeda, untuk itu pada beberapa hal terkadang kami perlu membuat program pembelajaran individual yang berbeda juga”.

Peneliti :

“Bagaimana dengan kurikulum yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus?”

GPK :

“Secara umum kurikulum yang digunakan adalah sama antara siswa reguler dengan siswa berkebutuhan khusus, namun memang dalam beberapa hal perlu dilakukan penyesuaian dalam penyampaianya. Dalam hal ini tugas saya adalah merekomendasikan dan menyediakan bahan ajar dan alat bantu yang sesuai atau bahkan penyediaan buku-buku Braille bagi anak tunanetra”.

Peneliti :

“Bagaimana dengan SKKD?”

GPK :

“Untuk SKKD memang tidak ada yang dibuat khusus untuk anak berkebutuhan khusus, walau memang terkadang perlu dilakukan penyesuaian karena keterbatasan yang dimiliki si anak. Namun umumnya untuk bidang-bidang tertentu anak tunanetra mampu mencapai standar kompetensi menyerupai anak normal hanya saja memang dalam proses belajar mengajarnya mereka harus dibantu dengan alat bantu”.

Peneliti :

“Apakah untuk materi pembelajaran perlu juga penyesuaian bagi anak berkebutuhan khusus? Bisa diberikan sedikit penjelasan”.

GPK :

“Ya, untuk materi pembelajaran memang perlu dilakukan modifikasi atau penyesuaian. Misalnya penyederhanaan materi pembelajaran bagi anak tunanetra termasuk perlunya ketersediaan alat bantu dan buku-buku braille seperti yang saya sebutkan tadi”.

Peneliti :

“Siapa saja yang terlibat dalam penyesuaian materi pembelajaran tersebut?”

GPK :

“Yang terlibat dalam modifikasi proses pembelajaran di sini selain saya sebagai GPK adalah guru kelas, guru bidang studi dan juga guru bimbingan dan penyuluhan atau guru BP. Guru kelas dan guru bidang studi perlu dilibatkan karena memang mereka adalah pihak yang berinteraksi langsung dengan anak sehingga perlu dijelaskan bagaimana proses pembelajaran yang lebih baik untuk anak berkebutuhan khusus”.

Peneliti :

“Bisa dijelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus yang dilakukan di sekolah ini, dan sampai sejauh mana keterlibatan Ibu dalam hal tersebut?”

GPK :

“Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran dibuat umum, dibuat oleh guru kelas atau guru mata pelajaran. Saya memberikan rekomendasi bila diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian. Biasanya saya mempelajari bahan ajar yang diberikan oleh guru kelas, lalu membuat rencana pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus seperti ; mengidentifikasi kebutuhan alat bantu atau alat peraga atau fasilitas lain yang sekiranya diperlukan bagi anak berkebutuhan khusus sehingga ia dapat menerima pelajaran dengan lebih baik”.

Peneliti :

“Hal-hal apa saja yang tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut?”

GPK :

“Rencana pelaksanaan pembelajaran itu mencakup masalah waktu belajar, mekanisme belajar, tempat belajar maupun sumber belajar”.

Peneliti :

“Bisa dijelaskan bagaimana proses belajar mengajar bagi anak berkebutuhan khusus?”

GPK :

“Modifikasi proses belajar mengajar khususnya bagi anak tunanetra di sini kadang memang diperlukan, misalnya dalam hal posisi dimana dia duduk dan bagaimana guru menyesuaikan dengan kondisi siswa. Kadang-kadang saya pun berada di dalam kelas saat proses belajar mengajar untuk memberikan pendampingan kepada anak berkebutuhan khusus tersebut bila diperlukan pada mata pelajaran tertentu”.

Peneliti :

“Bisa dijelaskan lagi peranan ibu dalam proses belajar mengajar bagi anak berkebutuhan khusus tersebut?”

GPK :

“Terkadang anak berkebutuhan khusus mengalami kesulitan dalam memahami suatu konsep atau pengenalan pada symbol Braille yang masih baru, nah pada saat itu lah menjadi salah satu tugas saya dalam memberikan pendampingan. Salah satu tugas saya adalah membantu guru kelas dalam menyediakan buku bahan ajar dalam bentuk Braille, namun karena keterbatasan waktu dan alat maka kadang bahan ajar dalam bentuk Braille tersebut datang terlambat. Saya terkadang juga memberikan pendalaman materi bagi anak berkebutuhan khusus, terutama untuk pembelajaran dengan mekanisme yang berbeda misalnya matematika yang perlu alat peraga dan model bentuk”.

Peneliti :

“Apakah soal-soal ulangan atau soal ujian bagi anak berkebutuhan khusus dapat disamakan dengan anak-anak normal lainnya?”

GPK :

“Kalau menurut saya soal ulangan, maupun soal ujian dan sejenisnya terkadang memang bisa disamakan antara anak normal maupun anak berkebutuhan khusus, tapi tetap perlu dilihat kondisi anak yang seperti apa. Untuk anak tunanetra yang ada di sini secara garis besar dia bisa mengerjakan soal yang sama dengan anak normal tapi memang dia perlu alat bantu juga. Umumnya untuk anak tunanetra diberi tambahan waktu dalam pengerjaan soal, tapi terkadang dijumpai anak tunanetra yang dapat menyelesaikan soal dengan waktu yang sama dengan anak reguler. Perlu saya tambahkan di sini dalam keterbatasan yang dialami oleh anak untuk kondisi tertentu saya akan menyarankan adanya materi-materi pengganti atau kompensasi agar nilai dari anak tersebut tidak kosong, contoh konkritnya ya misalnya untuk pelajaran menggambar, anak tunanetra tentu tidak bisa melakukan itu, saya akan mengusulkan nilai pengganti. Tapi kebijakan dan keputusan tetap kami serahkan kepada pihak sekolah”.

Peneliti :

“Apakah selalu ada koordinasi dengan guru-guru lainnya?”

GPK :

“Koordinasi dengan guru kelas atau guru mata pelajaran perlu dilakukan terus menerus, secara rutin kami melakukan pertemuan seminggu sekali, namun demikian pertemuan insidental kadang dilakukan sesuai kebutuhan, misalnya saat akan ada ulangan atau ujian”.

Peneliti :

“Apakah Ibu memiliki latar belakang pendidikan khusus dan apakah Ibu juga pernah diikutkan dalam program-program pelatihan tentang pendidikan inklusif?”

GPK :

“Kebetulan saya memang memiliki latar belakang dan pengalaman di bidang pendidikan khusus. Dan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini beberapa kali saya pernah ikut dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sebaiknya guru pembimbing khusus memiliki latar belakang yang sesuai dengan kondisi anak berkebutuhan khusus sehingga dapat memberikan saran-saran dan rekomendasi yang sesuai juga”.

Peneliti :

“Menurut pendapat Ibu, apakah jumlah guru pembimbing khusus di sekolah ini sudah mencukupi?”

GPK :

“Menurut saya, guru pembimbing khusus yang ada masing kurang jumlahnya, karena selain menangani anak tunanetra, di sekolah ini pun terdapat anak yang teridentifikasi mengalami lamban belajar, dan menurut saya itupun perlu ditangani secara khusus oleh tenaga yang memang terbiasa atau berpengalaman memberikan pelayanan bagi anak lamban belajar tersebut. Pada prinsipnya lebih mudah bagi guru pembimbing khusus untuk menangani beberapa anak berkebutuhan khusus dengan satu jenis kebutuhan dibandingkan anak berkebutuhan khusus yang tersebar di beberapa kelas yang berbeda, terkait dengan hal tersebut jumlah guru pembimbing khusus seyogyanya perlu menjadi pertimbangan. Mempertimbangkan keterbatasan sumber daya manusia yang ada, beberapa sekolah inklusif di DKI, hanya berani menampung satu jenis kebutuhan khusus saja”.

Peneliti :

“Apakah sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini bagi anak berkebutuhan khusus sudah memadai?”

GPK :

“Untuk alat bantu pendidikan yang dimiliki oleh sekolah ini masih terbatas, tapi kita mendapat dukungan dari SLB A di sebelah, sehingga rekomendasi alat yang dibutuhkan untuk sementara masih bisa diadakan. Tapi secara umum sarana dan prasana yang ada menurut saya belum aksesable bagi anak tunanetra”.

Peneliti :

“Bisa dijelaskan harapan Ibu untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah ini atau sekolah lain pada umumnya?”

GPK :

“Saya berharap agar sekolah reguler difasilitasi untuk memberikan layanan pendidikan yang ramah dan inklusif. Di samping itu penghargaan kepada semua lapisan penyelenggara pendidikan inklusif tidak boleh dilupakan. Bagaimanapun guru pembimbing khusus juga harus fokus memahami kondisi serta kebutuhan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus dengan demikian diharapkan guru pembimbing khusus akan lebih memahami mekanisme pembelajaran yang sesuai bagi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kondisi mereka”.



TRANSKRIP WAWANCARA
PENELITIAN DI SDN 02 LEBAK BULUS JAKARTA SELATAN

INFORMAN : GURU KELAS
NAMA : CUCU MARYATI
NIP : 131502137

Peneliti :

“Bisa Ibu jelaskan mengenai pendidikan inklusif yang ibu pahami?”

Guru Kelas/MP :

“Sepengetahuan saya, sekolah inklusif adalah sekolah yang siap menerima anak berkebutuhan khusus . Terutama untuk sekolah kami adalah anak berkebutuhan khusus tunanetra”.

Peneliti :

“Apakah Ibu diikutkan dalam musyawarah untuk menetapkan sekolah ini menjadi sekolah inklusif?”

Guru Kelas/MP :

“Jujur, pada saat awal sekolah ini ditunjuk menjadi sekolah inklusif, saya tidak diikutkan secara langsung pada musyawarah penetapannya. Demikian halnya dalam hal pengembangan program pendidikan inklusif ini saya tidak terlibat secara langsung”.

Peneliti :

“Lantas, bagaimana peranan ibu dalam proses identifikasi bagi anak berkebutuhan khusus yang akan masuk ke sekolah ini?”

Guru Kelas/MP :

“Untuk proses identifikasi memang saya terlibat, terutama saya memberikan informasi kepada para orang tua bahwa sekolah ini akan menjadi sekolah inklusif yang diutamakan pada anak berkebutuhan khusus tunanetra saja”.

Peneliti :

“Hal apa saja yang diidentifikasi?”

Guru Kelas/MP :

“Dalam proses identifikasi bagi anak berkebutuhan khusus, kami mendata beberapa hal seperti identitas siswa, IQ siswa, kondisi emosional siswa, kondisi fisik siswa, kondisi mental siswa, bakat dan kemampuan, kelemahan siswa dan juga kebutuhan alat bantu pembelajaran bagi siswa”.

Peneliti :

“Apakah sekolah ini mengarsipkan data-data tersebut?”

Guru Kelas/MP :

“Betul, kami mengarsipkan data-data tersebut”.

Peneliti :

“Ada berapa jenis anak berkebutuhan khusus yang teridentifikasi atau ada di sekolah ini?”

Guru Kelas/MP :

“Walaupun yang diutamakan adalah tunanetra, namun dari hasil identifikasi internal ke dalam, kami juga mendapati anak-anak dengan kelambatan dalam membaca, menulis dan berhitung”.

Peneliti :

“Apakah ibu membuat secara khusus program pengajaran individual bagi anak berkebutuhan khusus?”

Guru Kelas/MP :

“Secara khusus saya tidak menyusun program pembelajaran individual apa lagi untuk masing-masing siswa berkebutuhan khusus karena seperti yang saya katakan tadi bahwa sesungguhnya disamping anak tunanetra di sekolah ini juga ada anak berkebutuhan khusus lainnya”.

Peneliti :

“Apakah ada kurikulum khusus bagi anak berkebutuhan khusus?”

Guru Kelas/MP :

“Di sekolah kami tidak ada kurikulum khusus bagi ABK, secara umum kami masih menggunakan kurikulum yang sama baik untuk anak berkebutuhan khusus maupun untuk anak normal lainnya”.

Peneliti :

“Bagaimana dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP?”

Guru Kelas/MP :

“Demikian halnya dengan RPP, saya tidak membuatnya secara khusus bagi anak berkebutuhan khusus.”

Peneliti :

“Apakah guru pembimbing khusus atau GPK, terkadang ada di dalam kelas untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus yang ada?”

Guru Kelas/MP :

“Pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus di dalam kelas kadang memang diperlukan, sekali-sekali saat proses belajar mengajar GPK turut berada di dalam kelas mendampingi anak berkebutuhan khusus. Pendampingan seperti ini biasanya hanya untuk beberapa mata pelajaran tertentu saja”.

Peneliti :

“Menurut pandangan ibu, dengan rencana dan proses pembelajaran yang dilakukan, apakah soal-soal yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus dapat disamakan dengan soal bagi anak reguler lainnya”.

Guru Kelas/MP :

“Dengan perencanaan dan proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolah ini, betul memang untuk soal-soal ulangan, soal ujian kenaikan kelas atau soal ujian akhir bagi anak berkebutuhan khusus dapat disamakan dengan anak normal lainnya”.

Peneliti :

“Apakah ibu pernah dilatih dalam hal penanganan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus dan apakah Ibu mengalami kesulitan dalam memberikan pelajaran pada mereka?”

Guru Kelas/MP :

“Ya, saya pernah mengikuti pelatihan layanan ABK yang diselenggarakan oleh pemerintah. Saya rasa tidak, bisa dikatakan saya tidak mengalami kesulitan dalam penyampaian materi pembelajaran sehari-hari. Dalam menjelaskan materi pembelajaran terhadap ABK sama dengan siswa yang normal, hanya apabila ditanya tentang pelajaran belum mengerti, maka penjelasan

diulang secara individu. Dalam proses penjelasan secara individual ini kadang saya dibantu oleh GPK”.

Peneliti :

“Siapa saja yang membantu ibu dalam penanganan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus selain dengan GPK tersebut?”

Guru Kelas/MP :

“Dalam pembinaan kepada anak berkebutuhan khusus ini, boleh dikatakan secara khusus saya hanya bekerja sama dengan GPK, tidak dengan tenaga teknis atau tenaga ahli lainnya”.

Peneliti :

“Apakah alat bantu atau sarana dan prasarana yang ada bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah ini sudah memadai menurut ibu?”

Guru Kelas/MP :

“Walaupun sudah ada alat bantu pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, namun menurut saya sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini masih belum aksesable bagi anak berkebutuhan khusus, terutama anak tunanetra”.

Peneliti :

“Apakah ibu pernah mendapatkan sosialisasi tentang sekolah yang ramah?”

Guru Kelas/MP :

“Ya, kami pernah mendapat sosialisasi tentang apa itu sekolah yang ramah. Menurut saya hal itu penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang perlunya menghargai perbedaan”.

Peneliti :

“Harapan ibu tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah ini?”

Guru Kelas/MP :

“Kalau saran saya, agar Dinas dapat membantu menyiapkan alat peraga untuk anak tunanetra terutama dalam mata pelajaran matematika dan IPS”.

TRANSKRIP WAWANCARA
PENELITIAN DI SDN 02 LEBAK BULUS JAKARTA SELATAN

INFORMAN : ORANG TUA SISWA CACAT
NAMA : TINNESI
ALAMAT : VILLA BINTARO INDAH, JL SULAWESI X
BLOK E 12/19 TANGERANG
NAMA ANAK : SUFFA (ANAK LOW VISION)
KELAS : VI-A

Peneliti :

“Bisa dijelaskan pengertian Ibu tentang pendidikan inklusif?”

Orang tua siswa cacat :

“Menurut saya pendidikan inklusif perlu dilakukan agar anak dapat bersosialisasi dengan semua orang”.

Peneliti :

“Dari mana ibu mengetahui sekolah ini juga menerima anak berkebutuhan khusus?”

Orang tua siswa cacat :

“Kebetulan yang memberikan saya informasi tentang pendidikan inklusif di sekolah ini adalah guru di SLB”.

Peneliti :

“Apakah ibu yakin bahwa pendidikan untuk anak ibu di sekolah reguler ini dapat berjalan dengan baik?”

Orang tua siswa cacat :

“Saya percaya pendidikan bagi anak saya di sekolah ini dapat berjalan dengan baik, karena di sekolah ini siswa bisa lebih mandiri dan dapat beradaptasi dengan teman-temannya yang normal sebab dia nantinya juga harus bergaul dan berkecimpung dimasyarakat”.

Peneliti :

“Sejauh yang Ibu tahu, bagaimana pandangan masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif?”

Orang tua siswa cacat :

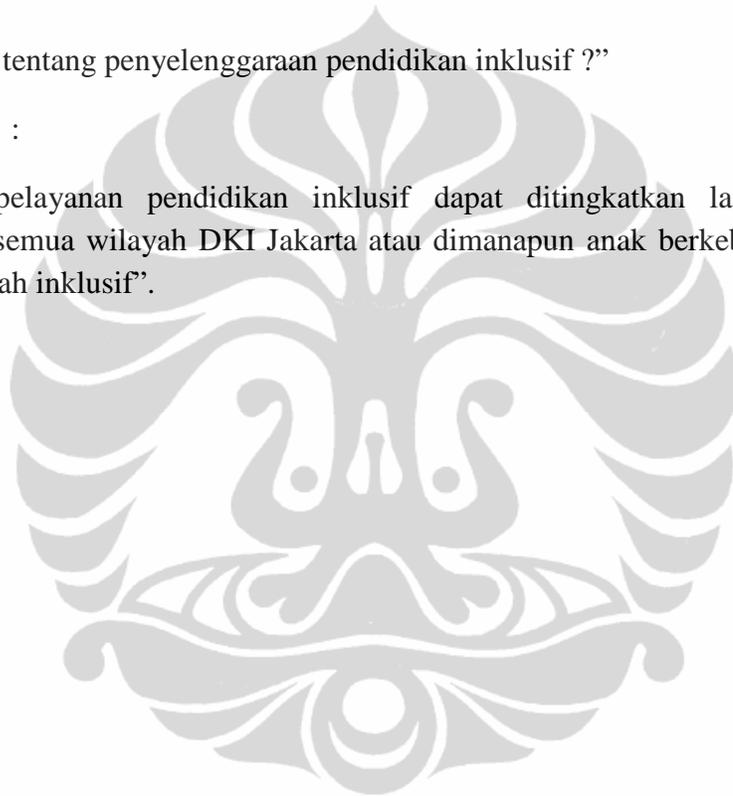
“Sejauh yang saya tahu, masyarakat sangat mendukung dengan adanya siswa berkebutuhan khusus, meskipun pada awalnya ada juga yang kurang mengerti”.

Peneliti :

“Saran atau harapan ibu tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif ?”

Orang tua siswa cacat :

“Harapan saya agar pelayanan pendidikan inklusif dapat ditingkatkan lagi sarana dan prasarananya dan agar semua wilayah DKI Jakarta atau dimanapun anak berkebutuhan khusus tinggal disediakan sekolah inklusif”.



TRANSKRIP WAWANCARA
PENELITIAN DI SDN 02 LEBAK BULUS JAKARTA SELATAN

INFORMAN : ORANG TUA SISWA NORMAL
NAMA : HENDRIK POSUMAH
NIP : JALAN H. BAUN NO 11A
NAMA ANAK : GERALDI DRIKSLY
KELAS : VI-A

Peneliti :

“Apakah Bapak memahami apa itu pendidikan inklusif di sekolah reguler?”

Orang tua siswa normal :

Maaf, saya belum paham apa itu pendidikan inklusif

Peneliti :

“Sekolah ini saat ini selain memberikan layanan kepada siswa normal juga menerima anak berkebutuhan khusus, terutama tunanetra, apa pandangan Bapak?”

Orang tua siswa normal :

“Prinsipnya, saya tidak keberatan dengan adanya anak berkebutuhan khusus di sekolah anak saya karena dapat menumbuhkan rasa kebersamaan diantara mereka semua. Dan saya percaya pendidikan yang akan diterima anak saya akan tetap baik dan berkualitas”.

TRANSKRIP WAWANCARA
PENELITIAN DI SDN 02 LEBAK BULUS JAKARTA SELATAN

INFORMAN : SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)
NAMA : SUFFA ALMIRA BARKAH
JENIS KEBUTUHAN : LOW VISION (CACAT MATA)

Peneliti :

“Apa yang Suffa pahami tentang sekolah inklusif?”

ABK :

“Sekolah inklusif adalah sekolah dimana siswa berkebutuhan khusus dapat sekolah di sekolah umum”.

Peneliti :

“Suffa senang bersekolah di sini? Dan bagaimana sikap teman-teman Suffa?”

ABK :

“Oh ya, saya sangat senang sekolah di sini, teman-teman sangat membantu dan baik-baik semuanya dan bisa mengerti adanya keberadaan siswa berkebutuhan khusus seperti saya ini”.

Peneliti :

“Ada tidak kesulitan Suffa dalam menerima pelajaran dari guru?”

ABK :

“Sejauh ini saya masih belum mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran”.

Peneliti :

“Apakah Suffa menggunakan alat bantu dalam proses belajarnya? Bisa dijelaskan alat bantu apa saja?”

ABK :

“Iya, saya menggunakan alat peraga, dan ada juga computer yang bisa mengeluarkan suara. Untuk pelajaran matematika saya dibantu dengan alat peraga seperti balok-balok. Kadang untuk pelajaran IPA saya juga menggunakan alat bantu peraga IPA”.

Peneliti :

“Dalam mata pelajaran apa Suffa pernah mengalami kesulitan sehingga perlu alat bantu atau dibantu?”

ABK :

“Kadang-kadang saya masih mengalami kesulitan, terutama bila mengerjakan soal matematika dan pelajaran lain yang ada gambarnya”.

Peneliti :

“Suffa kesulitan tidak kalau mau ke kamar mandi atau WC?”

ABK :

“Untuk ke kamar mandi kecil saya sulit karena letaknya jauh dari kelas”.

Peneliti :

“Apa harapan Suffa terkait dengan penyelenggaraan sekolah inklusif di sini?”

ABK :

“Kalau saya berharap agar buku-buku yang saya butuhkan lebih mudah tersedia”.

TRANSKRIP WAWANCARA
PENELITIAN DI SDN 02 LEBAK BULUS JAKARTA SELATAN

INFORMAN : SISWA NORMAL

NAMA : GERALDY DRISKLY POSUMAH

Peneliti :

“Gerald tahun tidak tentang pendidikan inklusif, bisa jelaskan?”

Siswa normal :

“Pendidikan inklusif merupakan program pemerintah dalam pendidikan yang melibatkan siswa/siswo berkebutuhan khusus”.

Peneliti :

“Merasa terganggu tidak dengan adanya anak berkebutuhan khusus di sekolah ini dan apakah Gerald bersedia membantu bila mereka membutuhkan bantuan?”

Siswa normal :

“Saya tidak terganggu dengan keberadaan mereka dan saya juga bersedia membantu bila mereka memang memerlukan bantuan. Untuk belajarpun saya bersedia membantu”.

Peneliti :

“Bersedia bermain bersama juga?”

Siswa normal :

“Saat jam istirahat saya kadang juga bermain bersama dengan dia”.

Peneliti :

“Apakah anak berkebutuhan khusus mengalami kesulitan ketika belajar atau mengerjakan soal?”

Siswa normal :

“Memang dalam mengerjakan soal terkadang mereka mengalami kesulitan seperti misalnya tentang soal yang menggunakan gambar ia harus diterangkan lebih dahulu”.

TRANSKRIP WAWANCARA
PENELITIAN DI SDN 06 LEBAK BULUS JAKARTA SELATAN

INFORMAN : KEPALA SEKOLAH
NAMA : Tumiyem, S.Pd
NIP : 470043595

Peneliti :

“Apa pengertian pendidikan inklusif menurut yang Ibu Ketahui?”

Kepala Sekolah :

“Kalau menurut saya pendidikan inklusif itu artinya membimbing anak berkebutuhan khusus ke arah normal, GPK membantu mereka agar lebih mudah mencerna pelajaran. Sekolah inklusif sebagai tempat bersosialisasi agar anak berkebutuhan khusus mandiri dan diterima di masyarakat”.

Peneliti :

“Sejak kapan sekolah ini menjadi sekolah inklusif?”

Kepala Sekolah :

“Sekolah ini ditunjuk menjadi sekolah inklusif sekitar tahun 2004, berarti kurang lebih sudah 6 tahun lah”.

Peneliti :

“Sebelum penetapan sekolah ini menjadi sekolah inklusif apakah ibu melakukan musyawarah dengan warga sekolah lainnya?”

Kepala Sekolah :

“Karena penetapan sekolah ini melalui proses penunjukan oleh Direktorat, jadi musyawarah atau semacam sosialisasi kepada warga sekolah ya setelah penunjukan itu”.

Peneliti :

“Apakah Ibu melakukan perubahan visi dan misi sekolah terutama terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif?”

Kepala Sekolah :

“Betul sekali, di sekolah kami memang melakukan perubahan atau istilahnya penyesuaian visi dan misi, saat ini intinya sekolah berupaya melayani anak berkebutuhan khusus agar setara dengan siswa normal, visi dan misi disesuaikan dengan prinsip pendidikan untuk semua”.

Peneliti :

“Bagaimana dengan struktur organisasi, apakah ada penyesuaian juga?”

Kepala Sekolah :

“Begitu juga dengan struktur organisasi di sekolah ini, dengan keberadaan GPK tentu ada sedikit penyesuaian pada struktur organisasi sekolah ini. GPK perlu menjadi unsur terintegrasi juga dalam sekolah menurut saya”.

Peneliti :

“Apakah Ibu membuat program pengembangan pendidikan inklusif, bagaimana program pengembangan yang ibu lakukan tersebut?”

Kepala Sekolah :

“Untuk pengembangan program pendidikan inklusif memang kami tidak membuat secara spesifik program jangka pendek, menengah maupun panjang, namun kami tetap berkomitmen untuk itu”. Program jangka pendek, menengah maupun panjang dibuat menyatu dengan program reguler karena anak berkebutuhan khusus kita upayakan berkembang seperti anak normal”.

Peneliti :

“Adakah Ibu juga melakukan pertemuan internal dalam membuat program pengembangan pendidikan inklusif?”

Kepala Sekolah :

“Ya, kami kerap melakukan pertemuan internal untuk membahas hal itu, biasanya yang terlibat di sana adalah orang tua anak berkebutuhan khusus, guru pembimbing khusus, guru kelas dan saya sendiri sebagai kepala sekolah. Kami beruntung beberapa orang tua murid dari anak berkebutuhan khusus yang ada di sini sangat terbuka dan komunikatif dengan kami, dukungan orang tua untuk anak-anak sangat diperlukan”.

Peneliti :

“Apakah ibu melakukan proses identifikasi dalam penerimaan anak berkebutuhan khusus?”

Kepala Sekolah :

Ya, kami lakukan itu, dan saat ini disekolah kami ada tujuh anak yang teridentifikasi lambat belajar, hiperaktif dan atau autis. Kebiasaan kami di sini adalah, pada saat ada anak berkebutuhan khusus yang akan masuk ke sekolah ini, maka saya dan bersama guru-guru termasuk guru pembimbing khusus akan melakukan diskusi untuk memastikan kesiapan dalam menampung anak tersebut, bila dari hasil diskusi tersebut ternyata sekolah ini belum memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani anak dengan kondisi tersebut, maka dengan saat terpaksa kami tidak dapat menerima, dengan pertimbangan pendidikan yang akan diberikan oleh anak itu tidak optimal. Anak yang akan mendaftar ke sini kami sarankan untuk dilengkapi hasil identifikasi atau rekomendasi dari tenaga ahli sehingga dapat kami pelajari kondisi anak tersebut sebelum kami menerimanya”.

Peneliti :

“Apa saja hal-hal yang diidentifikasi, dan apakah ibu menyimpan hasil identifikasi tersebut?”

Kepala Sekolah :

“Kami punya hasil identifikasi itu, dan kami memiliki dokumennya. Informasi yang ada didalamnya mencakup identitas siswa, IQ, kondisi emosional, kondisi fisik, kondisi mental, bakat, kelemahan siswa, kebutuhan alat bantu, rencana pembelajaran siswa dan juga data-data prestasi siswa”.

Peneliti :

“Apakah sekolah membuat program pengajaran individual bagi anak berkebutuhan khusus?”

Kepala Sekolah :

“Program pengajaran individual dibuat oleh guru kelas bersama dengan guru pembimbing khusus, karena memang mereka yang bersentuhan dan menangani anak berkebutuhan khusus tersebut”.

Peneliti :

“Adakah kurikulum khusus untuk anak berkebutuhan khusus?”

Kepala Sekolah :

“Kalau kurikulum memang kami tidak atau belum membuatkan secara khusus kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus di sini, karena dari Dinas hanya mengijinkan sekolah punya satu kurikulum, maka kami hanya memberlakukan satu kurikulum yang kami bedakan adalah pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus tersebut”.

Peneliti :

“Bagaimana sekolah ini menerapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar bagi anak berkebutuhan khusus?”

Kepala sekolah :

Standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD untuk anak berkebutuhan khusus tidak sepenuhnya bisa disamakan dengan anak normal. SKKD itu kami kembangkan ke arah pencapaiannya melalui indikator-indikator yang tertera pada materi yang relevan. Berlaku untuk semua (ABK dan reguler). Dalam pembuatan SKKD ini biasanya melibatkan beberapa unsur yaitu guru kelas, guru pembimbing khusus dan juga kepala sekolah”.

Peneliti :

“Adakah perbedaan untuk materi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus?”

Kepala Sekolah :

“Materi pembelajaran pada intinya sama dengan anak normal, hanya anak berkebutuhan khusus dilayani khusus dengan menyederhanakan bahasa supaya mengerti atau memahami materi tersebut”.

Peneliti :

“Siapa saja yang melakukan penyesuaian tersebut?”

Kepala Sekolah :

“Penyesuaian materi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus dikerjakan secara bersama-sama antara guru pembimbing khusus dan guru kelas”.

Peneliti :

“Bagaimana dengan rencana pelaksanaan pembelajaran?”

Kepala Sekolah :

“Kalau RPP dibuat oleh guru kelas, dan disahkan oleh saya sebagai kepala sekolah. Untuk semua anak tidak dibedakan”.

Peneliti :

“Apa saja yang termuat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut?”

Kepala Sekolah :

“Setahun saya RPP tersebut mencakup waktu, mekanisme, tempat, sumber belajar, serta media dan alat bantu pembelajaran bila diperlukan. Nah berkaitan dengan implementasi rpp inilah, bila diperlukan sesuai situasi dan kondisi, kita memandang perlu memberikan penyesuaian-penyesuaian bagi anak berkebutuhan khusus”.

Peneliti :

“Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut?”

Kepala Sekolah :

“Yang paling memahami untuk melakukan penyesuaian itu adalah GPK, dengan tetap berkoordinasi dengan guru kelas dan kepala sekolah”.

Peneliti :

“Dengan perencanaan dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan apakah anak berkebutuhan khusus dapat diberikan soal yang sama dengan anak reguler lainnya?”

Kepala Sekolah :

“Dengan mengacu pada perencanaan dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan secara prinsip anak-anak masih bisa diberikan soal-soal yang sama dengan anak normal lainnya, tapi mungkin untuk beberapa hal perlu difasilitasi. Perlu saya jelaskan juga bahwa sekolah kami mengambil kebijakan untuk menurunkan standar kelulusan yang ada, yaitu mengambil nilai tengah antara nilai tertinggi dan nilai terendah, dengan harapan siswa berkebutuhan khusus masih dapat mencapai standar tersebut dan di sisi lain anak normal tetap kita pacu untuk dapat mencapai hasil yang setinggi tingginya”.

Peneliti :

“Apakah guru pembimbing khusus yang ibu sebutkan tadi sudah memiliki latar belakang pendidikan khusus serta memiliki pengalaman?”

Kepala Sekolah :

“Ya, kami memiliki guru pembimbing khusus, dan dia memiliki latar belakang pendidikan khusus serta sudah cukup berpengalaman dalam menangani anak berkebutuhan khusus”.

Peneliti :

“Apakah ada pelatihan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi guru pembimbing khusus?”

Kepala Sekolah :

“tentu, untuk meningkatkan kapasitasnya, guru pembimbing khusus tersebut beberapa kali mengikuti pelatihan mengenai penanganan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif”.

Peneliti :

“Apakah guru pembimbing khusus tersebut setiap hari berada di sekolah ini?”

Kepala Sekolah :

“kebetulan guru pembimbing khusus tersebut memang khusus bertugas di sekolah ini, sehingga setiap hari ia bisa berada di sekolah dan memberikan layanan kepada anak”.

Peneliti :

“Menurut Ibu, apakah jumlah guru pembimbing khusus yang ada saat ini sudah cukup memadai?”

Kepala Sekolah :

“kalau jumlah tentu menurut saya masih belum ideal, tapi saya percaya dia punya komitmen, dan untuk mengantisipasi jumlah anak berkebutuhan khusus yang ada dia membuat jadwal pendampingan dalam seminggu. Untuk kualitas sudah cukup baik, tapi tetap perlu selalu ditingkatkan”.

Peneliti :

“Apakah ada kemitraan dengan pihak lain, seperti dengan tenaga psikolog ataupun tenaga medis dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah ini?”

Kepala Sekolah :

“tentu dalam penanganan anak berkebutuhan khusus, kita sebaiknya melibatkan pihak-pihak lain yang berkompeten, termasuk psikolog atau tenaga medis. Namun demikian karena keterbatasan dana yang kami miliki serta kurangnya SDM yang dapat fokus menangani anak berkebutuhan khusus ini, secara khusus sekolah memang sampai dengan saat ini belum menjalin kemitraan dengan pihak-pihak lain seperti psikolog maupun tim medis. Tapi perlu saya tambahkan di sini, untuk beberapa orang tua dari anak berkebutuhan khusus yang kebetulan mampu dan memiliki perhatian lebih kepada anaknya, biasanya selain mempercayakan pendidikan formal bagi anaknya di sekolah ini, orang tua tersebut juga membawa anaknya ke tenaga terapis untuk meningkatkan kemampuan anaknya tersebut. Melalui orang tua si anak ini, sekolah maupun pihak terapis ini saling memberikan informasi tentang perkembangan dan kebutuhan anak, jadi secara tidak langsung terjadi kemitraan antara sekolah dengan terapis tersebut. Untuk kondisi seperti ini

pembinaan kepada si anak dapat menjadi lebih optimal, sayangnya tidak semua orang tua dari anak berkebutuhan khusus yang ada memiliki kepedulian dan kemampuan seara financial untuk melakukan hal itu.”

Peneliti :

“Apa yang ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada di sekolah ini dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus di sini?”

Kepala Sekolah :

“terkait dengan kebutuhan guru pembimbing khusus kami selalu mengupayakan agar pemerintah dapat memberikan tambahan guru pembimbing khusus yang sesuai untuk sekolah ini. Tidak lupa bagi guru-guru yang ada di sini juga perlu diberikan pelatihan tentang pendidikan inklusif sehingga pemahaman mereka juga menjadi lebih meningkat lagi”.

Peneliti :

“Bagaimana sarana dan prasarana yang ada, apakah cukup memadai bagi anak berkebutuhan khusus?”

Kepala Sekolah :

“kita menyelenggarakan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan sarana dan prasarana yang seadanya, dengan kemampuan yang tersedia, sekolah berupaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana tersebut. Memang untuk mobilitas saya rasa kalau anak autisme tidak berbeda dengan anak lainnya”.

Peneliti :

“Bisa dijelaskan bagaimana pendanaan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah ini?”

Kepala Sekolah :

“Sekolah memang mendapat dana khusus untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif ini yaitu dari pemerintah daerah tingkat I berupa beasiswa anak berkebutuhan khusus sebesar rp. 50.000/bulan/siswa. Tahun 2009 yang lalu Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta juga memberikan dana sebesar Rp. 20.000.000 yang kami gunakan untuk penyediaan sarana dan membiaya guru pembimbing khusus”.

Peneliti :

“Apakah ibu menunjuk manager dalam pengelolaan pendidikan inklusif di sekolah ini?”

Kepala Sekolah :

“Kami tidak memiliki manager penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah ini, yang fokus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah guru pembimbing khusus kami”.

Peneliti :

“Apakah guru pembimbing khusus memiliki posisi jelas dalam struktur organisasi sekolah?”

Kepala Sekolah :

“Ya, karena fungsi guru pembimbing khusus termasuk vital di sini, maka kami masukkan mereka dalam struktur organisasi sekolah, tupoksi mereka jelas dan kepada siapa mereka berkoordinasi dan bertanggungjawab juga jelas”.

Peneliti :

“Apakah keberadaan guru pembimbing khusus sangat membantu dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah ini, mohon dijelaskan?”

Kepala Sekolah :

“Guru pembimbing khusus memegang peranan sangat penting dalam pendidikan inklusif di sekolah kami, tentu status yang jelas bagi guru tersebut perlu diperhatikan, saat ini status guru tersebut masih honorer, kami berharap guru tersebut dapat segera diangkat menjadi PNS. Di samping itu kami sangat memerlukan ruang khusus untuk anak berkebutuhan khusus”.

Peneliti :

“Harapan Ibu tentang peningkatan mutu layanan pendidikan Inklusif ke depan?”

Kepala Sekolah :

“Ya...demi terlayannya anak berkebutuhan khusus sesuai prinsip pendidikan untuk semua, kami memerlukan pelatihan dan pengetahuan yang relevan secara kontinu. Saya senang bila ada forum diskusi untuk bertukar pikiran antara kepala sekolah yang melayani anak berkebutuhan khusus sehingga dapat saling memberi masukan dari pengalaman masing-masing, dengan harapan pengalaman tersebut dapat diimplimentasikan di sekolah ini.”

TRANSKRIP WAWANCARA
PENELITIAN DI SDN 06 LEBAK BULUS JAKARTA SELATAN

INFORMAN : GURU PEMBIMBING KHUSUS (GPK)

NAMA : Asfini Alfianti, S.Pd

NIP : - (guru honorer)

Peneliti :

“Sejauh yang ibu pahami, bisa tolong jelaskan apa itu sekolah inklusif?”

GPK :

“Siswa yang memiliki kebutuhan khusus diharapkan dapat mengikuti proses pembelajaran secara klasikal yang didampingi oleh pendamping”.

Peneliti :

“Apakah Ibu dilibatkan dalam pengembangan pendidikan inklusif di sekolah ini, mohon dijelaskan?”

GPK :

“Ya, saya memang dilibatkan dalam dalam penyusunan rencana pengembangan program pendidikan inklusif di sekolah ini, biasanya saya diminta masukkannya dalam pembuatan program untuk anak berkebutuhan khusus terutama yang berhubungan dengan proses pembelajaran”.

Peneliti :

“Apakah ada kemitraan dengan pihak lain, seperti misalnya psikolog atau tim medis dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah ini?”

GPK :

”Ya...ada keterlibatan seorang psikolog yang membantu identifikasi ananda lewat test IQ”.

Peneliti :

“Apakah sekolah menyimpan hasil identifikasi anak berkebutuhan khusus?”

GPK :

“Ya, untuk keperluan pembinaan kami memang menyimpan hasil identifikasi tersebut. Berbeda dengan siswa pindahan kami biasanya akan melihat juga dokumen hasil pembelajaran selama di sekolah yang terdahulu”.

Peneliti :

“Apakah terdapat anak berkebutuhan khusus yang berbeda jenisnya dalam satu kelas?”

GPK :

“Kebetulan di sekolah ini tidak ada anak berkebutuhan khusus yang berbeda jenisnya dalam satu kelas sekaligus”.

Peneliti :

“Apakah ibu terlibat dalam penyusunan program pengajaran individual bagi anak berkebutuhan khusus, mohon dijelaskan?”

GPK :

“Betul, untuk anak berkebutuhan khusus kami menyusun program pembelajaran individual bagi anak. Guru pembimbing khusus diberikan wewenang untuk membuat program pembelajaran individual dan selanjutnya program pembelajaran individual yang dihasilkan akan dibicarakan dengan kepala sekolah dan guru-guru. Biasanya sesuai dengan karakteristik dari masing-masing anak, program pembelajaran individual tersebut dibuat berbeda satu dengan lainnya”.

Peneliti :

“Bagaimana dengan rencana pelaksanaan pembelajaran?”

GPK :

“Yang menyusun program rencana pelaksanaan pembelajaran itu adalah guru kelas dan guru bidang studi”.

Peneliti :

“Adakah perbedaan dalam proses pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, misalnya penyesuaian-penyesuaian begitu?”

GPK :

“terhadap beberapa anak berkebutuhan khusus memang diperlukan penyesuaian-penyesuaian pada proses pembelajaran di kelas, biasanya mereka diberikan tambahan masukan-masukan tentang apa yang dibahas sehingga mereka dapat lebih memahaminya”.

Peneliti :

“Apakah Ibu pernah ikut mendampingi anak berkebutuhan khusus belajar di kelas pada jam-jam belajar, mohon bisa dijelaskan?”

GPK :

“terkadang bila diperlukan, saya berada di dalam kelas juga saat proses belajar mengajar untuk memberikan pendampingan kepada siswa, biasanya mereka perlu dibantu diarahkan dan dijelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami”.

Peneliti :

“Apakah ibu mempunyai jadwal rutin untuk berkoordinasi dengan guru lain atau dengan kepala sekolah dalam memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus?”

GPK :

“Kami biasanya melakukan pertemuan internal sekali dalam satu bulan, hal-hal yang dibicarakan mengenai perkembangan ananda dalam pencapaian materi pelajaran yang disampaikan”.

TRANSKRIP WAWANCARA
PENELITIAN DI SDN 06 LEBAK BULUS JAKARTA SELATAN

INFORMAN : GURU KELAS/MATA PELAJARAN (MP)

NAMA : Siti Rojaswati, S.Pd

NIP : 132153784

Peneliti :

“Sejauh yang Ibu pahami, bisa mohon dijelaskan pengertian dari pendidikan yang inklusif atau sekolah inklusif?”

GURU KELAS/MP :

“Pendidikan inklusif merupakan penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang dilaksanakan di sekolah reguler tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan anak berkebutuhan khusus dalam bersosialisasi dan menyiapkan mereka untuk terjun ke masyarakat”.

Peneliti :

“Apakah Ibu terlibat dalam penyusunan program pengajaran individual bagi anak berkebutuhan khusus?”

GURU KELAS/MP :

“Untuk program pembelajaran individual bagi anak berkebutuhan khusus disusun oleh guru pembimbing khusus, namun dalam prosesnya tetap berkoordinasi dengan guru kelas dan juga kepala sekolah”.

Peneliti :

“Bagaimana proses pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus yang pernah ibu tangani?”

GURU KELAS/MP :

”Saya memahami kondisi anak berkebutuhan khusus, mereka memang tidak sepenuhnya sama dengan anak lainnya, untuk itu dalam proses pembelajaran terkadang memang perlu dilakukan modifikasi seperti misalnya pada penyederhanaan kalimat yang digunakan maupun penyederhanaan soal”.

Peneliti :

“Siapa saja yang terlibat dalam proses modifikasi tersebut selain guru kelas?”

GURU KELAS/MP :

“Modifikasi dalam proses pembelajaran tersebut biasanya melibatkan guru kelas dan juga guru pembimbing khusus. Prinsipnya kami harus selalu berkoordinasi untuk memberikan layanan terbaik bagi anak. Penyesuaian itu misalnya letak tempat duduk dan teman sebangku untuk anak berkebutuhan khusus, penggunaan sarana khusus, misalnya di tempat kami ada yang menggunakan kursi khusus serta penyesuaian pada penyampaian materi belajar”.

Peneliti :

“Apakah guru pembimbing khusus juga mendampingi anak berkebutuhan khusus di dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung?”

GURU KELAS/MP :

“Betul sekali, terkadang memang guru pembimbing khusus perlu untuk mendampingi siswa berkebutuhan khusus”.

Peneliti :

“Apa harapan ibu bagi pelayanan pendidikan inklusif di sekolah ini?”

GURU KELAS/MP :

“Harapan saya ke depan, jika sekolah ditetapkan menjadi sekolah inklusif seharusnya pemerintah juga mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar layanan pendidikan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus dapat menjadi lebih baik.

TRANSKRIP WAWANCARA
PENELITIAN DI SDN 06 LEBAK BULUS JAKARTA SELATAN

INFORMAN : ORANG TUA DARI SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
NAMA : Asni
NAMA ANAK : Tirto Ananda Laksono (Dimas) (Siswa KELAS II)
JENIS KEBUTUHAN : Kesulitan Belajar/Autis

Peneliti :

“Apa yang ibu ketahui tentang sekolah inklusif?”

ORANG TUA SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS :

“Yaitu sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus dimana sekolah tersebut juga menerima anak-anak normal. Awalnya saya mengetahui bahwa sekolah ini dapat menerima anak berkebutuhan khusus justru dari tempat terapis di mana anak saya diterapi”.

Peneliti :

“Bisa ibu ceritakan bagaimana prosesnya sehingga Dimas bersekolah di SDN 06 Lebak Bulus ini?”

ORANG TUA SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS :

”Dimas terdeteksi mengalami kesulitan bicara sejak usia dua tahun, saat pertama mengetahui keadaan Dimas seperti itu, kami langsung membawanya ke Dwi Gantari yaitu lembaga yang menyediakan jasa terapis bagi anak-anak autis. Saat Dimas mulai memasuki usia sekolah, pembinaan kepada Dimas lebih difokuskan pada persiapan masuk sekolah, salah satunya berkenaan dengan kemampuan kognitif anak. Dwi Gantari ini pula yang mengeluarkan surat pengantar yang berisi keterangan tentang kondisi dan karakteristik anak saya. Berdasarkan surat pengantar ini kepala sekolah ini bisa menerima Dimas”.

Peneliti :

“Kalau begitu, kurang lebih berapa lama persiapan Dimas untuk masuk ke sekolah?”

ORANG TUA SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS :

“Hmmm....persiapan khusus untuk memasuki sekolah bagi anak saya itu kurang lebih selama satu tahun”.

Peneliti :

“Apakah ibu yakin sekolah ini dapat memberikan layanan pendidikan yang sesuai bagi anak ibu?”

ORANG TUA SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS :

“Walaupun ini bukan sekolah khusus bagi anak berkebutuhan khusus, tapi saya yakin kalau layanan pendidikan bagi anak saya di sekolah ini tetap dapat berjalan baik, karena anak saya walau mengalami autis namun pada prinsipnya tidak berbeda dengan anak-anak normal lainnya, hanya saja untuk komunikasi anak saya lebih sederhana”.

Peneliti :

“Ibu tidak khawatir dengan lingkungan sekolah yang umumnya adalah anak-anak normal yang kondisinya berbeda dengan anak ibu?”

ORANG TUA SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS :

”Sampai dengan saat ini saya tidak merasa khawatir menyekolahkan anak saya di sini, anak saya diterima dengan baik di sini, tidak dibeda-bedakan dengan yang lain”.

Peneliti :

“Apakah ibu kerap berkoordinasi dengan pihak sekolah perihal perkembangan pendidikan anak Ibu di sekolah ini?”

ORANG TUA SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS :

”Saya kerap berkomunikasi dengan guru menanyakan apakah ada tugas atau PR yang harus dikerjakan oleh Dimas, karena Dimas memang tidak pernah melapor bila guru memberikan tugas atau PR untuk di rumah. Sayapun selalu mengkomunikasikan perkembangan Dimas di sekolah kepada terapisnya, dan sebaliknya setiap perkembangan atau kondisi yang disampaikan oleh pihak terapis saya komunikasikan kepada pihak sekolah. Baik bagi sekolah maupun pihak terapis pertukaran informasi itu sangat penting bagi perkembangan pendidikan anak saya agar lebih terarah dan terfokus”.

Peneliti :

“Harapan ibu tentang pendidikan inklusif di sekolah ini?”

ORANG TUA SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS :

“Sebaiknya ketika sekolah ini ditunjuk sebagai sekolah inklusif, saya harap pemerintah dapat menyediakan sarana-sarana dan guru pembimbing khusus yang dapat menunjang proses belajar. Dan bagi para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus jangan malu dengan kondisi anak , dukungan dari orang tua saat membantu perkembangan anak kita juga”.



TRANSKRIP WA WANCARA
PENELITIAN DI SDN 06 LEBAK BULUS JAKARTA SELATAN

INFORMAN : ORANG TUA DARI SISWA NORMAL

NAMA : Siti Mariam

NAMA ANAK : Farika Galuh Apsari (KELAS IIIB)

Peneliti :

“Bisa ibu jelaskan apa itu sekolah inklusif?”

ORANG TUA SISWA NORMAL :

“Sepengetahuan saya sekolah inklusif itu adalah sekolah yang didalamnya bukan hanya anak-anak normal pada umumnya tapi juga ada anak yang berkebutuhan khusus”.

Peneliti :

“Apakah ibu tetap percaya, dengan adanya anak berkebutuhan khusus di sekolah ini, proses belajar mengajar tetap dapat berjalan dengan baik?”

ORANG TUA SISWA NORMAL :

“Pada prinsipnya saya tidak masalah dengan keberadaan mereka di sekolah ini, dan saya yakin proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Saya percaya sekolah inklusif mampu memberikan pendidikan yang baik untuk anak normal pada umumnya juga mampu memberikan pendidikan yang baik pula untuk anak berkebutuhan khusus karena itu jugalah sekolah inklusif itu ada”.

Peneliti :

“Sejauh yang ibu tahu, bagaimana pandangan masyarakat terutama masyarakat sekolah dan masyarakat sekitar sekolah dengan keberadaan anak berkebutuhan khusus di sini?”

ORANG TUA SISWA NORMAL :

”Sejauh ini sih masyarakat sekitar pada umumnya tidak merasa terganggu dengan adanya anak berkebutuhan khusus, karena anak-anak berkebutuhan khusus tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah”.

Peneliti :

“Apa yang Ibu harapkan terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah ini?”

ORANG TUA SISWA NORMAL :

“Saya berharap sekolah yang ditunjuk diberikan fasilitas yang memadai untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah inklusif tersebut, baik dari guru pengajar maupun sarana, mohon pemerintah atau dinas dapat memenuhinya”.



TRANSKRIP WAWANCARA
PENELITIAN DI SDN 06 LEBAK BULUS JAKARTA SELATAN

INFORMAN : SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)
NAMA : Rafif Dewantara
JENIS KEBUTUHAN KHUSUS : Kesulitan Belajar

Peneliti :

“Apakah teman-teman baik dan bersedia membantu Rafif ?

ABK :

“Teman-teman sangat baik dan mau bermain bersama saya, mereka pun tidak keberatan jika saya meminta bantuan pada saat saya membutuhkannya”.

Peneliti :

“Dalam mengikuti pelajaran, apakah Rafif pernah mengalami kesulitan?”

ABK :

“Iya, kadang saya mengalami kesulitan untuk pelajaran matematika, biasanya ada yang bantu Rafif menjelaskan maksud soal baru Rafif lebih paham”.

Peneliti :

“Biasa dibantu dalam hal apa?”

ABK :

”Kadang dibantu dijelaskan dengan gambar-gambar”.

TRANSKRIP WAWANCARA
PENELITIAN DI SDN 06 LEBAK BULUS JAKARTA SELATAN

INFORMAN : SISWA NORMAL
NAMA : HALIM

Peneliti :

“Halim paham tidak dengan pengertian sekolah inklusif?”

SISWA NORMAL :

“Apa ya, saya belum ngerti”.

Peneliti :

“Sekolah ini kan sekarang menerima anak berkebutuhan khusus seperti misalnya anak autis, apakah Halim merasa terganggu dengan keberadaan mereka?”

SISWA NORMAL :

“Kalau mereka sih tidak mengganggu kita”.

Peneliti :

“Apakah Halim bersedia membantu atau belajar bersama anak berkebutuhan khusus tersebut?”

SISWA NORMAL :

”Pasti, kita siap bantu kalau mereka perlu bantuan. Kita juga tidak masalah belajar bersama mereka karena mereka juga punya kemampuan. Kadang memang sih dalam mengerjakan soal mereka perlu dibimbing”.

TRANSKRIP WAWANCARA
PENELITIAN DI SDN 24 KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR

INFORMAN : KEPALA SEKOLAH
NAMA : Dra. Ch. Purwanti
NIP : 130829907

Peneliti :

“Sejauh yang Ibu, tahu bisa mohon dijelaskan apa itu pendidikan inklusif?”

Kepala Sekolah :

“Pendidikan inklusif adalah penyelenggara pendidikan yang tidak membedakan latar belakang kultur, budaya, sosial ekonomi untuk semua anak tanpa ada perbedaan, termasuk dalam hal ini pendidikan di sekolah bagi anak yang mengalami perbedaan kebutuhan”.

Peneliti :

“Sejak kapan sekolah ini ditetapkan menjadi sekolah inklusif, mohon penjelasan Ibu?”

Kepala Sekolah :

“Sekolah ini mulai menyelenggarakan pendidikan inklusif sejak tahun 2005, pada waktu itu ada program dari Helen Keller Internasional berkenaan dengan model penyelenggaraan sekolah inklusif. Bagi saya penyelenggaraan pendidikan inklusif mendatangkan berkah tersendiri, dulu sekolah ini merupakan sekolah yang tidak dilihat orang, letaknya saja terhalang oleh sekolah lain tapi setelah ada program sekolah inklusif sekolah ini mulai dikenal dan mininati oleh banyak orang. Anak berkebutuhan khusus yang tidak diterima di sekolah lain, banyak yang akhirnya mendaftar dan kebetulan dapat diterima di sini, ini sebagai salah satu indikator menurut saya bahwa tanggapan masyarakat cukup positif. Siswa-siswa yang lain juga tidak berkeberatan dan mereka pada prinsipnya mengerti dan bisa menerima perbedaan diantara mereka”.

Peneliti :

“Apakah dalam penetapan sekolah ini menjadi sekolah inklusif, Ibu juga melakukan koordinasi atau musyawarah dengan warga sekolah lainnya?”

Kepala Sekolah :

“Ya, karena keberhasilan pendidikan inklusif itu tidak terlepas dari dukungan dan komitmen semua pihak, dalam proses selanjutnya penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah ini, kami awali dengan musyawarah yang melibatkan unsur-unsur terkait di sekolah. Setiap ada anak berkebutuhan khusus yang ingin masuk ke sini kami para kepala sekolah dan guru akan rembukan baru kemudian memutuskan”.

Peneliti :

“Apakah ibu melakukan penyesuaian pada visi dan misi sekolah terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang inklusif ini?”

Kepala Sekolah :

“Pastinya demikian, sekolah perlu visi dan misi yang mengarah ke penyelenggaraan inklusif, maka kami pun melakukan penyesuaian tersebut. Visi sekolah ini adalah terwujudny wajib belajar untuk semua dengan baik yang tampak pada penampilan siswa dan hasil belajar yang optimal. Sedangkan misi kita adalah memberikan layanan pendidikan yang ramah dan kondusif”.

Peneliti :

“Apakah Ibu juga membuat program pengembangan pendidikan inklusif untuk sekolah ini , seperti misalnya jangka pendek, menengah dan jangka panjang?”

Kepala Sekolah :

“Ya, dalam pengembangan pendidikan inklusif ini kami memang rancang program-program pengembangan, baik yang berupa jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang”.

Peneliti :

“Apakah sekolah ini kerap melakukan pertemuan internal untuk peningkatan mutu layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus? Mohon jelaskan”.

Kepala Sekolah :

“Betul, kami memang kerap melakukan pertemuan internal yang melibatkan kepala sekolah, guru, guru pembimbing khusus dan orang tua. Menurut saya mereka merupakan komponen penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sini, karena mereka yang merasakan langsung interaksi dengan anak berkebutuhan khusus”.

Peneliti :

“Apakah sekolah melakukan proses identifikasi dalam menerima anak berkebutuhan khusus? Bisa diberikan sedikit penjelasan?”

Kepala Sekolah :

“Kami perlu mengetahui kondisi anak berkebutuhan khusus yang ada atau akan masuk ke sekolah ini, langkah yang dilakukan adalah proses identifikasi. Begini...biasanya dan memang kami sarankan kepada orang tua yang akan mendaftarkan anaknya kesini, terutama bagi anak berkebutuhan khusus akan membawa atau menunjukkan referensi, narasi kebutuhan dari tenaga ahli”.

Peneliti :

“Apakah referensi itu menjadi salah satu syarat?”

Kepala Sekolah :

”iya...dan terus terang kami tidak sembarangan berani memberikan label kepada seorang anak, bila proses dan mekanisme tidak dapat dipertanggungjawabkan”.

Peneliti :

“Apakah sekolah menyimpan hasil identifikasi dari tiap-tiap siswa berkebutuhan khusus dan dari aspek apa saja yang diidentifikasi tersebut?”

Kepala Sekolah :

“Kami simpan dengan baik hasil identifikasi itu, semua ada di pak Herry sebagai guru pembimbing khusus di sini. Biasany hasil identifikasi itu menyangkut identitas siswa, IQ, kondisi emosional, kondisi fisik, bakat dan kemampuan siswa, kelemahan siswa, kebutuhan alat bantu pembelajaran, rencana pembelajaran khusus bagi siswa, pedoman pengajaran individual, termasuk data-data prestasi siswa. Hasil identifikasi ini kami perlukan untuk pembinaan dan pemantauan perkembangan anak berkebutuhan khusus yang ada di sini”.

Peneliti :

“Ada berapa jumlah anak berkebutuhan khusus yang ada atau yang teridentifikasi di sekolah ini, mohon jelaskan kondisi mereka?”

Kepala Sekolah :

“Saat ini kurang lebih ada 38 anak berkebutuhan khusus yang terdiri dari ; satu anak hiperaktif, tiga anak autis, satu anak ADHD, 15 anak mengalami lamban belajar dan 18 anak kesulitan

belajar. Kepada siswa yang sudah ada di dalam pun kami melakukan identifikasi secara tidak langsung, misalnya untuk kelas rendah, seorang anak didapati tidak bisa-bisa untuk pelajaran tertentu, lantas anak tersebut akan dibawa ke ruang khusus untuk diidentifikasi dan diasesmen oleh guru pembimbing khusus, menggunakan instrument yang kita miliki”.

Peneliti :

“Apakah dalam satu kelas terdapat lebih dari satu anak berkebutuhan khusus yang berbeda jenisnya?”

Kepala Sekolah :

“Untuk sekolah ini memang dalam satu kelas terkadang terdapat lebih dari satu jenis kebutuhan anak berkebutuhan khusus”.

Peneliti :

“Apakah masing-masing anak berkebutuhan khusus dibuatkan program pengajaran individual?”

Kepala sekolah :

“Anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak normal, bahkan antara anak berkebutuhan khusus yang satu dengan lainnya pun memiliki karakteristik yang berbeda juga, untuk itu mereka perlu dibuatkan program pengajaran individual yang sesuai. Hal ini perlu dilakukan agar mereka dapat mengikuti pelajaran dengan lebih baik”.

Peneliti :

“Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan program pengajaran individual tersebut?”

Kepala Sekolah :

“yang dilibatkan dalam penyusunan program pengajaran individual ini adalah guru pembimbing khusus, guru kelas dan orang tua”.

Peneliti :

“Orang tua juga dilibatkan ya?”

Kepala Sekolah :

“Ya, tidak bisa kita pungkiri, posisi orang tua sangatlah penting dalam pembinaan bagi anak berkebutuhan khusus, orang tua dipandang sebagai pihak yang juga memahami kondisi anak mereka, untuk itu masukan dan pendapat mereka tentang program yang kita susun itu sangat membantu kami”.

Peneliti :

“Apakah ada kurikulum khusus bagi anak berkebutuhan khusus?”

Kepala Sekolah :

“Untuk kurikulum, kita memang tidak melakukan modifikasi secara khusus karena masih mengharapkan anak berkebutuhan khusus masih bisa dikondisikan untuk belajar seperti anak reguler. Namun memang kadang diperlukan penyesuaian-penyesuaian untuk mereka”.

Peneliti :

“Siapa saja yang ikut dalam penyesuaian kurikulum tersebut?”

Kepala Sekolah :

“Penyesuaian tersebut dilakukan oleh guru kelas, guru mata pelajaran. Kita pernah melibatkan psikolog tapi memang tidak berkesinambungan, karena memang pada waktu itu ada kerjasama dengan fakultas psikolog UI. Kerja sama itu difasilitasi oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa”.

Peneliti :

“Lantas bagaimana dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk anak berkebutuhan khusus, apakah dapat disamakan?”

Kepala Sekolah :

“Pada prinsipnya standar kompetensi dan kompetensi dasar kita buat sama, guru kelas masih berusaha anak berkebutuhan khusus mampu sama layanan materinya dengan reguler, walau tidak kami pungkiri terkadang perlu disesuaikan juga untuk beberapa kondisi. Secara umum bagi anak berkebutuhan khusus, untuk kelas satu, dua dan tiga target kami adalah membaca, menulis dan berhitung, sedangkan untuk kelas empat, lima dan enam, target kami adalah pemahaman siswa”.

Peneliti :

“Siapa saja yang mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut?”

Kepala Sekolah :

“Standar kompetensi dan kompetensi dasar itu dibuat oleh guru kelas dan guru pembimbing khusus. Untuk mengakomodir kondisi siswa, maka standar kelulusan kami turunkan, tapi kualitas pembelajaran tidak berarti diturunkan juga, anak-anak normal tetap dipacu untuk mencapai kompetensi dan hasil yang setinggi-tingginya sedangkan di sisi lain, anak berkebutuhan khusus masih dapat mencapai standar kompetensi yang ada tersebut”.

Peneliti :

“Untuk materi pembelajaran, apakah juga disesuaikan?”

Kepala Sekolah :

“Dalam hal materi pembelajaran kadang pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus oleh guru kelas ada modifikasi, dalam hal ini memang layanannya dari guru pembimbing khususlah yang lebih fokus”.

Peneliti :

“Apakah sekolah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus?”

Kepala Sekolah :

“Untuk rencana pelaksanaan pembelajaran disusun dan disesuaikan oleh guru kelas masing-masing dan dibantu oleh guru pembimbing khusus”.

Peneliti :

“Apa saja yang termuat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut?”

Kepala Sekolah :

“Rencana pelaksanaan pembelajaran itu seperti biasa mencakup waktu belajar, mekanisme belajar, tempat belajar, sumber belajar termasuk media atau alat bantu pembelajaran bila diperlukan”.

Peneliti :

“Bagaimana proses belajar mengajar bagi anak berkebutuhan khusus yang dilakukan?”

Kepala Sekolah :

“kadang-kadang proses belajar mengajar di kelas bagi anak berkebutuhan khusus perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan ada juga waktunya di kelas didampingi oleh guru pembimbing khusus. Atau ada juga ide saya untuk meminta orang tua ikut mendampingi anaknya di kelas...ya tapi itu hanya sekedar ide sih”.

Peneliti :

“Dengan perencanaan dan pelaksanaan proses belajar mengajar bagi anak berkebutuhan khusus, apakah soal-soal yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus dapat disamakan dengan anak normal lainnya?”

Kepala Sekolah :

“Secara umum dengan menggunakan perencanaan dan proses belajar mengajar yang diterapkan saya pikir soal-soal ulangan, ujian dan lain-lain bagi anak berkebutuhan khusus bisa disamakan dengan siswa reguler, tapi mungkin tidak untuk beberapa kondisi.”

Peneliti :

“Apakah guru-guru disekolah ini pernah diikuti dalam pelatihan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif?”

Kepala Sekolah :

“Beberapa guru di sini sudah mengikuti pelatihan tentang pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus. Termasuk di sini adalah guru pembimbing khusus”.

Peneliti :

“Apakah guru pembimbing khusus yang ibu sebutkan tadi memiliki latar belakang pendidikan khusus dan atau mereka memiliki pengalaman di sana?”

Kepala Sekolah :

“Kami memiliki seorang guru pembimbing khusus, mereka memiliki latar belakang tentang pendidikan khusus dan sudah cukup berpengalaman dalam menangani anak berkebutuhan khusus”.

Peneliti :

“Apakah jumlah mereka sudah ideal, bila dibandingkan dengan anak berkebutuhan khusus yang ada di sini?”

Kepala Sekolah :

“Hmmm kalau menurut saya kok masih belum ideal ya antara jumlah anak berkebutuhan khusus yang dengan guru pembimbing khususnya, coba bayangkan seorang guru pembimbing khusus menangani tiga puluh delapan anak berkebutuhan khusus”.

Peneliti :

“Apakah sekolah ini juga melakukan kemitraan dengan tenaga ahli lainnya seperti dengan psikolog ataupun tim medis?”

Kepala Sekolah :

“Walaupun belum bisa berkesinambungan karena keterbatasan yang ada, namun kami pernah melakukan kemitraan dengan tenaga psikolog ataupun tim medis, yaitu pada saat ada program kerja sama yang difasilitasi oleh pemerintah maupun lembaga Helen Keller Internasional beberapa waktu yang lalu”.

Peneliti :

“Bisa dijelaskan dengan siapa saja kerja sama itu?”

Kepala Sekolah :

“Misalnya dengan fakultas psikologi Universitas Indonesia, Uhamka, dan Universitas Atmajaya. Kalau dengan UI mereka memberikan pembinaan tentang bagaimana mendamping anak berkebutuhan khusus yang baik di kelas. Dengan Uhamka pemahaman tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus dan cara penanganannya di kelas. Sedangkan dengan universitas Atmajaya terkait dengan evaluasi kegiatan inklusi di sini”.

Peneliti :

“Ada lagi kemitraan yang lain?”

Kepala Sekolah :

“Ada juga kami bermitra dengan pusat sumber yang ada di SLBN 7 Matraman, Jakarta Timur. Dari tempat itu jugalah guru pembimbing khusus kami berasal. Banyak sekali kontribusi dari SLBN 7 Matraman sebagai pusat sumber itu, antara lain bedah standar kompetensi dan kompetensi dasar, penyusunan silabus untuk membuat ppi atau modifikasi indikator baru untuk siswa kelas I”.

Peneliti :

“Apakah sekolah ini menyediakan quota khusus bagi anak berkebutuhan khusus setiap tahunnya?”

Kepala Sekolah :

“Setiap tahun kami menyediakan kuota untuk anak berkebutuhan khusus sebanyak lima persen dari daya tampung yang ada. Misalnya siswa kelas satu daya tampungnya 40 anak, paling tidak anak berkebutuhan khusus yang mampu ditampung adalah dua orang”.

Peneliti :

“Apakah Ibu juga memberikan perhatian pada bakat non akademik anak berkebutuhan khusus di sini?”

Kepala Sekolah :

“Sementara ini sekolah kami masih fokus pada pembelajaran biasa, untuk bakat dan kemampuan siswa belum kami tangani secara khusus.”

Peneliti :

“Apakah kelas yang ada sekarang sudah aksesable bagi anak berkebutuhan khusus di sini dan bagaimana dengan sarana dan prasarana yang ada?”

Kepala Sekolah :

“Sampai dengan saat ini, untuk kondisi anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah kami, kelas yang ada masih cukup aksesable bagi mereka. Kami juga memiliki beberapa alat bantu pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus, walaupun secara umum aksesibilitas dari sarana dan prasarana bagi anak berkebutuhan khusus perlu ditingkatkan lagi”.

Peneliti :

“Apakah sekolah ini memiliki perpustakaan dan atau laboratorium yang aksesable bagi anak berkebutuhan khusus di sini?”

Kepala Sekolah :

“Untuk perpustakaan ataupun laboratorium khusus yang aksesable bagi anak berkebutuhan khusus memang kami belum punya, tapi kami pernah mendapat perangkat komputer dari Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di sini”.

Peneliti :

“Langkah apa yang ibu lakukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi anak berkebutuhan khusus tersebut?”

Kepala Sekolah :

“Bila mendapat bantuan dari Dinas, sesuai dengan kebutuhan dikondisikan sesuai dengan kebutuhan yang dikelola dan diidentifikasi oleh guru pembimbing khusus”.

Peneliti :

“Apakah ada alokasi dana khusus untuk penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus?”

Kepala Sekolah :

“Ya, kami mendapat dana khusus untuk penyelenggaraan program inklusif dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tingkat dua.

Peneliti :

“Apakah dalam pengelolaan pendidikan inklusif di sekolah ini ditangani sendiri oleh Ibu?”

Kepala Sekolah :

“Untuk membantu saya dalam hal administratif atau hubungan dengan pihak pemerintah, saya menunjuk seorang manager program inklusif di sekolah ini. Posisi itu dipegang orang Bapak Maruli, salah seorang guru di sini”.

Peneliti :

“Apakah keberadaan guru pembimbing khusus dan manager tadi tertuang dalam struktur organisasi sekolah?”

Kepala Sekolah :

“Karena keberadaan manager program pendidikan inklusif dan guru pembimbing khusus sangat penting dalam pengembangan program pendidikan inklusif, maka posisi mereka harus jelas, untuk itu keberadaan mereka kami masukkan dalam struktur organisasi sekolah sebagai komponen yang tidak terpisahkan. Di sana jelas kepada siapa mereka harus bertanggungjawaban dan berkoordinasi”.

Peneliti :

“Apa saran atau harapan Ibu terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah ini?”

Kepala Sekolah :

“Membangun inklusif di sekolah akan terasa nyaman bila semua stake holder yang ada punya komitmen yang kuat dan sama. Saling mendukung, membantu untuk berani mengadakan perubahan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan. Para guru perlu secara kontinu mendapat pengetahuan tentang kekhususan anak berkebutuhan khusus untuk melayaninya di kelas. Saran

dan prasarana yang juga harus mendukung serta media pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus harus sesuai dengan kebutuhan”.



TRANSKRIP WAWANCARA
PENELITIAN DI SDN 24 KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR

INFORMAN : GURU PEMBIMBING KHUSUS (GPK)

NAMA : Hery Susanto, S.Pd

NIP : - (guru honorer)

Peneliti :

“Mohon bisa dijelaskan apa itu pendidikan inklusif sejauh yang Bapak tahu?”

GPK :

“pendidikan yang ramah yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus ke dalam pendidikan reguler”.

Peneliti :

“Apakah Bapak ikut dalam pengembangan program pendidikan inklusif di sekolah ini, bisa tolong dijelaskan?”

GPK :

“betul betul, saya ikut dalam pengembangan program pendidikan inklusif di sekolah ini, beberapa kali saya ikut dalam pelatihan tentang inklusi, dan saya juga terlibat dalam pembuatan buku assesmen anak kesulitan belajar dan remedial bagi anak kesulitan belajar”.

Peneliti :

“Apakah dalam menerima anak berkebutuhan khusus sebelumnya dilakukan identifikasi?”

GPK :

”Ya, untuk indetifikasi prosesnya dilakukan secepat mungkin, mulai dari penerimaan siswa baru sampai dengan laporan dari guru masing-masing kelas”.

Peneliti :

“Apakah dalam proses identifikasi tersebut melibatkan tenaga lain seperti psikolog dan atau tim medis?”

GPK :

“Kadang kita menggunakan tenaga psikolog dalam proses identifikasi tersebut, dalam kondisi tertentu kami tidak berani sembarang memberikan labeling kepada anak, semua harus dapat dipertanggungjawabkan”.

Peneliti :

“Sekolah menyimpan hasil identifikasi dimaksud?”

GPK :

“Ya, untuk keperluan pembinaan kami menyimpan hasil identifikasi masing-masing anak tersebut. Hasil identifikasi tersebut biasanya mencakup, identitas siswa, IQ siswa, kebutuhan alat bantu pembelajaran dan rencana pembelajaran khusus siswa”.

Peneliti :

“Apakah dalam satu kelas terdapat lebih dari satu jenis anak berkebutuhan khusus?”

GPK :

“Kebetulan di sekolah kami, memang dalam satu kelas terdapat lebih dari satu jenis kebutuhan dari anak berkebutuhan khusus”.

Peneliti :

“Bisa dijelaskan bagaimana pengembangan program pengajaran individual yang dilakukan di sekolah ini?”

GPK :

“Karakteristik dari anak berkebutuhan khusus menyebabkan kita harus merancang program pengajaran individual untuk masing-masing siswa, penyusunannya banyak saya lakukan di ruang sumber atau ruang khusus yang tersedia . Biasaya penyusunan program pengajaran individual itu atas rekomendasi dan masukan dari guru kelas masing-masing atau guru mata pelajaran dan kadang dari orang tua ataupun tenaga psikolog”.

Peneliti :

“Adakah perubahan pada kurikulum di sini, tentunya bagi anak berkebutuhan khusus?”

GPK :

“Penyesuaian kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus dilakukan bersama guru kelas dengan mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang ada”.

Peneliti :

“Apakah anak berkebutuhan khusus dapat mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar layaknya anak normal, bagaimana penanganannya?”

GPK :

“Penyesuaian pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai kadang perlu dilakukan, biasanya dalam proses penyesuaian itu melibatkan guru kelas, guru mata pelajaran dan saya sebagai guru pembimbing khusus”.

Peneliti :

“Bagaimana dengan proses belajar, apakah ada materi yang juga disesuaikan untuk mereka?”

GPK :

“Demikian halnya dalam proses belajar, karena kondisi anak berkebutuhan khusus itu bermacam-macam maka kita perlu melakukan modifikasi. Bagi anak berkebutuhan khusus, sesuai kebutuhan modifikasi materi pembelajaran kadang dilakukan di kelas kecil”.

Peneliti :

“Siapa saja yang terlibat dalam modifikasi pembelajaran tersebut?”

GPK :

“Dalam modifikasi pembelajaran itu melibatkan orang tua, guru kelas dan guru pembimbing khusus”.

Peneliti :

“Tentu dengan semakin kompleksnya karakter siswa yang ada, diperlukan rencana pembelajaran yang lebih matang, siapa saja yang terlibat dalam pembuatan rencana pembelajaran tersebut?”

GPK :

“Untuk rencana pembelajaran memang dibuat oleh guru kelas, saya sebagai guru pembimbing khusus hanya sebatas pemberian masukan bagi guru kelas dalam hal metode yang dilakukan dalam mengajar anak berkebutuhan khusus di kelas reguler”.

Peneliti :

“Boleh tahu aspek apa saja yang tercakup dalam rencana pembelajaran tersebut?”

GPK :

“Rencana pembelajaran itu umumnya mencakup waktu belajar, mekanisme belajar, tempat belajar, sumber belajar, dan media alat bantu pembelajaran”.

Peneliti :

“Boleh Bapak jelaskan secara garis besar bagaimana peranan Bapak dalam proses pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus?”

GPK :

“Tentu dalam mengakomodir karakteristik anak berkebutuhan khusus terkadang memang diperlukan penyesuaian pada proses belajar mengajar yang ada, sebagai pendampingan bagi guru kelas dalam proses belajar di kelas reguler, dalam hal pemberian program bagi anak berkebutuhan khusus dikelasnya. Saya biasanya memanfaatkan ruang sumber atau ruang khusus yang ada untuk memberikan pendalaman materi bagi anak berkebutuhan khusus bila diperlukan, dalam pendalaman materi tersebut lebih kepada konsep pemahaman untuk menerima dengan cepat”.

Peneliti :

“Dalam hal penilaian hasil belajar, apa bisa disamakan antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus?”

GPK :

“Tidak selalu..., penilaian pada hasil belajar terkadang perlu dimodifikasi juga, saya dilibatkan oleh guru kelas dalam pemberian nilai bagi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya”.

Peneliti :

“Berarti termasuk soal yang dibedakan juga ya?”

GPK :

“Untuk beberapa keadaan memang bisa soal-soal yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus disamakan dengan anak normal lainnya, tapi pada kondisi tertentu mungkin perlu dibedakan”.

Peneliti :

“Apakah Bapak memiliki jadwal atau rencana koordinasi dengan guru kelas atau pihak lain dalam menangani anak berkebutuhan khusus ini?”

GPK :

“Dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi anak diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, untuk itu saya membuat jadwal layanan bagi orang tua anak berkebutuhan khusus untuk berbagi masalah anak dengan guru kelas dan guru pembimbing khusus”.

Peneliti :

“Apakah Bapak memiliki latar belakang pendidikan khusus?”

GPK :

“Kebetulan saya memang memiliki latar belakang pendidikan khusus”.

Peneliti :

“Apakah Bapak setiap hari ada di sekolah ini untuk memberikan pendampingan?”

GPK :

“Sebenarnya saya tidak setiap hari berada di sekolah ini, karena dalam satu minggu, satu hari digunakan untuk mengajar di pusat sumber SLBN 7 Matraman, tempat saya berasal. Tapi bila diperlukan sewaktu-waktu saya siap untuk datang ke sini”.

Peneliti :

“Menurut Bapak, apakah rasio jumlah guru pembimbing khusus dengan anak berkebutuhan khusus yang ada sudah memadai?”

GPK :

“Kalau berbicara rasio tentu masih kurang, bayangkan saja sekolah ini hanya memiliki satu guru pembimbing khusus, sedangkan anak yang harus ditangani sekitar tiga puluh delapan orang, itu pun dengan berbagai jenis kebutuhan yang berbeda. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, saya membuat jadwal untuk pendampingan ataupun pendalaman materi bagi anak berkebutuhan khusus tersebut, sehingga semua anak dapat tersentuh dan terlayani. Jelas menurut saya guru pembimbing khusus itu perlu ditambah”.

Peneliti :

“Apakah Bapak juga melakukan kerja sama dengan psikolog atau tim medis dalam membina anak berkebutuhan khusus yang ada ini?”

GPK :

“Ya, terkadang saya bekerja sama dengan tenaga psikolog, biasanya saat ada program kerjasama yang difasilitasi oleh pemerintah atau pihak lain”.

Peneliti :

“Dengan tim medis?”

GPK :

“Kalau dengan tim medis, sejauh yang saya ingat secara khusus tidak”.

Peneliti :

“Apakah kelas yang ada atau sarana dan prasarana yang ada sudah aksesable bagi anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah ini?”

GPK :

“Untuk kelas, sampai dengan saat ini masih aksesable untuk jenis anak berkebutuhan khusus yang ada di sini, kami juga memiliki beberapa alat bantu pembelajaran yang memadai. Tapi saya berharap sarana dan prasarana yang aksesible bagi anak berkebutuhan khusus dapat lebih ditingkatkan lagi”.

Peneliti :

“Apakah sekolah ini memiliki perpustakaan atau laboratorium khusus bagi anak berkebutuhan khusus?”

GPK :

“Secara khusus untuk perpustakaan dan laboratorium bagi anak berkebutuhan khusus memang kita belum memiliki, tapi kita pernah mendapat bantuan perangkat computer bagi anak berkebutuhan khusus di sini untuk meningkatkan mutu pembelajaran”.

Peneliti :

“Langkah apa yang sudah dilakukan oleh sekolah ini untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas tersebut?”

GPK :

“Sekolah kami kerap menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk membantu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana seperti misalnya dengan pihak Dinas Pendidikan”.

Peneliti :

“Harapan atau saran Bapak tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif, khususnya di sekolah inia?”

GPK :

“Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan lagi tentang sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, khususnya tenaga guru pembimbing khusus”.



TRANSKRIP WAWANCARA
PENELITIAN DI SDN 24 KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR

INFORMAN : GURU KELAS/MP
NAMA : Drs Maruli B.
NIP : 131455478

Peneliti :

“Bisa tolong dijelaskan pengertian Bapak tentang pendidikan inklusif?”

Guru Kelas/MP :

“Pendidikan inklusif adalah pendidikan untuk semua tanpa membeda-bedakan latar belakang siswa maupun siswinya”.

Peneliti :

“Apakah Bapak diikutkan dalam proses musyawarah penetapan sekolah ini menjadi sekolah inklusif, mohon dijelaskan?”

Guru Kelas/MP :

“Ya, sejak awal pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah ini saya diikutkan dalam proses musyawarah. Pada waktu itu saya turut membantu kepala sekolah dalam merespon pelaksanaan sekolah inklusif, karena memang sekolah ini menjadi sekolah inklusif pada awalnya adalah berdasarkan penunjukan pemerintah. Saya ajak guru-guru untuk berkomitmen bersama melaksanakan dan menjalankan tujuan dimaksud”.

Peneliti :

“Bagaimana dengan pengembangan program pendidikan inklusif di sekolah ini, terutama peran Bapak sendiri?”

Guru Kelas/MP :

“Dalam pengembangan program pendidikan pendidikan inklusif di sekolah ini saya turut serta dalam pengembangan penata layanan pendidikan kepada siswa dan siswi di sini”.

Peneliti :

“Apakah Bapak mengetahui bagaimana proses identifikasi bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah ini, mohon jelaskan?”

Guru Kelas/MP :

“Untuk tahapan tertentu misalnya untuk tahap awal sekali, proses identifikasi dapat dilakukan oleh guru dan orang tua menggunakan format yang telah dirancang bersama oleh tenaga yang ahli dalam identifikasi. Saya ikut dalam proses penyusunan format isian angket oleh orang tua siswa untuk mengetahui latar belakang anak sehingga kita dapat melakukan penata layanan pendidikan secara spesifik terhadap anak tersebut”.

Peneliti :

“Apakah sekolah memiliki rancangan program pengembangan pendidikan inklusif, misalnya untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang?”

Guru Kelas/MP :

“Ya, dalam pengembangan pendidikan inklusif ini kami memang rancang program-program pengembangan, baik yang berupa jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang”.

Peneliti :

“Terkait dengan penyusunan program pengajaran individual, sampai sejauh mana peranan Bapak sebagai guru dalam hal ini?”

Guru Kelas/MP :

“Peranan saya dalam penyusunan program pengajaran individual adalah memberikan informasi kepada guru pembimbing khusus tentang kesulitan-kesulitan belajar yang dialami oleh siswa dan siswi berkebutuhan khusus tersebut, guna penanganan proses belajar mengajar siswa dan siswi berdasarkan kemampuan dan kebutuhan anak tersebut”.

Peneliti :

“Siapa saja selain Bapak yang terlibat dalam penyusunan program pengajaran individual tersebut?”

Guru Kelas/MP :

“Tentu dalam penyusunan program pengajaran individual tersebut kita bekerja secara tim, yang terdiri dari guru pembimbing khusus, guru kelas, kepala sekolah, guru bidang studi maupun komite sekolah, semua harus peduli demi keberhasilan ini”.

Peneliti :

“Apakah masing-masing anak dibuatkan program pengajaran individual yang berbeda satu dengan lainnya?”

Guru Kelas/MP :

”Ya...karena kondisi dan karakteristik anak berkebutuhan khusus itu masing-masing berbeda, maka terkadang kita juga harus membuat program pembelajaran pengajaran individual yang berbeda juga”.

Peneliti :

“Bagaimana dengan kurikulum yang dikembangkan dan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD yang harus dicapai anak berkebutuhan khusus?”

Guru Kelas/MP :

“Kurikulum dan SKKD yang diberlakukan kadang perlu disesuaikan karena kondisi anak yang bervariasi, adapun yang terlibat dalam penyesuaian itu adalah guru pembimbing khusus, guru kelas, guru bidang studi dan kepala sekolah dan juga rekanan lembaga lain yang berkaitan dengan fungsinya”.

Peneliti :

“Untuk materi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, apakah juga dilakukan penyesuaian, jika ya, siapa saja yang terlibat dalam penyesuaian tersebut?”

Guru Kelas/MP :

“Untuk materi pembelajaran memang kadang juga perlu disesuaikan misalnya pokok bahasan pembelajaran yang akan disampaikan pada anak berkebutuhan khusus, untuk itu kami kerap berdiskusi yaitu antara guru pembimbing khusus, guru kelas , guru bidang studi dan juga kepala sekolah”.

Peneliti :

“Sebagai guru kelas, bisa Bapak jelaskan bagaimana dengan rencana pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus dan apa saja yang dimasukkan dalam rencana pembelajaran tersebut?”

Guru Kelas/MP :

“Dalam penyusunan rencana pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus pada prinsipnya adalah agar proses memudahkan materi ajar dilihat dari tingkat kemampuan penerimaan anak berkebutuhan khusus, waktu dan bobot pelajaran yang harus disesuaikan. Dalam penyesuaian

rencana pelaksanaan pembelajaran itu kita pertimbangkan mengenai waktu belajar, mekanisme, tempat, sumber belajar dan alat bantu pembelajaran yang diperlukan. Di samping pembelajaran kurikuler, bagi anak berkebutuhan khusus juga dilibatkan dalam pembelajaran ekstra kurikuler seperti pembelajaran komputer, kepramukaan dan bercocok tanam”.

Peneliti :

“Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan rencana pembelajaran tersebut?”

Guru Kelas/MP :

“Dalam penyusunan dan penyesuaian rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut juga melibatkan kepala sekolah dan guru-guru”.

Peneliti :

“Bagaimana proses belajar mereka?”

Guru Kelas/MP :

“Bagi anak berkebutuhan khusus proses belajar untuk beberapa mata pelajaran disesuaikan dengan kemampuan penerimaan anak berkebutuhan khusus itu sendiri”.

Peneliti :

“Apakah anak berkebutuhan khusus kerap didampingi oleh guru pembimbing khusus di dalam kelas, saat proses belajar mengajar di kelas?”

Guru Kelas/MP :

“Dalam kondisi tertentu, kadang anak berkebutuhan khusus memerlukan pendampingan langsung di dalam kelas saat proses belajar mengajar di kelas reguler, pendampingan itu dapat dilakukan oleh orang tua siswa, kita menyebutnya dengan istilah shadow, namun demikian itu hanya terjadi sewaktu-waktu saja loh, dan bila diperlukan guru dilibatkan, ya melihat situasi dan kondisi anak berkebutuhan tersebutlah pada intinya ”.

Peneliti :

“Apakah ada penyesuaian atau dispensasi dalam hal penilaian bagi anak berkebutuhan khusus?”

Guru Kelas/MP :

“Untuk penyesuaian penilaian bila diperlukan kami merundingkan proses penilaian yang akan diberikan kepada anak tersebut berdasarkan tingkat kemampuan dan kompetensi yang diperolehnya”.

Peneliti :

“Apakah soal-soal yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus, seperti soal ulangan, soal ujian atau soal-soal lainnya dapat disamakan dengan anak normal lainnya?”

Guru Kelas/MP :

“Untuk masalah soal-soal yang diberikan, pada satu dua anak mungkin masih bisa, tapi untuk yang lain tidak bisa disamakan dan kita perlu pertimbangkan itu. Perlu diketahui terkadang dengan pertimbangan tertentu anak berkebutuhan khusus mendapat dispensasi untuk naik kelas. Karena sudah otonomi sekolah maka oleh Dinas sekolah dapat melakukan modifikasi pendidikan.

Peneliti :

“Bagaimana dengan kesiapan anak jika menghadapi ujian akhir tahun?”

Guru Kelas/MP :

Terkait dengan ujian akhir sekolah kami menerapkan dua alternative. Bila berdasarkan rencana dan proses pembelajaran yang dilakukan anak dinilai mampu mencapai standar yang ada atau bahkan melebihi standar maka alternative pertama yang diambil adalah mengikut sertakan mereka pada ujian nasional bersama anak normal lainnya. Namun bila memang berdasarkan penilaian anak berkebutuhan khusus tidak dapat mencapai standar yang ada maka kami menyediakan alternatif kedua, yaitu sekolah membuat ujian sendiri bagi anak berkebutuhan khusus yang sesuai dengan tingkat kemampuan anak, bukti lulusnya berupa surat keterangan tanda tamat belajar, disini otomatis anak tidak disarankan untuk mengikuti ujian nasional. Dalam memberikan alternative kedua ini kami akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada orang tua siswa bersangkutan. Bila ternyata orang tua menginginkan anaknya tetap mengikuti ujian nasional maka kami tidak bisa menolaknya, namun kami akan memberikan penjelasan sebelumnya bahwa anak kemungkinan tidak lulus dan itu merupakan konsekwensi yang harus dapat mereka terima.”

Peneliti :

“Apakah Bapak pernah diikutkan dalam pelatihan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif?”

Guru Kelas/MP :

“Ya saya pernah mengikuti pelatihan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif yang diadakan oleh pemerintah dan beberapa lembaga yang kadang melakukan program-program atau penelitian di sini”.

Peneliti :

“Apakah Bapak mengalami kesulitan dalam mengajar anak berkebutuhank husus di sini?”

Guru Kelas/MP :

“hmmmm ...bila ditanya masalah kesulitan dalam memberikan materi pembelajaran di kelas tentu ada, begini...ketika menyampaikan materi sesederhana mungkin pasti mengalami gangguan dari anak berkebutuhan khusus tersebut, di samping pemahaman yang tidak sama dengan siswa atau siswi reguler lainnya, juga beberapa anak berkebutuhan khusus tidak dapat lama berdiam diri di kelas...ya mereka memiliki karakteristik yang berbeda...tapi kami tetap komit kok. Untuk kami penyelenggaraan pendidikan inklusif ini memberikan kepuasan tersendiri. Contohnya Andikayang mulai sekolah di sini sejak kelas tiga dan saat ini sudah kelas enam, andika sekolah di tempat ini karena di sekolah yang lama ia kurang mendapat perlakuan khusus. Pertama kali datang kondisinya sangat memprihatinkan, berjalan dia sulit, berkomunikasi pun sulit, tapi sekarang kondisinya sudah jauh membaik, walupun tidak sesempurna anak normal, tapi ia sudah bisa berjalan, berkomunikasi dengan baik, Andikan merupakan salah satu siswa kebanggaan kami”.

Peneliti :

“Adakah kemitraan yang Bapak lakukan dengan psikolog atau tim medis?”

Guru Kelas/MP :

“Ya...pada waktu-waktu tertentu kami ada berkerja sama dengan psikolog ataupun tim medis”.

Peneliti :

“Dengan pihak lain mungkin?”

Guru Kelas/MP :

“kami pernah bermitra juga dengan Helen keller Internasional yaitu terkait dengan sarana pembelajaran, dengan pihak Universitas Indonesia dan Universitas Negeri Jakarta yang masing-masing memberikan bimbingan pada guru-guru dalam proses pelayanan pendidikan inklusi....ada juga kami kerja sama dengan pihak Pantara yaitu terkait dengan proses modifikasi”.

Peneliti :

“Adakah dana khusus misalnya honor atau insentif khusus untuk Bapak atau guru-guru terkait penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sini?”

Guru Kelas/MP :

“rasanya kok tidak ada honor khusus terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini”.

Peneliti :

“Saran dan atau harapan Bapak terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif?”

Guru Kelas/MP :

“Saran saya?...bila kita sadari adalah menyentuh hati nurani kita bahwa sekarang ini banyak putra dan putri generasi penerus bangsa kita yang berada pada situasi inklusif yang mengharapkan dan menanti guru untuk melayani pendidikan khusus bagi mereka. Untuk itu harapan saya hendaknya pemerintah secepatnya menginstruksikan dan member sk penunjukan bagi semua sekolah negeri yang ada di nusantara ini untuk melaksanakan pendidikan inklusif dan memberdayakan dan memfasilitasi semua guru guru Indonesia, mungkin melalui bimbingan dan penataran khusus guna pelayanan pendidikan inklusif. Dan bagi sekolah yang sudah melaksanakan pendidikan inklusif sekarang ini, hendaknya pemerintah memberi perhatian khusus guna memotivasi dengan memberi tunjangan khusus, dibandingkan dengan guru-guru sekolah reguler, dimana tingkat dan beban tugas sangat jauh berbeda”.

TRANSKRIP WAWANCARA
PENELITIAN DI SDN 24 KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR

INFORMAN : ORANG TUA DARI SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS

NAMA : Riana I, SS

NAMA ANAK : Raden Raihan Meganando (KELAS III A)

Peneliti :

ORANG TUA DARI SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS :

“Sekolah inklusif adalah sekolah yang didalamnya ada guru khusus yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus serta adanya sarana-sarana yang menunjang”.

Peneliti :

ORANG TUA DARI SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS :

“Saya mendapatkan informasi kalau sekolah ini dapat menerima anak berkebutuhan khusus dari internet, kebetulan suami saya sering browsing internet untuk mencari hal-hal yang terkait pendidikan bagi anak kami”.

Peneliti

ORANG TUA DARI SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS :

”Saya yakin pendidikan bagi anak saya di sekolah ini dapat berjalan dengan baik karena sekolah inklusif menyediakan guru khusus dan sarana yang cukup untuk anak berkebutuhan khusus”.

Peneliti :

ORANG TUA DARI SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS :

“Masalah lingkungan saya tidak terlalu khawatir, khususnya lingkungan di sekolah ini sudah banyak yang paham mengenai anak-anak berkebutuhan khusus”.

Peneliti :

ORANG TUA DARI SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS L :

“Guru khusus jumlahnya masih kurang kalau untuk menangani anak berkebutuhan khusus yang jumlahnya cukup banyak ini, mohon jumlah mereka ditambah”.

TRANSKRIP WAWANCARA
PENELITIAN DI SDN 24 KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR

INFORMAN : ORANG TUA SISWA NORMAL (ORANG TUA SISWA NORMAL)
NAMA : Ariyanti
NAMA ANAK : Ananda Putri Aulia (Siswi Kelas II-A)

Peneliti :

ORANG TUA SISWA NORMAL :

“Menurut saya adanya pendidikan inklusif di sekolah tidak mengganggu anak normal, tapi kadang ada sedikit anak berkebutuhan khusus yang mengganggu di kelas, kesimpulannya ada yang mengganggu dan ada yang tidak”.

Peneliti : Alasan menyekolahkan anak ibu di sini,apa bu?

ORANG TUA SISWA NORMAL :

“Yak arena anak saya merasa senang sekolah di sini, dan anak saya juga tidak terganggu dengan keberadaan teman sekelasnya yang ABK”.

Peneliti :

ORANG TUA SISWA NORMAL :

”Saya tidak masalah, dan saya tetap tenang dengan kondisi di sini, karena anak berkebutuhan khusus ada guru khusus yang membimbing di sekolah ini dan banyak guru-guru yang mendampingi anak normal”.

Peneliti :

ORANG TUA SISWA NORMAL :

“Saran saya jangan terlalu banyak anak yang berkebutuhan khusus, karena takutnya mengganggu yang normal”.

TRANSKRIP WAWANCARA
PENELITIAN DI SDN 24 KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR

INFORMAN : SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS
(ABK)
NAMA : Andika
JENIS KECACATAN/KEBUTUHAN KHUSUS : Kesulitan Belajar

Peneliti :

“Andika senang sekolah di sini?”

ABK :

(Andika tidak dapat berbicara layaknya anak normal, sehingga kalimat yang diucapkan tidak begitu jelas walau masih dapat ditangkap maksud yang ingin ia sampaikan, respon yang dari pertanyaan yang peneliti lontarkan pun sedikit lambat, pendengarannya pun sedikit kurang sehingga penyampaian pertanyaan harus dengan suara yang lebih mudah didengar olehnya.)“Ya...saya senang sekolah di sini, teman-teman banyak ada Fahmi, Rama, Pingkan Rama”.

Peneliti :

“Andika belajar apa saja di sini?”

ABK :

“Di sini saya belajar matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS dan olah raga”.

Peneliti :

“Suka pelajaran apa sih Andika?”

ABK :

”Pelajaran matematika”.

Peneliti :

“Pernah belajar bareng ga?”

ABK :

“Ya saya suka belajar bareng teman”.

Peneliti :

“Ada kesulitan saat belajar? Mata pelajaran apa saja?”

ABK :

“Ada...hmmm IPA dan IPS”.

Peneliti :

“Lalu, siapa yang bantu Andika?”

ABK :

“Andika les dengan ibu Murni di rumah”.

